



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2023

KANTOR GUBERNUR

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

DINAS PEKERJAAN UMUM PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL DIY

Jalan Bumijo No. 5 Yogyakarta 55231

Telp. (0274) 589074, 589091, Fax (0274) 550320

Website: <http://dpupesdm.jogjaprov.go.id>

E-mail : dpupesdm@jogjaprov.go.id

Kata Pengantar

Sebagai bentuk akuntabilitas publik dari pelaksanaan tugas dan fungsi dan penggunaan anggaran yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah, LKjIP Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral DIY menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral DIY Tahun 2023 yang disusun berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2023.

Sebagai jajaran Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah DIY, Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral DIY melakukan optimalisasi capaian target kinerja sebagaimana tertuang dalam Rencana Strategis Dinas PUPESDM DIY Tahun 2023 – 2026 yang telah disusun berdasar Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2023-2026

Tujuan penyusunan laporan ini adalah untuk memberikan gambaran tingkat pencapaian instansi yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis berdasarkan indikator-indikator yang ditetapkan. Diharapkan penyajian LKjIP ini dapat menjadi bahan evaluasi untuk perbaikan kinerja agar lebih berorientasi pada hasil, relevan, efektif, efisien dan berkelanjutan di masa mendatang.

Yogyakarta, Februari 2024
Kepala Dinas Pekerjaan Umum,
Perumahan dan Energi Sumber Daya
Mineral DIY



ANNA RINA HERBRANTI, S.T., M.T.

NIP. 197106241998032002

Ikhtisar Eksekutif

Capaian kinerja Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral DIY tahun 2023 dalam mewujudkan sasaran strategis dapat digambarkan sebagai berikut:

1. Capaian sasaran strategis 1 **“Penduduk Berakses Air Minum”**:
 - Diukur dengan indikator Jumlah Rumah Tangga yang terlayani air minum layak dan aman dibagi jumlah Rumah Tangga di DIY dikalikan 100%.
 - Capaian indikator dimaksud didukung oleh kinerja 1 (satu) Program, yaitu Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum.
 - Target capaian indikator sasaran tahun 2023 sebesar 95,28%; sampai dengan bulan Desember 2023 terealisasi 95,49%. Dengan demikian capaian ini telah melampaui target. Prosentase realisasi terhadap target (capaian dibagi target dikalikan 100%) mencapai 100,22%.
 - Dibandingkan dengan capaian target tahun 2022 sebesar 94,77% terjadi kenaikan sebesar 0,72%
2. Capaian sasaran strategis 2 **“Penduduk Berakses Sanitasi”**:
 - Diukur dengan indikator Jumlah Rumah Tangga yang terlayani prasarana dan sarana air limbah domestik layak dan aman dibagi jumlah Rumah Tangga di DIY dikalikan 100% .
 - Capaian indikator dimaksud didukung oleh kinerja 3 (tiga) Program, yaitu Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah, Program Pengembangan Sistem Dan Pengelolaan Persampahan Regional dan Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase.
 - Target capaian indikator sasaran tahun 2023 sebesar 94,9%; sampai dengan akhir Bulan Desember 2023 terealisasi 97,69%. Dengan demikian capaian ini telah melampaui target. Prosentase realisasi terhadap target (capaian dibagi target dikalikan 100%) mencapai 102,94%.
 - Dibandingkan dengan capaian target tahun 2022 sebesar 95,68% terjadi peningkatan sebanyak 2,01%.
3. Capaian sasaran strategis 3 **“Penyediaan Infrastruktur Sumber Daya Air”**:
 - Diukur dengan indikator Perbandingan antara jumlah penyediaan infrastruktur Irigasi, embung, sumur bor, dan infrastruktur air baku.

- Capaian indikator dimaksud didukung oleh kinerja 1 (satu) Program, yaitu Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA).
 - Target capaian indikator sasaran tahun 2023 sebesar 70,53%; sampai dengan akhir bulan Desember 2023 terealisasi 73,43%. Dengan demikian capaian ini telah melampaui target. Prosentase realisasi terhadap target (capaian dibagi target dikalikan 100%) mencapai 104,11%.
 - Dibandingkan dengan capaian target tahun 2022 sebanyak 46,38% terjadi peningkatan sebanyak 27,05%.
4. Capaian sasaran strategis 4 **“Peningkatan Aksesibilitas Jalan”**:
- Diukur dengan indikator Total Panjang SK Jalan Provinsi terbangun (662,68 km) + Total Panjang SK Jalan Nasional di DIY terbangun (307,25km) + Total Panjang Jalan baru yang direncanakan terbangun sampai akhir tahun anggaran 2027 (RPJMD 2022 – 2027).
 - Capaian indikator dimaksud didukung oleh kinerja 2 (dua) Program yaitu Program Penyelenggaraan Jalan dan Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Tata Ruang.
 - Target capaian indikator sasaran tahun 2023 sebesar 97,8%; sampai dengan akhir bulan Desember 2023 terealisasi 99,175%. Dengan demikian capaian ini telah melampaui target. Prosentase realisasi terhadap target (capaian dibagi target dikalikan 100%) mencapai 101,4%.
 - Dibandingkan dengan capaian target tahun 2022 sebanyak 100,66 % terjadi penurunan sebanyak 1,485%.
5. Capaian sasaran strategis 5 **“Peningkatan Kinerja Jasa Konstruksi”**:
- Diukur dengan Peningkatan kinerja tenaga konstruksi dan masyarakat jasa konstruksi dengan bobot 35% + Sertifikat/Laporan Hasil Uji yang diterbitkan dengan bobot 35% + Persentase terlayannya rekomendasi analisis perkiraan biaya bangunan dan pendampingan penyelenggaraan bangunan gedung negara dengan bobot 30%.
 - Capaian indikator dimaksud didukung oleh 2 (dua) Program yaitu Program Pengembangan Jasa Konstruksi Dan Program Penataan Bangunan Gedung.
 - Target capaian indikator sasaran tahun 2023 sebesar 57,12%; sampai dengan akhir Bulan Desember 2023 terealisasi 90,65%. Dengan demikian capaian ini telah melampaui target. Prosentase realisasi terhadap target (capaian dibagi target dikalikan 100%) mencapai 158,70%.

- Capaian target tahun 2022 tidak dapat dibandingkan dengan capaian target 2023, karena perbedaan indikator sasaran dan meta indikator.
6. Capaian sasaran strategis 6 **“Rumah Tangga yang Menempati Hunian Layak Huni dan Terjangkau”**:
- Diukur dengan indikator (Jumlah rumah tangga yang menempati tempat tinggal layak huni) / (jumlah rumah tangga di DIY) x 100%.
 - Capaian indikator dimaksud didukung oleh kinerja 4 (empat) Program yaitu Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan, Program Pengembangan Perumahan, Program Kawasan Permukiman, dan Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)
 - Target capaian indikator sasaran tahun 2023 sebesar 96,12%; sampai dengan akhir Bulan Desember 2023 terealisasi 96,12%. Dengan demikian capaian ini telah mencapai/sesuai target. Prosentase realisasi terhadap target (capaian dibagi target dikalikan 100%) mencapai 100,00%.
 - Dibandingkan dengan capaian target tahun 2022 sebanyak 96,65% terjadi penurunan sebanyak 0,53%.
7. Capaian sasaran strategis 7 **“Meningkatnya Rumah Tangga Berakses Listrik”**:
- Diukur dengan indikator Jumlah rumah tangga yang telah menikmati listrik / jumlah rumah tangga total x 100%.
 - Capaian indikator dimaksud didukung oleh kinerja 2 (dua) Program, yaitu Program Pengelolaan Energi Terbarukan dan Program Pengelolaan Ketenagalistrikan.
 - Target capaian indikator sasaran tahun 2023 sebesar 99,99%; sampai dengan akhir Bulan Desember 2023 terealisasi 99,99%. Dengan demikian capaian ini sesuai target. Prosentase realisasi terhadap target (capaian dibagi target dikalikan 100%) mencapai 100,00%.
 - Dibandingkan dengan capaian target tahun 2022 sebanyak 99,99 realisasi tahun 2023 adalah sama.
8. Capaian sasaran strategis 8 **“Meningkatnya Kesesuaian Izin Pengusahaan Air Tanah Dan Pertambangan Terhadap Rencana Tata Ruang”**:
- Diukur dengan indikator ((Jumlah izin air tanah yang sesuai ketentuan + Jumlah izin pertambangan sesuai kaidah pertambangan yang baik) : Total jumlah izin x 100%.

- Capaian indikator dimaksud didukung oleh 2 (dua) kinerja Program, yaitu Program Pengelolaan Aspek Kegeologian dan Program Pengelolaan Mineral Dan Batubara.
 - Target capaian indikator sasaran tahun 2023 sebesar 40,31%; sampai dengan akhir Bulan Desember 2023 terealisasi 40,31%. Dengan demikian capaian ini telah mencapai/sesuai target. Prosentase realisasi terhadap target (capaian dibagi target dikalikan 100%) mencapai 100,00%.
 - Capaian target tahun 2022 tidak dapat dibandingkan dengan capaian target 2023, karena perbedaan sasaran, indikator sasaran dan meta indikator.
9. Capaian sasaran strategis 9 **“Meningkatnya Tata Kelola Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Perangkat Daerah”**:
- Diukur dengan indikator Kategori RB Perangkat Daerah
 - Capaian indikator dimaksud didukung oleh kinerja Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi.
 - Target capaian indikator sasaran tahun 2023 sebesar 88,25% dengan kategori A predikat memuaskan. Dengan demikian capaian ini telah mencapai/sesuai target. Prosentase realisasi terhadap target (capaian dibagi target dikalikan 100%) mencapai 100,00%.
 - Dibandingkan dengan capaian target tahun 2022 sebanyak 82,15% terjadi kenaikan sebanyak 6,1%.

Terhadap capaian kinerja sebagaimana tersebut di atas terdapat beberapa tantangan yang perlu menjadi perhatian bagi Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral DIY ke depan, sebagai berikut:

1. Pemenuhan dan penyerapan SPAM regional untuk memenuhi kebutuhan air bersih seiring pertumbuhan jumlah penduduk
2. peningkatan dan pengembangan infrastruktur pelayanan air limbah untuk mendukung perluasan cakupan
3. Ketersediaan infrastruktur jalan kondisi mantap untuk mendukung peningkatan sektor industri dan pariwisata
4. Pemenuhan Tenaga Ahli Konstruksi bersertifikat untuk mendukung kinerja jasa konstruksi.
5. Percepatan penanganan rumah tidak layak huni bagi rumah tangga miskin.
6. Penyediaan infrastruktur sumber daya air guna mendukung ketahanan pangan daerah.
7. Peningkatan keselamatan ketenagalistrikan bagi masyarakat tidak mampu .

8. Perlu terus ditingkatkan sinergitas antara Tim Gubernur dan Pemerintah Pusat dengan Aparat Penegak Hukum dalam mengatasi permasalahan pertambangan, khususnya penertiban PETI
9. Pengembangan infrastruktur TPA Piyungan masih diperlukan untuk mendukung pengelolaan sampah.
10. Perlu adanya tindak lanjut penetapan Perda RP3KP (Rencana Pembangunan, Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman) di tingkat Kabupaten/Kota.
11. Pengembangan energi terbarukan perlu didorong untuk mendukung pengurangan pengaruh efek rumah kaca terhadap perubahan iklim.

Daftar Isi

KATA PENGANTAR.....	2
IKHTISAR EKSEKUTIF.....	3
DAFTAR ISI.....	8
DAFTAR TABEL.....	9
DAFTAR GAMBAR.....	13
BAB I PENDAHULUAN.....	14
1.1. Cascading Kinerja sebagai Dasar Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah.....	14
1.2. Tugas, Fungsi dan Peta Jabatan.....	17
1.3. Isu-isu Strategis.....	20
1.4. Dukungan SDM, Sarana-Prasarana dan Anggaran.....	23
1.5. Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi SAKIP 2022.....	26
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA.....	27
2.1. Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja OPD.....	28
2.2. Strategi dan Arah Kebijakan.....	29
2.3. Struktur Program dan kegiatan 2023.....	33
2.4. Perjanjian Kinerja Tahun 2023.....	43
2.5. Instrumen Pendukung Capaian Kinerja.....	47
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	49
3.1. Capaian Kinerja Tahun 2023.....	49
3.2. Capaian Kinerja Lainnya.....	149
3.3. Efisiensi Anggaran.....	186
3.4. Inovasi.....	188
3.5. Lintas Sektor.....	189
BAB IV PENUTUP.....	196
4.1. Kesimpulan.....	192
4.2. Langkah Perbaikan Kinerja.....	192
LAMPIRAN.....	193

Daftar Tabel

Tabel I.1	Jabatan Struktural dan Jabatan Pelaksana Dinas PUPESDM DIY Berdasarkan Pergub DIY Nomor 15 Tahun 2021 dan Pergub DIY Nomor 98 Tahun 2022	19
Tabel I.2	Jumlah Pegawai Menurut Kualifikasi Jabatan dan Jenis Kelamin ..	23
Tabel I.3	Sarana-Prasarana	24
Tabel I.4	Anggaran Tahun 2023	24
Tabel I.5	Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi SAKIP 2022	26
Tabel II.1	Sasaran Strategis Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral DIY 2023-2026.....	28
Tabel II.2	Strategi dan Arah Kebijakan	30
Tabel II.3	Struktur Program, Kegiatan, Dan Sub Kegiatan terkait Langsung Pencapaian Sasaran Tahun 2023	33
Tabel II.4	Perjanjian Kinerja Kepala Dinas PUPESDM DIY Tahun 2023	43
Tabel II.5	Perjanjian Kinerja Perubahan Kepala Dinas PUPESDM DIY Tahun 2023	45
Tabel III.1	Skala Nilai Peringkat Kinerja	49
Tabel III.2	Capaian Kinerja Tahun 2023	49
Tabel III.3	Rumusan Indikator dan Formulasi Perhitungan Sasaran 1.....	53
Tabel III.4	Target dan Realisasi Kinerja Sasaran Penduduk Berakses Air Minum	54
Tabel III.5	Data Kependudukan DIY Terlayani Air Minum Tahun 2023	55
Tabel III.6	Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan terhadap Sasaran 1.....	55
Tabel III.7	Kinerja Program Sasaran 1	56
Tabel III.8	Kinerja Keuangan dan Fisik Program Dan Kegiatan Sasaran 1.....	56
Tabel III.9	Analisa Penyebab Keberhasilan Sasaran 1	56
Tabel III.10	Rumusan Indikator dan Formulasi Perhitungan Sasaran 2.....	58
Tabel III.11	Target dan Realisasi Kinerja Sasaran Penduduk Berakses Sanitasi	59
Tabel III.12	Cakupan Akses dan Sistem Layanan Air Limbah Domestik DIY Tahun 2023	60

Tabel III.13	Sambungan Rumah Air Limbah Rumah Tangga	61
Tabel III.14	Realisasi Pelayanan Air Limbah	61
Tabel III.15	Jumlah IPAL Komunal Yang Terbangun Tahun 2023	62
Tabel III.16	Infrastruktur Pengelolaan Sampah.....	64
Tabel III.17	Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan terhadap Sasaran 2.....	66
Tabel III.18	Kinerja Program Sasaran 2	68
Tabel III.19	Kinerja Keuangan dan Fisik Program dan Kegiatan Sasaran 2	69
Tabel III.20	Analisa Penyebab Keberhasilan Sasaran 2	70
Tabel III.21	Rumusan Indikator dan Formulasi Perhitungan Sasaran 3.....	71
Tabel III.22	Peningkatan Luas Fungsional Daerah Irigasi yang terlayani air irigasi	72
Tabel III.23	Target dan Realisasi Kinerja Sasaran 3	72
Tabel III.24	Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan terhadap Sasaran 3.....	73
Tabel III.25	Kinerja Program Sasaran 3	76
Tabel III.26	Kinerja Keuangan dan Fisik Program dan Kegiatan Sasaran 3	77
Tabel III.27	Analisa Penyebab Keberhasilan Sasaran 3	78
Tabel III.28	Rumusan Indikator dan Formulasi Perhitungan Sasaran 4.....	82
Tabel III.29	Target dan Realisasi Kinerja Sasaran 4	82
Tabel III.30	Kondisi Jalan Provinsi Tahun 2023	85
Tabel III.31	Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan terhadap Sasaran 4.....	86
Tabel III.32	Kinerja Program Sasaran 4	90
Tabel III.33	Kinerja Keuangan dan Fisik Program dan Kegiatan Sasaran 4	91
Tabel III.34	Analisa Penyebab Keberhasilan Sasaran 4	92
Tabel III.35	Rumusan Indikator dan Formulasi Perhitungan Sasaran 5.....	94
Tabel III.36	Capaian Indikator Kinerja Sasaran 5.....	95
Tabel III.37	Target dan Realisasi Kinerja Sasaran 5	96
Tabel III.38	Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan terhadap Sasaran 5.....	97
Tabel III.39	Kinerja Program Sasaran 5	99
Tabel III.40	Kinerja Keuangan dan Fisik Program dan Kegiatan Sasaran 5	99
Tabel III.41	Analisa Penyebab Keberhasilan Sasaran 5	100
Tabel III.42	Rumusan Indikator dan Formulasi Perhitungan Sasaran 6.....	102

Tabel III.43	Target dan Realisasi Kinerja Sasaran 6	103
Tabel III.44	Penanganan Rumah Tidak Layak Huni Tahun 2023.....	103
Tabel III.45	Lokasi Kawasan Kumuh Kewenangan Pemda DIY	104
Tabel III.46	Capaian Penanganan Kawasan Kumuh sesuai RPJMD.....	105
Tabel III.47	Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan terhadap Sasaran 6.....	105
Tabel III.48	Kinerja Program Sasaran 6	109
Tabel III.49	Kinerja Keuangan dan Fisik Program dan Kegiatan Sasaran 6	110
Tabel III.50	Analisa Penyebab Keberhasilan Sasaran 6	111
Tabel III.51	Rumusan Indikator dan Formulasi Perhitungan Sasaran 7.....	114
Tabel III.52	Target dan Realisasi Kinerja Sasaran 7	119
Tabel III.53	Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan terhadap Sasaran 7	119
Tabel III.54	Kinerja Program Sasaran 7	122
Tabel III.55	Kinerja Keuangan dan Fisik Program dan Kegiatan Sasaran 7	122
Tabel III.56	Analisa Penyebab Keberhasilan Sasaran 7	123
Tabel III.57	Rumusan Indikator dan Formulasi Perhitungan Sasaran 8.....	124
Tabel III.58	Target dan Realisasi Sasaran 8	131
Tabel III.59	Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan terhadap Sasaran 8.....	132
Tabel III.60	Kinerja Program Sasaran 8	136
Tabel III.61	Kinerja Keuangan dan Fisik Program dan Kegiatan Sasaran 8	136
Tabel III.62	Analisa Penyebab Keberhasilan Sasaran 8	138
Tabel III.63	Rumus Indikator dan Formulasi Perhitungan Sasaran 9.....	140
Tabel III.64	Skema dan bobot nilai evaluasi reformasi perangkat daerah	141
Tabel III.65	Hasil Evaluasi Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah 2023	142
Tabel III.66	Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023 Sasaran 9	144
Tabel III.67	Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan terhadap Sasaran 9.....	144
Tabel III.68	Jumlah Penduduk Miskin atau Tidak Mampu yang beresiko pencemaran Air Limbah Domestik DAN Dekat Badan Air di DIY Tahun 2023	150
Tabel III.69	Target Pencapaian SPM di Bidang Pekerjaan Umum oleh Daerah Tahun 2023	150

Tabel III.70	Program dan Kegiatan Pemenuhan SPM Bidang Pekerjaan Umum di Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2023.....	151
Tabel III.71	Capaian SPM Bidang Pekerjaan Umum di Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2023.....	153
Tabel III.72	Jenis Pelayanan SPM Bidang Perumahan Rakyat	158
Tabel III.73	Target Pencapaian SPM oleh Daerah	158
Tabel III.74	Pendanaan Pemenuhan SPM Bidang Perumahan Rakyat	159
Tabel III.75	Program dan Kegiatan Untuk Pemenuhan SPM Bidang Perumahan di Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2023.....	159
Tabel III.76	Capaian SPM Bidang Perumahan di Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2023	161
Tabel III.77	Capaian Target SPM Bidang Perumahan Rakyat	162
Tabel III.78	Capaian SDGs	168
Tabel III.79	Kontribusi Sasaran Dinas PUPESDM DIY terhadap Sasaran Pemerintah Daerah.....	175
Tabel III.80	Kontribusi Program Sasaran Dinas PUPESDM DIY terhadap Capaian Program Pemerintah Daerah.....	178
Tabel III.81	Anggaran dan Realisasi Belanja Langsung per Sasaran Tahun 2023	185
Tabel III.82	Inventarisasi Lintas Sektor Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan ESDM DIY	187

Daftar Gambar

Gambar I.1. <i>Cascading Kinerja</i> Dinas PUPESDM DIY.....	15
Gambar I.2. Struktur Organisasi Dinas PUPESDM DIY.....	17
Gambar II.1. Sistem Integrasi ROPK,Monitoring dan Evaluasi, E-SAKIP	47
Gambar II.2. Instrumen Pendukung Capaian Kinerja Dinas PUPESDM DIY	48
Gambar III.1. Foto Kegiatan Penyediaan Air Minum Tahun 2023.....	57
Gambar III.2 Peningkatan Kapasitas IPLT Madurejo Kabupaten Sleman	62
Gambar III.3 Pengembangan Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah di DIY.....	64
Gambar III.4 Foto Kegiatan Konstruksi Peningkatan Jaringan Irigasi.....	78
Gambar III.5 Foto Kegiatan Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota	79
Gambar III.6 Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder	80
Gambar III.7 Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	81
Gambar III.8 Kegiatan Pengembangan Lumbung Mataraman.....	81
Gambar III.9 Foto Kegiatan Urusan Penyelenggaraan Jalan.....	92
Gambar III.10 Foto Kegiatan Urusan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Tata Ruang.....	93
Gambar III.11 Foto Kegiatan Sasaran 5.....	101
Gambar III.12 Foto Kegiatan Program Pengembangan Perumahan	112
Gambar III.13 Foto Kegiatan Sasaran 7	123
Gambar III.14 Foto Kegiatan Peningkatan Kesesuaian Izin Pengusahaan Air Tanah Dan Pertambangan Terhadap Rencana Tata Ruang	139

BAB I

Pendahuluan

Bab I berisi:

1. *Cascading Kinerja dan Struktur Organisasi*
2. *Tugas, Fungsi dan Peta Jabatan*
3. *Isu-Isu Strategis*
4. *Dukungan SDM, Sarana-Prasarana dan Anggaran*
5. *Tindak Lanjut atas Rekomendasi LHE SAKIP Tahun 2022*

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) merupakan bentuk pertanggung-jawaban setiap instansi Pemerintah/Pemerintah Daerah yang menyusun Perjanjian Kinerja, atas penggunaan anggaran yang bersumber dari APBD dan/atau APBN. Dasar hukum penyusunan meliputi:

1. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
2. Peraturan Menteri PAN dan RB RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 94 Tahun 2016 tentang Pedoman Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

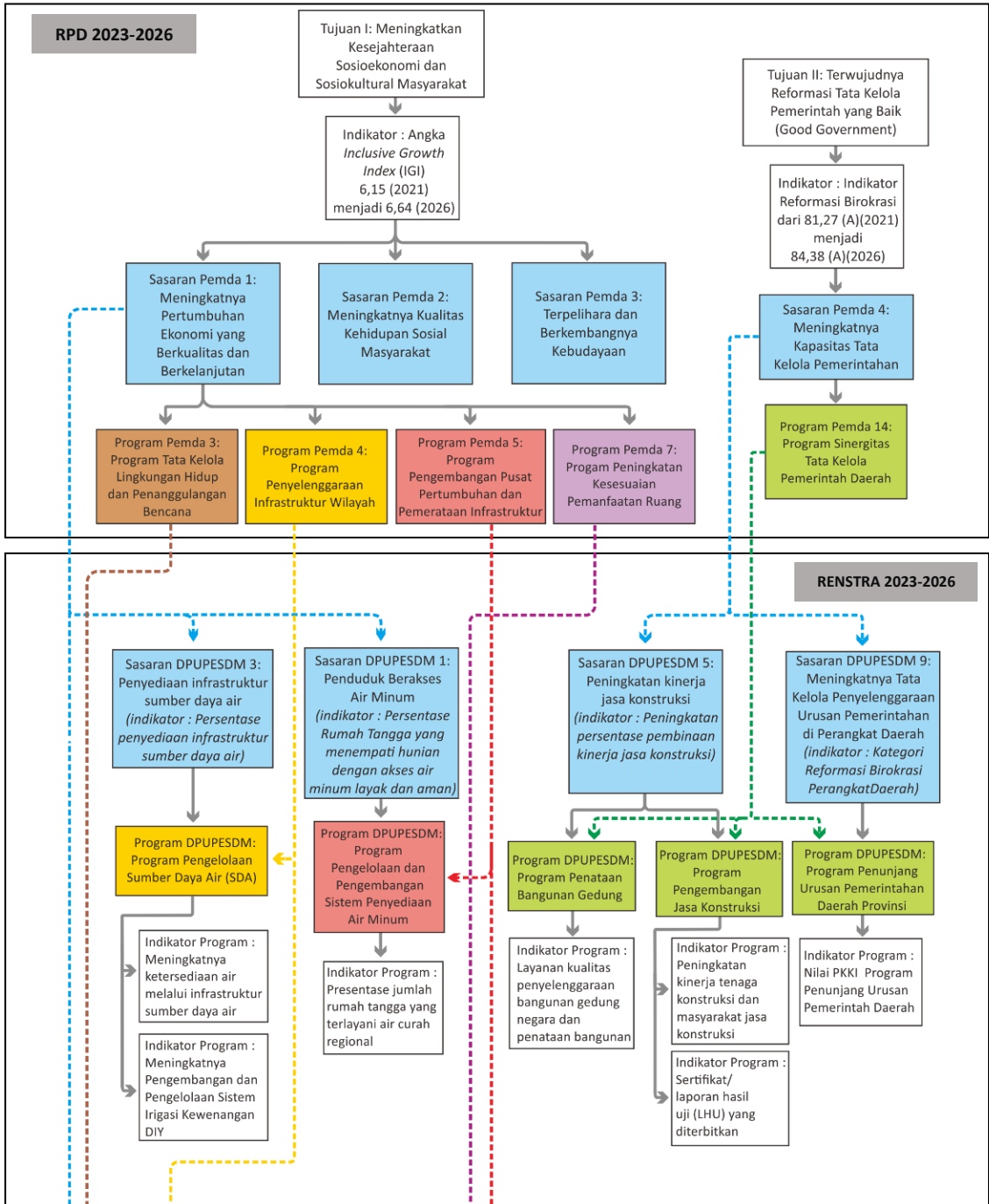
Adapun tujuan penyusunan LKJIP sebagai berikut:

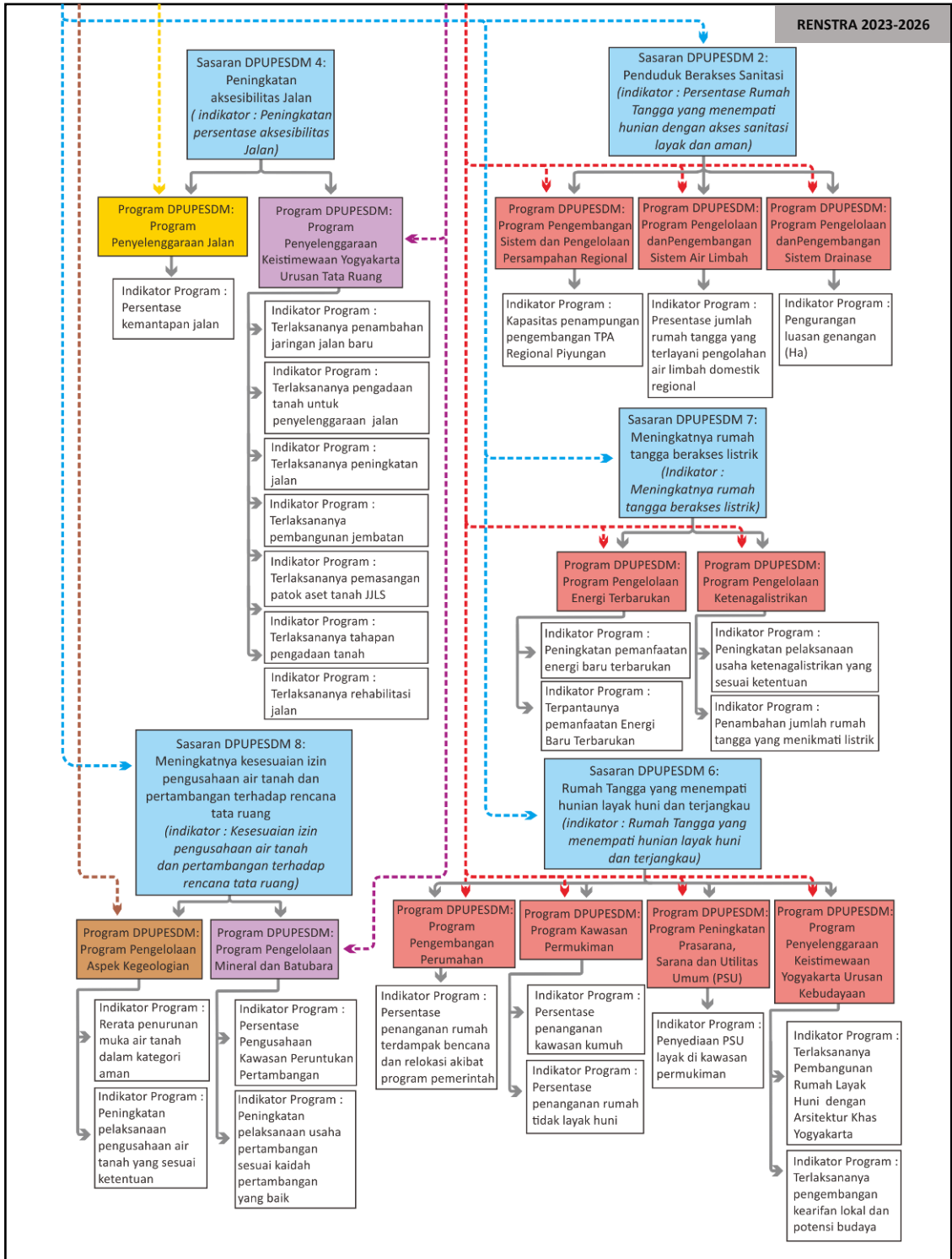
1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai;
2. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan untuk meningkatkan kinerja instansi.

1.1 Cascading Kinerja sebagai Dasar Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah

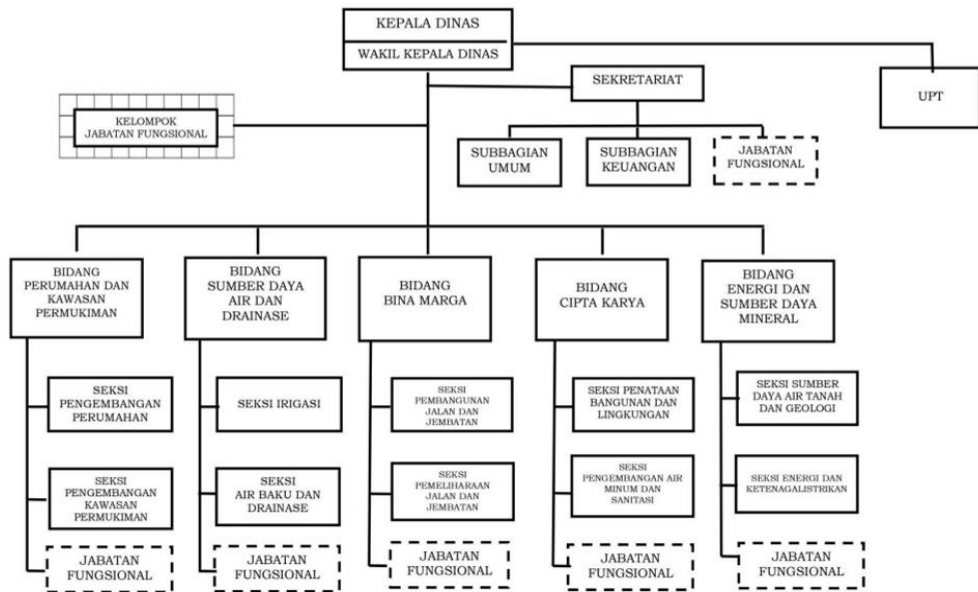
Selaras dengan paradigma Organisasi Berbasis Kinerja (*Performance Based Organization*) yang diterapkan Pemerintah Daerah DIY, setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dibentuk untuk memberikan kontribusi pada pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah DIY tahun 2023 – 2026. Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral DIY dibentuk dengan skema kinerja sebagai berikut:

Gambar I.1. Cascading Kinerja Dinas PUPESDM DIY





Gambar 1.2. Struktur Organisasi Dinas PUPESDM DIY



Sumber: Lampiran PERGUB DIY Nomor 98 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral DIY

1.2 Tugas, Fungsi dan Peta Jabatan

Dalam upaya mewujudkan kinerja sebagaimana telah dimandatkan dalam RPD Tahun 2023 - 2026 Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral DIY memiliki tugas dan fungsi yang kemudian menjadi dasar penempatan personil dalam jabatan sebagaimana gambar berikut:

Berdasarkan Peraturan PERGUB DIY Nomor 98 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral DIY mempunyai tugas melaksanakan fungsi pendukung perumusan kebijakan strategis bidang organisasi. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral DIY mempunyai fungsi:

1. penyusunan program kerja Dinas;
2. perumusan kebijakan teknis urusan pekerjaan umum, perumahan dan kawasan permukiman, serta energi sumber daya mineral;
3. penyiapan bahan dan pembinaan urusan pekerjaan umum, perumahan dan kawasan permukiman, serta energi sumber daya mineral;
4. pengembangan dan pengelolaan urusan pekerjaan umum, perumahan dan kawasan permukiman, serta energi sumber daya mineral;
5. pengawasan dan pengendalian urusan pekerjaan umum, perumahan dan kawasan permukiman, serta energi sumber daya mineral;
6. fasilitasi pembinaan standar pelayanan minimal urusan pekerjaan umum dan penataan ruang serta urusan perumahan rakyat dan kawasan permukiman.
7. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi pembinaan urusan di bidang pekerjaan umum dan perumahan serta Kawasan permukiman yang menjadi kewenangan Kabupaten/ Kota;
8. pemberdayaan sumber daya dan mitra kerja urusan di bidang pekerjaan umum, perumahan dan Kawasan permukiman, serta energi sumber daya mineral;
9. pelaksanaan pelayanan umum urusan pekerjaan umum, perumahan dan kawasan permukiman, serta energi sumber daya mineral;
10. fasilitasi pembinaan standar pelayanan minimal urusan pekerjaan umum dan penataan ruang serta urusan perumahan rakyat dan kawasan permukiman.
11. pelaksanaan kegiatan kesekretariatan;
12. pelaksanaan dekonsentrasi dan tugas pembantuan;
13. fasilitasi pembinaan reformasi birokrasi Dinas;
14. fasilitasi penyusunan kebijakan proses bisnis Dinas;
15. pengembangan teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi dalam Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik lingkup Dinas;
16. pemantauan, pengevaluasian, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan bidang pekerjaan umum, perumahan dan kawasan permukiman serta energi sumber daya mineral.
17. penyusunan laporan pelaksanaan tugas Dinas; dan
18. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan fungsi dan tugas Dinas

Tabel I.1. Jabatan Struktural dan Jabatan Pelaksana Dinas PUPESDM DIY Berdasarkan Pergub DIY Nomor 15 Tahun 2021 dan Pergub DIY Nomor 98 Tahun 2022

Sesuai Pelaksanaan tugas fungsi Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral DIY dibagi habis ke dalam jabatan struktural dan jabatan pelaksana berdasarkan Pergub DIY Nomor 15 tahun 2021 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Pergub DIY Nomor 48 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Pergub DIY Nomor 15 Tahun 2021 Tentang Kualifikasi Jabatan Pimpinan Tinggi dan Jabatan Administrasi di Lingkungan Pemerintah Daerah DIY, serta Peraturan Gubernur DIY Nomor 98 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral DIY, fungsi Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral DIY dibagi habis ke dalam jabatan struktural dan pelaksana dengan komposisi sebagai berikut:

Jabatan Struktural/Fungsional	Jabatan Pelaksana
<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala Dinas 2. Wakil Kepala Dinas 3. Sekretaris: <ol style="list-style-type: none"> 1) Kasubbag Umum 2) Kasubbag Keuangan 4. Kepala Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman: <ol style="list-style-type: none"> 1) Kepala Seksi Pengembangan Perumahan 2) Kepala Seksi Pengembangan Kawasan Permukiman 5. Kepala Bidang Sumber Daya Air dan Drainase: <ol style="list-style-type: none"> 1) Kepala Seksi Irigasi 2) Kepala Seksi Air Baku dan Drainase 6. Kepala Bidang Bina Marga: <ol style="list-style-type: none"> 1) Kepala Seksi Pembangunan Jalan dan Jembatan 2) Kepala Seksi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan 7. Kepala Bidang Cipta Karya: <ol style="list-style-type: none"> 1) Kepala Seksi Penataan Bangunan dan Lingkungan 2) Kepala Seksi Pengembangan Air Minum dan Sanitasi 8. Kepala Bidang ESDM <ol style="list-style-type: none"> 1) Kepala Seksi Sumber Daya Air Tanah dan Geologi 2) Kepala Seksi Energi dan Ketenagalistrikan 9. Kepala Balai Pengembangan Jasa Konstruksi <ol style="list-style-type: none"> 1) Kepala Subbagian Tata Usaha 2) Kepala Seksi Pengujian 3) Kepala Seksi Pengelolaan Jasa Konstruksi 10. Kepala Balai Pengelolaan Infrastruktur Air Limbah dan Air Minum Perkotaan <ol style="list-style-type: none"> 1) Kepala Subbagian Tata Usaha 2) Kepala Seksi Operasi dan Pemeliharaan Jaringan dan Sistem Pengolahan Air Limbah 3) Kepala Seksi Operasi dan Pemeliharaan Sistem Jaringan Air Minum Perkotaan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dibawah sekretariat: <ol style="list-style-type: none"> 1) Perencana Muda 2) Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan 3) Analis Sistem Informasi 4) Pranata Komputer Ahli Pertama 2. Dibawah Kasubbag Keuangan: <ol style="list-style-type: none"> 1) Bendahara 2) Pengadministrasi Keuangan 3) Pengelola Gaji 4) Pengelola Akuntansi 5) Verifikator Data Laporan Keuangan 3. Dibawah Kasubbag Umum: <ol style="list-style-type: none"> 1) Pengadministrasi Umum 2) Pengadministrasi Persuratan 3) Pranata Kearsipan 4) Analis Sumber Daya Manusia Aparatur 5) Teknisi Sarana dan Prasarana 6) Kustodian Barang Milik Negara 4. Dibawah Kasi Pengembangan Perumahan: <ol style="list-style-type: none"> 1) Pengadministrasi Umum 2) Analis Perumahan 5. Dibawah Kasi Pengembangan Kawasan Permukiman: <ol style="list-style-type: none"> 1) Analis Penataan Kawasan 6. Dibawah Kasi Pengembangan dan Rehabilitasi Sarana Prasarana Sumber Daya Air dan Drainase: <ol style="list-style-type: none"> 1) Pengadministrasi Umum 2) Analis Pengelolaan Sumber Daya Air 7. Dibawah Kasi Operasi dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Sumber Daya Air dan Drainase: <ol style="list-style-type: none"> 1) Pengamat Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air 8. Dibawah Kasi Pembangunan Jalan dan Jembatan: <ol style="list-style-type: none"> 1) Pengadministrasi Umum 2) Analis Jalan Jembatan 9. Dibawah Kasi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan <ol style="list-style-type: none"> 1) Pemeriksa Jalan dan Jembatan 10. Dibawah Kasi Penataan Bangunan dan Permukiman <ol style="list-style-type: none"> 1) Pengadministrasi Umum 2) Penata Bangunan Gedung dan Permukiman 11. Dibawah Kasi Pengembangan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan Permukiman: <ol style="list-style-type: none"> 1) Penata Penyehatan Lingkungan Permukiman

Jabatan Struktural/Fungsional	Jabatan Pelaksana
11. Kepala Balai Pengawasan dan Pengendalian Perizinan Energi Sumber Daya Mineral Wilayah Sleman, Yogyakarta dan Gunungkidul 1) Kepala Subbagian Tata Usaha 2) Kepala Seksi Pengawasan dan Pengendalian Energi dan Geologi 3) Kepala Seksi Pengawasan dan Pengendalian Sumber Daya Mineral	12. Dibawah Kasi Sumber Daya Air Tanah dan Geologi: 1) Pengadministrasi Umum 2) Analis Potensi Sumber Air Tanah 13. Dibawah Kasi Energi dan Ketenagalistrikan: 1) Analis Pengembangan Energi 14. Dibawah Kasi Pertambangan Miineral / Bidang ESDM: 1) Analis Pertambangan 15. Dibawah Kasubbag Tata Usaha 1) Pengadministrasi Persuratan 2) Pranata Kearsipan 3) Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan 4) Analis Sumber Daya Manusia Aparatur 5) Kustodian Barang Milik Negara 6) Bendahara 7) Pengadministrasi Keuangan 8) Pengelola Gaji 9) Pengelola Akuntansi 10) Verifikator dan Laporan Keuangan 11) Teknisi Sarana dan Prasarana 16. Dibawah Kasi Pengujian 1) Penguji Bahan dan Bangunan 2) Penguji Laboratorium Tanah, Aspal dan Beton 17. Dibawah Kasi Pengelolaan Jasa Konstruksi 1) Penelaah Mutu Konstruksi 18. Dibawah Kasi Operasi dan Pemeliharaan Jaringan dan Sistem Pengolahan Air Limbah 1) Pengelola Limbah 2) Pengawas Jaringan Utilitas 19. Dibawah Kasi Operasi dan Pemeliharaan Sistem Jaringan Air Minum Perkotaan 1) Pengawas Jaringan Utilitas 20. Dibawah Kasi Pengawasan dan Pengendalian Energi dan Geologi 1) Analis Pengawasan Eksplorasi dan Eksploitasi 21. Dibawah Kasi Pengawasan dan Pengendalian Sumber Daya Mineral 1) Analis Pengawasan Eksplorasi dan Eksploitasi.

1.3 Isu-Isu Strategis

Berdasarkan RPJMN, Pembangunan infrastruktur periode 2020-2024 berfokus pada tiga kerangka utama, yaitu Infrastruktur Pelayanan Dasar, Infrastruktur Ekonomi, dan Infrastruktur Perkotaan. Kerangka utama tersebut didukung oleh pembangunan energi dan ketenagalistrikan serta pelaksanaan transformasi digital. Pembangunan infrastruktur untuk pelayanan dasar diarahkan untuk mewujudkan pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Indonesia. Infrastruktur layanan dasar yang akan dibangun mencakup penyediaan akses perumahan dan permukiman layak, aman dan terjangkau, penyediaan akses air minum dan sanitasi (air limbah dan sampah), pengelolaan air tanah dan air baku berkelanjutan,

keselamatan dan keamanan transportasi, ketahanan kebencanaan infrastruktur, serta waduk multiguna dan modernisasi irigasi.

Isu strategis atau permasalahan prioritas yang akan ditangani OPD dalam pembangunan jangka menengah daerah selama lima tahun mendatang melalui Perubahan Renstra Perangkat Daerah Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral DIY adalah :

1. Keterbatasan akses perumahan dan permukiman yang layak, aman, dan terjangkau.

D.I Yogyakarta diamanatkan Penyediaan akses bagi rumah tangga untuk menempati hunian layak menjadi 87,6% rumah tangga di dalam RPJMN.

2. Belum optimalnya peningkatan akses air minum layak dan aman.

Tantangan penyediaan air minum antara lain masih lemahnya tata kelola dan kelembagaan penyelenggaraan air minum serta rendahnya komitmen dan kapasitas pemerintah daerah sebagai penyelenggara utama dari Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM). Target RPJMN akses air minum layak sebesar 100% di DI Yogyakarta. Dalam rangka pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, selain dukungan pembiayaan dari pemerintah perlu dirumuskan kebijakan yang menyeimbangkan penyediaan air minum sebagai hak dasar (domestik) dan non domestik. Diharapkan dari pelanggan non domestik dapat meningkatkan minat investasi dari badan usaha serta layanan kepada pelanggan domestik.

3. Belum optimalnya peningkatan akses layanan sanitasi layak dan aman

Persentase perilaku Buang Air Besar Sembarangan (BABS) di tempat terbuka masih cukup tinggi (9,36 persen atau setara 25 juta jiwa) dan menyebabkan Indonesia berada di peringkat 3 dunia untuk angka BABS di tempat terbuka. Sementara itu, operasionalisasi Instalasi Pengolahan Air Limbah Skala Kota belum optimal yang ditandai dengan masih terdapat 36,3 persen kapasitas yang masih IPAL dapat dimanfaatkan. Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) setempat juga menghadapi tantangan yang sama, yang salah satunya terlihat dari rendahnya jumlah Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) yang beroperasi secara optimal. Indikator persentase rumah tangga yang memiliki akses sanitasi layak secara nasional sudah mencapai 74,58 persen dengan provinsi tertinggi

adalah Provinsi DI Yogyakarta. Didalam RPJMN mengamanatkan Penyediaan akses sanitasi untuk mencapai target 2024 sebesar 95% di D.I. Yogyakarta dan akses penanganan sampah sebesar 83%.

4. Pengelolaan Air Tanah dan Air Baku Berkelanjutan Masih Terbatas

Di sisi lain, belum meratanya distribusi air menyebabkan tingginya tingkat ketergantungan atas air tanah di beberapa wilayah. Ekstraksi air tanah memiliki porsi sebesar 46 persen dari pemenuhan kebutuhan air domestik. Penggunaan air tanah di beberapa wilayah perlu diperhatikan.

5. Konektivitas Jalan

Ketersediaan jaringan jalan yang ada belum memadai dalam mendukung pengembangan wilayah, baik untuk mendukung pertumbuhan ekonomi maupun pemerataan pembangunan. Kurangnya ketersediaan jalan pada jalur logistik terlihat dari kinerja waktu tempuh pada jalan lintas utama pulau yang baru mencapai 2,3 jam per 100 km

6. Energi dan Ketenagalistrikan Perkotaan

Peningkatan kebutuhan listrik perkotaan tidak diiringi dengan diversifikasi sumber penyediaan listrik sehingga berpotensi semakin menurunkan mutu lingkungan mengingat sebagian besar pembangkit listrik masih menggunakan sumber energi fosil.

7. Sustainable Development Goals (SDG's)

Pemerintah Indonesia berkomitmen dalam mencapai target dan indikator SDGs melalui pengintegrasian target tersebut dalam dokumen perencanaan pembangunan nasional. Pembangunan infrastruktur berkontribusi dalam pencapaian Tujuan 2 “Tanpa Kelaparan” melalui pembangunan waduk multiguna dan modernisasi irigasi. Tujuan 6 “Air Bersih dan Sanitasi Layak” diwujudkan dengan pengembangan sistem penyediaan air minum dan pembangunan prasarana sanitasi. Kemudian, Tujuan 7 “Energi Bersih dan Terjangkau” diwujudkan dengan pembangunan prasarana energi dan ketenagalistrikan yang berkelanjutan. Tujuan 9 “Industri, Inovasi dan Infrastruktur” dan Tujuan 11 “Kota dan Permukiman yang Berkelanjutan” diwujudkan dengan penyediaan perumahan dan permukiman, serta pengembangan konektivitas dan transportasi umum massal Di antara tujuan SDGs terdapat 3 (tiga) *Global Goals* Tujuan Global

yang berkaitan langsung dengan pembangunan infrastruktur Pelayanan Urusan Pekerjaan Umum dan Penyelenggaraan Urusan Bidang Energi Sumber Daya Mineral di DIY, yaitu TBP 6 yakni menjamin ketersediaan dan pengelolaan berkelanjutan air dan sanitasi bagi semua, yang terdiri dari 6 indikator utama; TBP 6 yakni Energi Bersih dan Terjangkau dan TBP 11 yaitu mewujudkan perkotaan dan kawasan permukiman yang inklusif, aman, berketahanan, dan berkelanjutan, yang terdiri dari 7 indikator utama.

1.4 Dukungan SDM, Sarana-Prasarana dan Anggaran

Dukungan sumberdaya manusia, sarana-prasarana dan anggaran pada tahun 2023 sebagaimana tabel berikut:

Tabel I.2 Jumlah Pegawai Menurut Kualifikasi Jabatan, Jenis Kelamin dan Kompetensi

No	Jabatan	Formasi					Pegawai yang ada										Jenis Kelamin		
		Jml	Kualifikasi				Jml	Kualifikasi										La ki	Per emp
1	2	3	4				5	6										7	8
			S2	S1	D3	SM A		S2	S1	D 4	D3	D 1	SM A	S MP	SD				
A	Jabatan Pimpinan Tinggi	2	2				1	1									1		
B	Jabatan Administrasi																		
	1. Administrator	10	10				8	4	4							4	4		
	2. Pengawas	24		24			20	10	10							13	7		
	3. Pelaksana	23		16	66	1	16	12	63		12		76	4	2	14	27		
	3. Pelaksana	3		6			9									2			
C	Jabatan Fungsional	50		34	16		31	4	18	2	7					18	13		
	Jumlah	31	12	22	82	1	22	31	95	2	19		76	4	2	17	52		
		9		4			9									7			

Sumber : Data Kepegawaian Dinas PUPESDM DIY, Desember 2023

Berdasarkan data pada tabel I.3, Jumlah pegawai di Dinas PUPESDM DIY sejumlah 229 orang terdiri dari Dinas 134 orang, Balai PIALAM 30 orang, Balai PJK 27 orang, Balai P3ESDM Wilayah Kulon Progo dan Bantul 20 orang, Balai P3ESDM Wilayah Sleman, Yogyakarta, dan Gunung Kidul 18 orang. Tingkat pendidikan SDM Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral DIY tidak merata antara laki-laki dan perempuan, didominasi oleh jenjang pendidikan S1 sebanyak 95 orang (41,48%), disusul oleh jenjang pendidikan SMA sebanyak 76 orang (33,19%), S2 sebanyak 31 orang (13,54%), D3 sebanyak 19 orang (8,30%), SMP

sebanyak 4 orang (1,75%), D4 sebanyak 2 orang (0,87%) dan SD sebanyak 2 orang (0,87%). Komposisi pegawai laki-laki (77,29%) lebih banyak dibanding pegawai perempuan (22,71%), sehingga masih terdapat kekurangan pegawai 90 orang.

Tabel I.3 Sarana-Prasarana

No	Klasifikasi	Jumlah Barang	Nilai Aset (Rp)*
1	Aset Tetap Tanah	2.131 unit	2.611.784.468.700,00
2	Peralatan dan Mesin	7.160 unit	65.744.742.175,36
3	Gedung dan Bangunan	1.193 unit	48.703.939.847,78
4	Jalan, Jaringan, dan Irigasi	892 unit	4.172.904.224.395,51
5	Aset Tetap Lainnya (Bahan Perpustakaan, Barang bercorak kesenian/ kebudayaan/ olahraga, Hewan, Biota Perairan, Tanaman)	929 unit	40.105.296.816,00
6	Konstruksi dalam pengerjaan	94 unit	27.278.686.011,00
Jumlah			6.966.521.357.945,65

*Nilai aset belum memperhitungkan penyusutan di tahun 2023

Sumber : Dinas PUPESDM 2023

Kendaraan Dinas PUPESDM DIY sejumlah 90 unit kendaraan operasional, Untuk Dinas terdiri dari 4 unit kendaraan roda 6, 24 unit kendaraan roda 4, 49 unit kendaraan roda 2, Balai PIALAM 3 unit kendaraan roda 6, 1 unit kendaraan roda 4, 3 unit kendaraan roda 3, 2 unit kendaraan roda 2, dan Balai PJK 1 unit kendaraan roda 6, 2 unit kendaraan roda 4, 1 unit kendaraan roda 2. Kebutuhan ruangan kantor umum relatif sudah tersedia meliputi ruang rapat, ruang pengelola keuangan, ruang arsip, ruang mushola, ruang baca/perpustakaan, ruang gudang, ruang tunggu, ruang laktasi dan toilet. Adapun perlengkapan kantor berupa meja, kursi, lemari, filling kabinet, pendingin ruangan, alat pemadam kebakaran dan lain-lain sudah tersedia dalam kondisi baik.

Tabel I.4 Anggaran Tahun 2023

Kode		Uraian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
Rekening	(Rp)		(Rp)	(Rp)	
4		PENDAPATAN DAERAH	1.380.044.300	1.487.124.000	107.079.700
4	1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1.380.044.300	1.487.124.000	107.079.700
4	1 2	Retribusi Daerah	1.341.307.400	1.447.768.600	106.461.200
4	1 4	Lain-lain PAD yang Sah	38.736.900	39.355.400	618.500
		Jumlah Pendapatan	1.380.044.300	1.487.124.000	107.079.700

Kode		Uraian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang	
Rekening			(Rp)	(Rp)	(Rp)	
5		BELANJA DAERAH	551.600.894.125	552.139.114.376	538.220.251	
5	1	BELANJA OPERASI	262.199.511.875	268.940.947.776	6.741.435.901	
5	1	1	Belanja Pegawai	39.661.376.675	39.415.969.539	(245.407.136)
5	1	2	Belanja Barang dan Jasa	74.776.097.200	77.763.370.937	2.987.273.737
5	1	4	Belanja Subsidi	5.241.600.000	5.241.600.000	0
5	1	5	Belanja Hibah	118.971.763.000	119.350.183.300	378.420.300
5	1	6	Belanja Bantuan Sosial	23.548.675.000	27.169.824.000	3.621.149.000
5	2	BELANJA MODAL	289.401.382.250	283.198.166.600	(6.203.215.650)	
5	2	1	Belanja Modal Tanah	51.519.411.800	43.024.624.900	(8.494.786.900)
5	2	2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	432.214.900	420.408.000	(11.806.900)
5	2	3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	6.903.199.250	6.902.999.250	(200.000)
5	2	4	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	230.537.555.000	232.841.133.150	2.303.578.150
5	2	5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	9.001.300	9.001.300	0
Jumlah Belanja			551.600.894.125	552.139.114.376	538.220.251	
Total Surplus/(Defisit)			(550.220.849.825)	(550.651.990.376)	(431.140.551)	
6		PEMBIAYAAN DAERAH	0	0	0	
Jumlah Penerimaan Pembiayaan			0	0	0	
Jumlah Pengeluaran Pembiayaan			0	0	0	
Pembiayaan Neto			0	0	0	

Sumber : Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Dinas PUPESDM DIY Tahun 2023

Dukungan anggaran untuk melaksanakan tugas dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral DIY berasal dari APBD Daerah Istimewa Yogyakarta dan Dana Keistimewaan. Terlihat pada tabel I.5, untuk tahun 2023 Anggaran Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral DIY semula Rp 551.600.894.125,00 dan mengalami perubahan menjadi Rp 552.139.114.376,00 atau bertambah Rp 538.220.251,00. Perubahan anggaran Tahun 2023 merupakan bagian dari pencermatan kebutuhan dan realisasi pada tahun berjalan untuk menunjang pencapaian indikator OPD.

1.5 Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi SAKIP 2022

No	Saran/Rekomendasi	Tindak lanjut
1.	Menerapkan manajemen kinerja berkelanjutan meliputi perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja dan evaluasi atas kinerja internal sehingga praktik baik budaya kinerja yang telah dilakukan dapat dipertahankan bahkan ditingkatkan	Upaya yang dilakukan untuk menerapkan manajemen kinerja berkelanjutan meliputi perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja dan evaluasi atas kinerja internal sehingga praktik baik budaya kinerja yang telah dilakukan dapat dipertahankan bahkan ditingkatkan adalah dengan melakukan perencanaan pengukuran, pelaporan dan evaluasi kinerja secara terintegrasi dan berjenjang, sehingga manajemen kinerja berkelanjutan dapat terlaksana dengan baik.
2	Meningkatkan koordinasi internal serta kolaborasi dengan perangkat daerah terkait dalam rangka pencapaian indicator sasaran Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumberdaya Mineral.	Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan koordinasi internal adalah dengan melakukan apel pagi dan dilanjutkan dengan rapat pimpinan setiap satu minggu sekali pada hari senin. Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kolaborasi dengan perangkat daerah terkait dalam rangka pencapaian indikator sasaran Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumberdaya Mineral adalah melakukan forum ke-PU-an yang dihadiri oleh kepala Dinas PU seluruh kab/kota, Dewan Sumber Daya Air, Tim RP3KP, Tim Terpadu ESDM dan instansi vertikal yang mempunyai pekerjaan yang mendukung capaian kinerja.

BAB 2

Perencanaan dan Perjanjian Kinerja

Bab II berisi:

1. Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja OPD
2. Strategi dan Arah Kebijakan
3. Struktur Program dan Kegiatan Tahun 2023
4. Perjanjian Kinerja Tahun 2023
5. Instrumen Pendukung Capaian Kinerja OPD

Tahun 2023 merupakan tahun pelaksanaan dokumen Rencana Pembangunan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2023 -2026 sebagaimana tertuang dalam Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Daerah

Istimewa Yogyakarta Tahun 2023-2026. Penyusunan dokumen Rencana Pembangunan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan amanat dari Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2022.

Perencanaan dan penganggaran pada tahun 2023 diwarnai agenda perubahan baik melalui mekanisme perubahan dana keistimewaan maupun perubahan APBD. Hal ini kemudian ditindaklanjuti dengan menyusun reviu/perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2023. Pada dasarnya perubahan anggaran tidak mengubah target kinerja pada level sasaran Perangkat Daerah dan program Perangkat daerah, namun mengubah pada tataran target kinerja output dalam sub kegiatan. Perubahan anggaran dilakukan sebagai bentuk konsolidasi fiskal dengan mengedepankan pencapaian target kinerja Perangkat Daerah. Meskipun demikian, sebagai jajaran Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah DIY, Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral DIY tetap mengupayakan optimalisasi capaian target kinerja sebagaimana tertuang dalam RPD DIY Tahun 2023-2026.

Renstra Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral DIY yang merupakan penjabaran operasional RPD DIY Tahun 2023-2026 telah mengakomodasi dinamika program/kegiatan selama kurun waktu 2023. Renstra

ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 8 Tahun 2022 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2023-2026.

2.1 Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja OPD

Sesuai *cascade* kinerja, Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral DIY mendukung pencapaian sasaran Pemerintah Daerah Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas dan Berkelanjutan dan sasaran meningkatnya kapasitas tata kelola pemerintahan. Terkait hal tersebut tujuan jangka menengah Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral DIY selama lima tahun adalah :

- a. Urusan Pekerjaan Umum
 1. Meningkatnya jumlah penduduk yang memiliki akses terhadap pemenuhan kebutuhan dasar sesuai dengan SPM.
 2. Penyediaan infrastruktur sumber daya air.
 3. Meningkatkan konektivitas antar wilayah di DIY.
 4. Meningkatkan kualitas jasa konstruksi.
- b. Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman
 1. Meningkatkan ketersediaan rumah layak huni.
- c. Urusan Energi Sumber Daya Mineral
 1. Meningkatkan cakupan pelayanan energi.
 2. Meningkatkan kegiatan pengusahaan air tanah dan pertambangan yang sesuai dengan rencana tata ruang.

Adapun sasaran Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral DIY dalam waktu lima tahun sebagai berikut:

Tabel II.1 Sasaran Strategis Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral DIY 2023-2026

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATU AN	Baseline 2021	TARGET TAHUNAN					Target Akhir Renstra
					2022	2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Penduduk Berakses Air Minum	Prosentase Rumah Tangga yang menempati hunian dengan akses air minum layak	%	92,92	94,14	95,28	95,8	96,48	97,15	97,15

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATU AN	Baseline 2021	TARGET TAHUNAN					Target Akhir Renstra
					2022	2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.	Penduduk Berakses Sanitasi	Presentase Rumah Tangga yang menempati hunian dengan akses sanitasi (air limbah domestik) layak dan aman	%	96,18	94,25	94,9	96,07	96,54	97,23	97,23
3	Penyediaan infrastruktur sumber daya air	Presentase penyediaan infrastruktur sumber daya air sebagai layanan air baku	%	N/A	46,38	70,53	80,19	89,86	100	100
4	Peningkatan aksesibilitas Jalan	Peningkatan aksesibilitas Jalan	%	98,87	97,24	97,80	98,76	99,22	100	100
5	Peningkatan kinerja jasa konstruksi	Peningkatan kinerja jasa konstruksi	%	N/A	99,57	57,12	71,41	85,71	100	100
6	Rumah Tangga yang menempati hunian layak huni dan terjangkau	Persentase rumah tangga yang menempati tempat tinggal	%	97,75	95,65	96,12	96,59	97,05	97,53	97,53
7	Meningkatnya rumah tangga berakses listrik	Presentase Rumah Tangga berakses listrik	%	99,99	99,99	99,99	99,99	99,99	99,99	99,99
8	Meningkatnya kesesuaian izin perusahaan air tanah dan pertambangan terhadap rencana tata ruang	Kesesuaian izin perusahaan air tanah dan pertambangan terhadap rencana tata ruang	%	N/A	23,85	40,31	46,15	52,00	57,85	57,85
9	Meningkatnya Tata Kelola Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Perangkat Daerah	Kategori Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Indeks	N/A	A	A	A	A	A	A

Sumber : Renstra 2023 – 2026 DPUPESDM DIY

2.2 Strategi dan Arah Kebijakan

Strategi dan kebijakan untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah, diuraikan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel II.2 Strategi dan Arah Kebijakan

Tujuan OPD	Sasaran OPD	Strategi OPD	Arah Kebijakan OPD
VISI : Terwujudnya Peningkatan Kemuliaan Martabat Manusia Jogja			
MISI 1 : Meningkatkan Kualitas Hidup, Kehidupan Dan Penghidupan Masyarakat Yang Berkeadilan Dan Berkeadaban			
1 Mewujudkan pelaksanaan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum, perumahan dan kawasan permukiman serta urusan bidang energi dan sumber daya mineral	1 Penduduk Berakses Sanitasi	1 Pengembangan sistem dan pengelolaan persampahan regional	1 Meningkatkan rumah tangga yang sampahnya terlayani (baik melalui penanganan maupun pengurangan) di TPA Regional
		2 Pengelolaan Air Limbah Domestik untuk mempertahankan Kualitas Sesuai Ketentuan Baku Mutu Lingkungan	1 Parameter BOD dalam Efluent hasil pengolahan air limbah domestik < 75
		3 Peningkatan kontribusi bagi warga negara terhadap akses sanitasi	1 warga negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik regional
		4 Pengelolaan dan pengembangan sistem drainase	1 Pengurangan genangan di kawasan perkotaan dan strategis DIY
	2 Penduduk Berakses Air Minum	1 Pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum	1 Meningkatkan jumlah warga negara yang memperoleh air curah regional
			2 Pengawasan dan Pemantauan Kualitas Air Curah Sesuai Ketentuan Baku Mutu Lingkungan
	3 Penyediaan infrastruktur sumber daya air	1 Penambahan dan Pengelolaan Air Baku	1 Meningkatnya ketersediaan air melalui infrastruktur sumber daya air
			2 Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Kewenangan DIY

Tujuan OPD	Sasaran OPD	Strategi OPD	Arah Kebijakan OPD
	4 Peningkatan aksesibilitas Jalan	1 Kondisi jalan provinsi mantap	1 Dukungan Penambahan, peningkatan dan mempertahankan kondisi jalan melalui penyelenggaraan jalan untuk mempertahankan jalan provinsi dan kondisi mantap dan menambah panjang jalan jaringan baru
		2 Peningkatan panjang jalan propinsi	1 Pembangunan jalan baru
	5 Rumah Tangga yang menempati hunian layak huni dan terjangkau	1 Penyediaan rumah bagi masyarakat yang terkena dampak bencana dan relokasi program pemerintah beserta PSU nya	Penanganan rumah terdampak bencana
		2 Peningkatan dan pembangunan Rumah swadaya menuju rumah layak huni	Penanganan rumah tidak layak huni
		3 Penyediaan perumahan	Pengembangan dan pemanfaatan lahan peruntukan permukiman
		4 Penanganan kawasan kumuh	Peningkatan kualitas kawasan kumuh kewenangan Pemda DIY
		5 Penyediaan PSU layak di kawasan permukiman	Jumlah lokasi yang ditingkatkan kualitas PSU Permukiman untuk mendukung fungsi permukiman
	6 Meningkatkan rumah tangga berakses listrik	1 Pengelolaan ketenagalistrikan	1 Peningkatan cakupan rumah tangga berlistrik
			2 Peningkatan pelaksanaan usaha ketenagalistrikan

Tujuan OPD	Sasaran OPD	Strategi OPD	Arah Kebijakan OPD
		2 Pengelolaan Energi terbarukan	1 Peningkatan penyediaan pemanfaatan energi
			2 Peningkatan pemanfaatan energi baru terbarukan
	7 Meningkatkan kesesuaian izin pengusahaan air tanah dan pertambangan terhadap rencana tata ruang	1 Mempertahankan rerata Muka Air Tanah pada Zona Aman	1 Konseervasi Sumber Daya Air Tanah melalui pengendalian rerata penurunan Muka Air Tanah < 20 %
		2 Meningkatkan pelaksanaan pengusahaan air tanah	1 Pengusahaan air tanah yang sesuai ketentuan
		3 Peningkatan pelaksanaan usaha pertambangan	1 Pelaksanaan usaha pertambangan sesuai kaidah pertambangan yang baik
		4 Meningkatkan perwujudan kawasan peruntukan pertambangan	1 Pengusahaan pertambangan pada kawasan peruntukan pertambangan
	8 Peningkatan kinerja jasa konstruksi	1 Peningkatan kinerja tenaga konstruksi dan masyarakat jasa konstruksi	Peningkatan jumlah tenaga kerja konstruksi terlatih
			Penyediaan dan pemutahiran data melalui sistem informasi pembina jasa konstruksi
		2 Sertifikat hasil uji	Penerbitan sertifikat hasil uji
		3 Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Bangunan Gedung negara dan penataan Bangunan	1 Menerbitkan rekomendasi analisis perkiraan biaya bangun gedung negara yang
			2 Pelayanan penyelenggaraan bangunan gedung negara

Tujuan OPD	Sasaran OPD	Strategi OPD	Arah Kebijakan OPD
			3 Penyelenggaraan kegiatan sosialisasi / bimbingan teknis penyelenggaraan bangunan gedung bagi OPD provinsi dan kota/kabupaten
2 Mewujudkan Tata Kelola Pemerintah yang baik	9 Meningkatnya Tata Kelola Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Di Perangkat Daerah	Rerata hasil ketercapaian pelaksanaan program	Output pelaksanaan program yang terukur

Sumber : Renstra 2023-2026 DPUPESDM DIY

2.3 Struktur Program dan Kegiatan 2023

Struktur program dan kegiatan yang berkaitan langsung dengan tercapainya sasaran Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral DIY tahun 2023 maupun program dan kegiatan pendukung sebagaimana tabel berikut:

Tabel II.3 Struktur Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan terkait Langsung Pencapaian Sasaran Tahun 2023

Sasaran	Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah/ Berkurang (Rp)
1. Penduduk berakses sanitasi	1 PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	93.660.000.000	81.734.001.800	(11.925.998.200)
	1.1 Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional	93.660.000.000	81.734.001.800	(11.925.998.200)
	1.1.1 Pembangunan TPA/TPST/SPA Kewenangan Provinsi	71.660.000.000	59.734.001.800	(11.925.998.200)
	1.1.2 Rehabilitasi TPA/TPST/SPA Kewenangan Provinsi	22.000.000.000	22.000.000.000	-
	2 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	12.753.199.250	12.753.199.250	-
	2.1 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Regional	12.753.199.250	12.753.199.250	-
	2.1.1 Rehabilitasi/Peningkatan/Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Regional	5.753.199.250	5.753.199.250	-

Sasaran	Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah/ Berkurang (Rp)
	2.1.2 Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	7.000.000.000	7.000.000.000	-
	3 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	453.014.300	453.014.300	-
	3.1 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan Kawasan Strategis Provinsi	453.014.300	453.014.300	-
	3.1.1 Penyediaan Drainase Perkotaan dan Sarana Pendukungnya	200.000.000	200.000.000	-
	3.1.2 Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase	253.014.300	253.014.300	-
	Total Nilai Anggaran Yang Mendukung Sasaran 1	106.866.213.550	94.940.215.350	(11.925.998.200)
2. Penduduk berakses air minum	1 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	5.541.600.000	5.536.452.796	(5.147.204)
	1.1 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota	5.541.600.000	5.536.452.796	(5.147.204)
	1.1.1 Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM	200.000.000	198.571.500	(1.428.500)
	1.1.2 Operasi dan Pemeliharaan SPAM Lintas Kabupaten/Kota	5.341.600.000	5.337.881.296	(3.718.704)
	Total Nilai Anggaran Yang Mendukung Sasaran 2	5.541.600.000	5.536.452.796	(5.147.204)
3. Penyediaan infrastruktur sumber daya air	1 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	30.740.688.000	34.731.563.333	3.990.875.333
	1.1 Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota	6.111.300.000	6.752.741.800	641.441.800
	1.1.1 Pembangunan Sumur Air Tanah untuk Air Baku	625.000.000	625.000.000	-
	1.1.2 Operasi dan Pemeliharaan Embung dan Penampung Air Lainnya	3.455.800.000	4.097.241.800	641.441.800
	1.1.3 Pengelolaan Hidrologi dan Kualitas Air WS Kewenangan Provinsi	1.491.500.000	1.491.500.000	-

Sasaran	Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah/ Berkurang (Rp)
	1.1.4 Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Provinsi	500.000.000	500.000.000	-
	1.1.5 Evaluasi dan Rekomendasi Teknis (Rekomtek) Pemanfaatan SDA WS Kewenangan Provinsi	39.000.000	39.000.000	-
	1.2 Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha-3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota	24.629.388.000	27.978.821.533	3.349.433.533
	1.2.1 Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan	3.186.500.000	3.386.500.000	200.000.000
	1.2.2 Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	8.825.001.000	8.825.001.000	-
	1.2.3 Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	10.588.259.800	13.737.693.333	3.149.433.533
	1.2.4 Operasi dan Pemeliharaan Bendung Irigasi	1.523.929.200	1.523.929.200	-
	1.2.5 Pengelolaan dan Pengawasan Alokasi Air Irigasi	505.698.000	505.698.000	-
	Total Nilai Anggaran Yang Mendukung Sasaran 3	30.740.688.000	34.731.563.333	3.990.875.333
4. Peningkatan aksesibilitas Jalan	1 PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	74.726.032.350	82.884.910.340	8.158.877.990
	1.1 Penyelenggaraan Jalan Provinsi	74.726.032.350	82.884.910.340	8.158.877.990
	1.1.1 Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	30.000.000	30.000.000	-
	1.1.2 Survey Kondisi Jalan/Jembatan	800.000.000	723.614.700	(76.385.300)
	1.1.3 Rehabilitasi Jalan	52.063.863.000	60.299.126.290	8.235.263.290

Sasaran	Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah/ Berkurang (Rp)
	1.1.4 Pemeliharaan Rutin Jalan	19.685.065.800	19.685.065.800	-
	1.1.5 Pemeliharaan Rutin Jembatan	2.147.103.550	2.147.103.550	-
	2 PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN TATA RUANG	138.945.049.800	135.068.583.160	(3.876.466.640)
	2.1 Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten	138.945.049.800	135.068.583.160	(3.876.466.640)
	2.1.1 Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu Filosofis	3.115.000.000	2.468.618.010	(646.381.990)
	2.1.2 Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Pantai Selatan	1.080.000.000	3.630.291.000	2.550.291.000
	2.1.3 Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Karst Gunung Sewu	130.930.449.800	125.479.681.700	(5.450.768.100)
	2.1.4 Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Perbukitan Menoreh	3.469.600.000	3.200.969.800	(268.630.200)
	2.1.5 Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kawasan Candi Prambanan-Candi Ijo	350.000.000	289.022.650	(60.977.350)
	Total Nilai Anggaran Yang Mendukung Sasaran 4	213.671.082.150	217.953.493.500	4.282.411.350
5. Peningkatan kinerja jasa konstruksi	1 PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	314.713.400	314.713.400	-
	1.1 Penetapan dan Penyelenggaraan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi	314.713.400	314.713.400	-
	1.1.1 Bantuan Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara untuk Kepentingan Strategis Provinsi	314.713.400	314.713.400	-
	2 PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	1.318.000.000	1.323.000.000	5.000.000
	2.1 Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi	1.069.000.000	1.074.000.000	5.000.000
	2.1.1 Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi	70.000.000	70.000.000	-
	2.1.2 Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Konstruksi	999.000.000	1.004.000.000	5.000.000

Sasaran	Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah/ Berkurang (Rp)
	2.2 Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi (SIPJAKI) Cakupan Daerah Provinsi	249.000.000	249.000.000	-
	2.2.1 Penyediaan Data dan Informasi Jasa Konstruksi	249.000.000	249.000.000	-
	Total Nilai Anggaran Yang Mendukung Sasaran 5	1.632.713.400	1.637.713.400	5.000.000
6. Rumah Tangga yang menempati hunian layak huni dan terjangkau	1 PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	499.500.000	498.994.000	(506.000)
	1.1 Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	150.000.000	149.494.000	(506.000)
	1.1.1 Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana atau Terkena Relokasi Program Provinsi	100.000.000	99.494.000	(506.000)
	1.1.2 Pendataan dan Verifikasi Penerima Rumah bagi Korban Bencana Alam atau Terkena Relokasi Program Provinsi	50.000.000	50.000.000	-
	2.1 Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	349.500.000	349.500.000	-
	2.1.1 Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana	349.500.000	349.500.000	-
	2 PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	18.355.000.000	22.263.600.000	3.908.600.000
	2.1 Penataan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	315.000.000	315.000.000	-
	2.1.1 Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman	315.000.000	315.000.000	-
	2.2 Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	18.040.000.000	21.948.600.000	3.908.600.000
2.2.1 Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni dalam Kawasan Permukiman dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	18.040.000.000	21.948.600.000	3.908.600.000	

Sasaran	Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah/ Berkurang (Rp)
	3 PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	96.600.000.000	96.549.730.400	(50.269.600)
	3.1 Urusan Penyelenggaraan PSU Permukiman	96.600.000.000	96.549.730.400	(50.269.600)
	3.1.1 Perencanaan Penyediaan PSU Permukiman	500.000.000	449.730.400	(50.269.600)
	3.1.2 Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman	96.100.000.000	96.100.000.000	-
	4 PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	21.595.860.000	24.134.475.350	2.538.615.350
	4.1 Sarana Prasarana Keistimewaan Urusan Kebudayaan	11.690.860.000	11.762.598.800	71.738.800
	4.1.1 Pengadaan Sarana dan Prasarana Budaya	11.690.860.000	11.762.598.800	71.738.800
	4.2 Pengembangan Kearifan Lokal dan Potensi Budaya	9.905.000.000	12.371.876.550	2.466.876.550
	4.2.1 Pengembangan Lumbung Mataraman	9.905.000.000	12.371.876.550	2.466.876.550
	Total Nilai Anggaran Yang Mendukung Sasaran 6	137.050.360.000	143.446.799.750	6.396.439.750
7. Meningkatnya rumah tangga berakses listrik	1 PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI TERBARUKAN	119.040.000	118.050.000	(990.000)
	1.1 Pelaksanaan Konservasi Energi di Wilayah Provinsi	119.040.000	118.050.000	(990.000)
	1.1.1 Pembinaan dan Pengawasan Konservasi Energi Kewenangan Provinsi	119.040.000	118.050.000	(990.000)
	2 PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN	427.399.200	427.399.200	-
	2.1 Penatausahaan Izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi	160.599.200	160.599.200	-
	2.1.1 Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi	53.899.200	53.899.200	-
	2.1.2 Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi	106.700.000	106.700.000	-
2.2 Penganggaran untuk				

Sasaran	Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah/ Berkurang (Rp)
	Kelompok Masyarakat Tidak Mampu, Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	266.800.000	266.800.000	-
	2.2.1 Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	266.800.000	266.800.000	-
	Total Nilai Anggaran Yang Mendukung Sasaran 7	546.439.200	545.449.200	(990.000)
8. Meningkatnya kesesuaian izin pengusahaan air tanah dan pertambangan terhadap rencana tata ruang	1 PROGRAM PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA	598.966.500	525.398.100	(73.568.400)
	1.1 Penetapan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil	55.817.000	55.817.000	-
	1.1.1 Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil	55.817.000	55.817.000	-
	1.2 Penatausahaan Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut	495.833.500	422.265.100	(73.568.400)
	1.2.1 Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut	246.400.000	229.081.600	(17.318.400)

Sasaran	Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah/ Berkurang (Rp)
	1.2.2 Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut	249.433.500	193.183.500	(56.250.000)
	1.3 Penetapan Harga Patokan Mineral Bukan Logam dan Batuan	47.316.000	47.316.000	-
	1.3.1 Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Harga Patokan Mineral Bukan Logam dan Batuan	47.316.000	47.316.000	-
	2 PROGRAM PENGELOLAAN ASPEK KEGEOLAGIAN	510.429.500	468.742.000	(41.687.500)
	2.1 Penetapan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	245.250.000	226.062.500	(19.187.500)
	2.1.1 Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah	245.250.000	226.062.500	(19.187.500)
	2.2 Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	265.179.500	242.679.500	(22.500.000)
	2.2.1 Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Nilai Perolehan Air Tanah	98.957.500	98.957.500	-
	2.2.2 Penghitungan, Perumusan dan Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah	20.000.000	20.000.000	-
	2.2.3 Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Air Tanah	146.222.000	123.722.000	(22.500.000)
	Total Nilai Anggaran Yang Mendukung Sasaran 8	1.109.396.000	994.140.100	(115.255.900)
9. Meningkatkan Tata Kelola Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan	1 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	54.442.401.825	52.353.286.947	(2.089.114.878)
	1.1 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	463.906.300	421.809.100	(42.097.200)

Sasaran	Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah/ Berkurang (Rp)
di Perangkat Daerah	1.1.1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	101.925.800	74.725.800	(27.200.000)
	1.1.2 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	69.625.000	60.645.800	(8.979.200)
	1.1.3 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	292.355.500	286.437.500	(5.918.000)
	1.2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	39.658.881.675	39.413.474.539	(245.407.136)
	1.2.1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	39.397.256.675	39.151.849.539	(245.407.136)
	1.2.2 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	144.180.000	144.180.000	-
	1.2.3 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	42.395.000	42.395.000	-
	1.2.4 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	75.050.000	75.050.000	-
	1.3 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	120.640.000	120.640.000	-
	1.3.1 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	700.000	700.000	-
	1.3.2 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	119.940.000	119.940.000	-
	1.4 Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.162.700.000	1.148.214.000	(14.486.000)
	1.4.1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	106.476.700	106.476.700	-
	1.4.2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	171.686.700	171.686.700	-
	1.4.3 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	55.508.300	55.508.300	-
	1.4.4 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	106.834.000	106.834.000	-
	1.4.5 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	22.645.300	22.645.300	-

Sasaran	Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah/ Berkurang (Rp)
	1.4.6 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	699.549.000	685.063.000	(14.486.000)
	1.5 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	253.518.400	241.711.500	(11.806.900)
	1.5.1 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	35.000.000	35.000.000	-
	1.5.2 Pengadaan Mebel	39.000.000	36.093.200	(2.906.800)
	1.5.3 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	179.518.400	170.618.300	(8.900.100)
	1.6 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	9.275.136.900	7.503.714.450	(1.771.422.450)
	1.6.1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	10.000.000	10.000.000	-
	1.6.2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	4.774.384.900	3.002.962.450	(1.771.422.450)
	1.6.3 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	4.490.752.000	4.490.752.000	-
	1.7 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3.507.618.550	3.503.723.358	(3.895.192)
	1.7.1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1.513.146.200	1.513.146.200	-
	1.7.2 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	344.472.350	344.472.350	-
	1.7.3 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1.250.000.000	1.246.304.808	(3.695.192)
	1.7.4 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	400.000.000	399.800.000	(200.000)
	Total Anggaran Pendukung	54.442.401.825	52.353.286.947	(2.089.114.878)
Total Anggaran yang Berkaitan Langsung dengan Pencapaian Sasaran		551.600.894.125	552.139.114.376	538.220.251

Sumber: Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran Dinas PUPESDM DIY Tahun 2023

2.4 Perjanjian Kinerja Tahun 2023

Dokumen Perjanjian Kinerja (PK) merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kerjanya. Adapun Perjanjian Kinerja Kepala Dinas PUPESDM DIY yang merepresentasikan kinerja instansi dengan Bapak Gubernur DIY sebagai berikut:

Tabel II.4 Perjanjian Kinerja Kepala Dinas PUPESDM DIY Tahun 2023

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahunan	Triwulan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Penduduk Berakses Air Minum	Persentase Rumah Tangga Yang Menempati Hunian Dengan Akses Air Minum Layak Dan Aman	%	95,28	Triwulan I	92,92
					Triwulan II	92,92
					Triwulan III	92,92
					Triwulan IV	95,28
2.	Penduduk Berakses Sanitasi	Persentase Rumah Tangga Yang Menempati Hunian Dengan Akses Sanitasi Layak Dan Aman	%	94,9	Triwulan I	94,9
					Triwulan II	94,9
					Triwulan III	94,9
					Triwulan IV	94,9*)
3.	Penyediaan Infrastruktur Sumber Daya Air	Persentase Penyediaan Infrastruktur Sumber Daya Air	%	70,53	Triwulan I	70,53
					Triwulan II	70,53
					Triwulan III	70,53
					Triwulan IV	70,53*)
4.	Peningkatan Aksesibilitas Jalan	Peningkatan Persentase Aksesibilitas Jalan	%	97,80	Triwulan I	97,80
					Triwulan II	97,80
					Triwulan III	97,80
					Triwulan IV	97,80*)
5.	Rumah Tangga Yang Menempati Hunian Layak Huni Dan Terjangkau	Persentase Rumah Tangga Yang Menempati Tempat Tinggal Layak Huni Dan Terjangkau	%	96,12	Triwulan I	96,12
					Triwulan II	96,12
					Triwulan III	96,12
					Triwulan IV	96,12*)
6.	Meningkatnya Rumah Tangga Berakses Listrik	Persentase Rumah Tangga Berakses Listrik	%	99,99	Triwulan I	99,99
					Triwulan II	99,99
					Triwulan III	99,99
					Triwulan IV	99,99*)
7.	Meningkatnya Kesesuaian Izin Pengusahaan Air Tanah Dan Pertambangan Terhadap Rencana Tata Ruang	Kesesuaian Izin Pengusahaan Air Tanah Dan Pertambangan Terhadap Rencana Tata Ruang	%	40,31	Triwulan I	19,29
					Triwulan II	19,29
					Triwulan III	19,29
					Triwulan IV	40,31

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahunan	Triwulan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
8.	Peningkatan Kinerja Jasa Konstruksi	Peningkatan Persentase Pembinaan Kinerja Jasa Konstruksi	%	57,12	Triwulan I	57,12
					Triwulan II	57,12
					Triwulan III	57,12
					Triwulan IV	57,12*)
9.	Meningkatnya Tata Kelola Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Di Perangkat Daerah	Kategori Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Indeks	A	Triwulan I	A
					Triwulan II	A
					Triwulan III	A
					Triwulan IV	A*)

Ket : Sesuai PK Murni DPUPESDM TA.2023

- Untuk mencapai Sasaran Strategis sebagaimana tersebut di atas terdapat dukungan anggaran sebagai berikut:

No	Program RPD	Anggaran
1.	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (APBD)	Rp. 5.541.600.000,00
2.	Program Pengembangan Sistem Dan Pengelolaan Persampahan Regional (APBD)	Rp. 93.660.000.000,00
3.	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah (APBD)	Rp. 12.753.199.250,00
4.	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase (APBD)	Rp. 453.014.300,00
5.	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA) (APBD)	Rp. 30.740.688.000,00
6.	Program Penyelenggaraan Jalan (APBD)	Rp. 74.726.032.350,00
7.	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Tata Ruang (Dais)	Rp. 138.945.049.800,00
8.	Program Pengembangan Perumahan (APBD)	Rp. 499.500.000,00
9.	Program Kawasan Permukiman (APBD)	Rp. 18.355.000.000,00
10.	Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU) (APBD)	Rp. 96.600.000.000,00
11.	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan (Dais)	Rp. 21.595.860.000,00
12.	Program Pengelolaan Energi Terbarukan (APBD)	Rp. 119.040.000,00
13.	Program Pengelolaan Ketenagalistrikan (APBD)	Rp. 427.399.200,00
14.	Program Pengelolaan Aspek Kegeologian (APBD)	Rp. 510.429.500,00
15.	Program Pengelolaan Mineral Dan Batubara (APBD)	Rp. 598.966.500,00
16.	Program Penataan Bangunan Gedung (APBD)	Rp. 314.713.400,00

No	Program RPD	Anggaran	
17.	Program Pengembangan Jasa Konstruksi (APBD)	Rp.	1.318.000.000,00
18.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi (APBD)	Rp.	54.442.401.825,00
Jumlah Anggaran		Rp.	551.600.894.125,00

Ket : Sesuai PK Murni DPUPESDM TA.2023

2. *) Data capaian kinerja tersedia pada triwulan IV

Pada tahun 2023, Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral DIY melaksanakan reuiu Perjanjian Kinerja Tahun 2023. Reuiu dilakukan karena adanya Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Tahun 2023. Perjanjian Kinerja Reuiu Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel II.5 Perjanjian Kinerja Perubahan Kepala Dinas PUPESDM DIY Tahun 2023

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahunan	Triwulan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Penduduk Berakses Air Minum	Persentase Rumah Tangga Yang Menempati Hunian Dengan Akses Air Minum Layak Dan Aman	%	95,28	Triwulan I	94,77
					Triwulan II	94,77
					Triwulan III	94,77
					Triwulan IV	95,28
2.	Penduduk Berakses Sanitasi	Persentase Rumah Tangga Yang Menempati Hunian Dengan Akses Sanitasi Layak Dan Aman	%	94,9	Triwulan I	94,9
					Triwulan II	94,9
					Triwulan III	94,9
					Triwulan IV	94,9*)
3.	Penyediaan Infrastruktur Sumber Daya Air	Persentase Penyediaan Infrastruktur Sumber Daya Air	%	70,53	Triwulan I	46,38
					Triwulan II	46,38
					Triwulan III	46,38
					Triwulan IV	70,53
4.	Peningkatan Aksesibilitas Jalan	Peningkatan Persentase Aksesibilitas Jalan	%	97,80	Triwulan I	97,24
					Triwulan II	97,24
					Triwulan III	97,24
					Triwulan IV	97,80
5.	Rumah Tangga Yang Menempati Hunian Layak Huni Dan Terjangkau	Persentase Rumah Tangga Yang Menempati Tempat Tinggal Layak Huni Dan Terjangkau	%	96,12	Triwulan I	95,65
					Triwulan II	95,65
					Triwulan III	95,65
					Triwulan IV	96,12
6.	Meningkatnya Rumah Tangga Berakses Listrik	Persentase Rumah Tangga Berakses Listrik	%	99,99	Triwulan I	99,99
					Triwulan II	99,99
					Triwulan III	99,99
					Triwulan IV	99,99*)

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahunan	Triwulan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
7.	Meningkatnya Kesesuaian Izin Pengusahaan Air Tanah Dan Pertambangan Terhadap Rencana Tata Ruang	Kesesuaian Izin Pengusahaan Air Tanah Dan Pertambangan Terhadap Rencana Tata Ruang	%	40,31	Triwulan I	23,85
					Triwulan II	28,99
					Triwulan III	35,73
					Triwulan IV	40,31
8.	Peningkatan Kinerja Jasa Konstruksi	Peningkatan Persentase Pembinaan Kinerja Jasa Konstruksi	%	57,12	Triwulan I	52,94
					Triwulan II	54,31
					Triwulan III	56,15
					Triwulan IV	57,12
9.	Meningkatnya Tata Kelola Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Di Perangkat Daerah	Kategori Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Indeks	A	Triwulan I	A
					Triwulan II	A
					Triwulan III	A
					Triwulan IV	A*)

Ket : Sesuai Reviu PK DPUPESDM TA.2023

Keterangan Tambahan:

Indikator kinerja dan target kinerja tidak berubah, tetapi target tiap triwulan berubah menyesuaikan target pekerjaan.

1. Untuk mencapai Sasaran Strategis sebagaimana tersebut di atas terdapat dukungan anggaran sebagai berikut:

No	Program RPD	Anggaran
1	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (APBD)	Rp. 5.536.452.796,00
2	Program Pengembangan Sistem Dan Pengelolaan Persampahan Regional (APBD)	Rp. 81.734.001.800,00
3	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah (APBD)	Rp. 12.753.199.250,00
4	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase (APBD)	Rp. 453.014.300,00
5	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA) (APBD)	Rp. 34.731.563.333,00
6	Program Penyelenggaraan Jalan (APBD)	Rp. 82.884.910.340,00
7	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Tata Ruang (Dais)	Rp. 135.068.583.160,00
8	Program Pengembangan Perumahan (APBD)	Rp. 498.994.000,00

No	Program RPD	Anggaran
9	Program Kawasan Permukiman (APBD)	Rp. 22.263.600.000,00
10	Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU) (APBD)	Rp. 96.549.730.400,00
11	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan (Dais)	Rp. 24.134.475.350,00
12	Program Pengelolaan Energi Terbarukan (APBD)	Rp. 118.050.000,00
13	Program Pengelolaan Ketenagalistrikan (APBD)	Rp. 427.399.200,00
14	Program Pengelolaan Aspek Kegeologian (APBD)	Rp. 468.742.000,00
15	Program Pengelolaan Mineral Dan Batubara (APBD)	Rp. 525.398.100,00
16	Program Penataan Bangunan Gedung (APBD)	Rp. 314.713.400,00
17	Program Pengembangan Jasa Konstruksi (APBD)	Rp. 1.323.000.000,00
18	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi (APBD)	Rp. 52.353.286.947,00
Jumlah Anggaran		Rp. 552.139.114.376,00

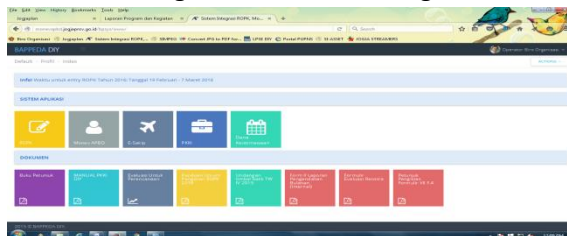
Ket : Sesuai Reviu PK DPUPESDM TA.2023

- *) Data capaian kinerja tersedia pada triwulan IV

2.5 Instrumen Pendukung Capaian Kinerja

- Instrumen pendukung penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) di lingkungan Pemerintah Daerah DIY adalah aplikasi *sungguh.jogjaprov.go.id* yang mengintegrasikan perencanaan termasuk Rencana Operasional Pelaksanaan Kegiatan (ROPK), anggaran kas, monitoring dan evaluasi capaian kinerja bulanan, triwulan, semesteran dan tahunan OPD.

Gambar II.1. Sistem Integrasi ROPK, Monitoring dan Evaluasi, E-SAKIP



Sumber: <http://sungguh.jogjaprov.go.id/>

2. Selain itu dibantu adanya aplikasi pendukung kinerja di Dinas PUPESDM DIY, yaitu Aplikasi SiPBANG, Aplikasi SIPATA dan Aplikasi SIPGELIS, yaitu :
- SIPATA (Sistem Informasi Pengawasan dan Pengendalian Perizinan Air Tanah) merupakan aplikasi yang digunakan untuk membantu Pengawasan dan Pengendalian Izin Pengusahaan Air Tanah secara daring. Pengawasan izin secara daring memungkinkan pihak perusahaan melakukan penilaian secara self assessment yang kemudian akan diverifikasi & dinilai oleh BP3ESDM. SIPATA mendukung efisiensi waktu pengawasan dan pengaksesan data secara realtime.
 - SIPGELIS (Sistem Informasi Pengawasan dan Pengendalian Perizinan Ketenagalistrikan) merupakan aplikasi yang digunakan untuk membantu Pengawasan dan Pengendalian Ketenagalistrikan secara daring. Pengawasan izin secara daring memungkinkan pihak perusahaan melakukan penilaian secara self assessment yang kemudian akan diverifikasi & dinilai oleh BP3ESDM. SIPGELIS mendukung efisiensi waktu pengawasan dan pengaksesan data secara realtime.
 - SiPBANG (Sistem Informasi Pengawasan dan Pengendalian Perizinan Pertambangan) merupakan aplikasi yang digunakan untuk membantu Pengawasan dan Pengendalian Izin Usaha Pertambangan secara daring. Pengawasan izin secara daring memungkinkan pihak perusahaan melakukan penilaian secara self assessment yang kemudian akan diverifikasi & dinilai oleh BP3ESDM. SiPBANG mendukung efisiensi waktu pengawasan dan pengaksesan data secara realtime.

Gambar II.2. Instrumen Pendukung Capaian Kinerja Dinas PUPESDM DIY



BAB 3

Akuntabilitas Kinerja

Bab 3 Berisi :

1. Capaian Kinerja Tahun 2023
2. Capaian Kinerja Lainnya
3. Efisiensi Anggaran
4. Inovasi
5. Lintas Sektor

3.1. Capaian Kinerja Tahun 2023

Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral DIY telah melaksanakan pengukuran kinerja atas kinerja yang diperjanjikan Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral DIY dengan Bapak Gubernur DIY tahun 2023. Pengukuran mengacu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah dengan skala nilai peringkat kinerja sebagaimana tabel berikut:

Tabel III.1. Skala Nilai Peringkat Kinerja

No.	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja	Kode
1.	91 ≤ 100	Sangat Baik	Hijau Tua
2.	76 ≤ 90	Tinggi	Hijau Muda
3.	66 ≤ 75	Sedang	Kuning Tua
4.	51 ≤ 65	Rendah	Kuning Muda
5.	≤ 50	Sangat Rendah	Merah

Sumber: Permendagri Nomor 86 Tahun 2017

Tabel III.2. Capaian Kinerja Tahun 2023

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR/META INDIKATOR	SATUAN	Base line 2021	Capaian 2022	TAHUN 2023				TARGET AKHIR RPD
						TARGET	REALISASI	PERSENTASE	KRITERIA / KODE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Penduduk berakses air minum	Indikator: Persentase Rumah Tangga yang menempati hunian dengan akses air minum layak dan aman	%	92,92	94,77	95,28	95,49 (1.229.137/1.287.207) x 100%	100,22 (95,49 / 95,28) x 100%	Sangat baik	97,15

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR/META INDIKATOR	SATUAN	Base line 2021	Capaian 2022	TAHUN 2023				TARGET AKHIR RPD
						TARGET	REALISASI	PERSENTASE	KRITERIA / KODE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<u>Meta Indikator:</u> Jumlah Rumah Tangga yang terlayani air minum layak dan aman dibagi jumlah Rumah Tangga di DIY dikalikan 100%.								
2	Penduduk berakses sanitasi	<u>Indikator:</u> Persentase Rumah Tangga yang menempati hunian dengan akses sanitasi layak dan aman <u>Meta Indikator:</u> Jumlah Rumah Tangga yang terlayani prasarana dan sarana air limbah domestik layak dan aman dibagi jumlah Rumah Tangga di DIY dikalikan 100%	%	96,18	95,68	94,9	97,69 (1.257.481/1.287.207) x 100%	102,94 (94,9/95,69) X 100%	Sangat baik	97,23
3	Penyediaan infrastruktur sumber daya air	<u>Indikator:</u> Persentase Penyediaan infrastruktur sumber daya air <u>Meta Indikator:</u> Perbandingan antara jumlah penyediaan infrastruktur Irigasi, embung, sumur bor, dan infrastruktur air baku.	%	N/A	46,38	70,53	73,43 (((9+22+1+7+15)+98)/207) X 100%	104,11 (73,43/46,38) x 100%	Sangat baik	100
4	Peningkatan aksesibilitas Jalan	<u>Indikator:</u> Peningkatan persentase aksesibilitas jalan	%	98,87	100,66	97,8	99,175 (1.012,93 km/1.021,36 km) x 100%	101,4 (99,175/97,8) X 100%	Sangat baik	100

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR/META INDIKATOR	SATUAN	Base line 2021	Capaian 2022	TAHUN 2023				TARGET AKHIR RPD
						TARGET	REALISASI	PERSENTASE	KRITERIA / KODE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<u>Meta Indikator:</u> Total Panjang SK Jalan Provinsi terbangun (662,68 km) + Total Panjang SK Jalan Nasional di DIY terbangun (307,25km) + Total Panjang Jalan baru yang direncanakan terbangun sampai akhir tahun anggaran 2027 (RPJMD 2022 – 2027)								
5	Peningkatan kinerja jasa konstruksi	<u>Indikator:</u> Peningkatan persentase pembinaan kinerja jasa konstruksi <u>Meta Indikator</u> Peningkatan kinerja tenaga konstruksi dan masyarakat jasa konstruksi dengan bobot 35% + Sertifikat/Laporan Hasil Uji yang diterbitkan dengan bobot 35% + Persentase terlayannya rekomendasi analisis perkiraan biaya bangunan dan pendampingan penyelenggaraan bangunan gedung negara dengan bobot 30%.	%	N/A	N/A	57,12	90,65 (95,01 %*35%)+(78,28%*35%)+(100%*30%)	158,70 (90,65 /57,12)X 100%	Sangat baik	100
6	Rumah Tangga yang Menempati Hunian Layak Huni dan Terjangkau	<u>Indikator:</u> Persentase rumah tangga yang menempati tempat tinggal layak huni dan terjangkau <u>Meta Indikator:</u> (Jumlah rumah tangga yang menempati tempat tinggal layak huni) / (jumlah rumah tangga di DIY) x 100%.	%	N/A	96,65	96,12	96,12 (1.237.270/1.287.207)X100%	100,00 (96,12 /96,12)X 100%	Sangat baik	97,53

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR/META INDIKATOR	SATUAN	Base line 2021	Capaian 2022	TAHUN 2023				TARGET AKHIR RPD
						TARGET	REALISASI	PERSENTASE	KRITERIA / KODE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	Meningkatnya rumah tangga berakses listrik	<u>Indikator:</u> Presentase Rumah Tangga berakses listrik <u>Meta Indikator:</u> (indikator Jumlah rumah tangga yang telah menikmati listrik / jumlah rumah tangga total x 100%	%	99,99	99,99	99,99	99,99 (1.349.718 /1.349.835)x 100%	100 (99,99 /99,99)x 100%	Sangat baik	99,99
8	Meningkatnya Kesesuaian Izin Pengusahaan Air Tanah Dan Pertambahan Terhadap Rencana Tata Ruang	<u>Indikator:</u> Kesesuaian izin pengusahaan air tanah dan pertambahan terhadap rencana tata ruang <u>Meta Indikator:</u> ((Jumlah izin air tanah yang sesuai ketentuan + Jumlah izin pertambahan sesuai kaidah pertambahan yang baik) : Total jumlah izin x 100%..	%	N/A	N/A	40,31	40,31 (((144+44)/(315+130))x100%	100 (40,31 /40,31)x100 %	Sangat baik	57,85
9	Meningkatnya Tata Kelola Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Perangkat Daerah	<u>Indikator:</u> Kategori Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah <u>Meta indikator..</u> OPD telah melaksanakan RB dengan kriteria A, Predikat sangat baik, rentang nilai/angka >80-90.	kategori	77,75	82,15	A atau 2	A atau 2 (Penilaian atas RB Tematik dan RB General oleh Biro Organisasi)	100 Prosentase realisasi terhadap target (target dibagi capaian dikalikan 100%) dengan metode invert	Sangat baik	A atau 2

Sumber : Renstra Dinas PUPESDM DIY 2023-2026

Adapun analisis capaian kinerja per sasaran strategis diuraikan sebagai berikut:

1.1.1. Sasaran 1 : Penduduk Berakses Air Minum

Kinerja sasaran Penduduk Berakses Air Minum diukur dengan indikator Persentase Rumah Tangga yang menempati hunian dengan akses air minum layak dan aman.

Penjelasan hubungan sasaran, indikator dan meta indikator adalah sebagai berikut:

Tabel III.3. Rumusan Indikator dan Formulasi Perhitungan Sasaran 1

No	Sasaran	Indikator	Meta Indikator
1	2	3	4
1	Penduduk Berakses Air Minum	Persentase Rumah Tangga yang menempati hunian dengan akses air minum layak dan aman	Jumlah Rumah Tangga yang terlayani air minum layak dan aman dibagi jumlah Rumah Tangga di DIY dikalikan 100%.

Sumber : Renstra Dinas PUPESDM DIY 2023

Pencapaian indikator persentase penduduk berakses air minum dihitung dengan membandingkan jumlah rumah tangga dengan akses terhadap sumber air minum berkualitas (layak) dengan total rumah tangga DIY. Penyediaan air minum dilakukan dalam rangka untuk meningkatkan persentase rumah tangga berakses air minum layak.

Melalui Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum serta dukungan dari APBN Ditjend Cipta Karya, Kementerian PUPR melalui kegiatan pembangunan SPAM IKK, Optimalisasi SPAM IKK dan swadaya masyarakat, hingga tahun 2023 jumlah rumah tangga berakses air minum secara kumulatif mencapai 95,49% dari jumlah rumah tangga DIY 1.287.207 KK (sumber Dataku) atau setara dengan 1.229.137 KK. Sampai dengan akhir tahun 2023 capaian penduduk berakses air minum telah mencapai 100,22% dari target sebesar 95,28%.

Sebagai wujud keterpaduan program penyediaan air minum layak, melalui dana APBN, dilakukan Pembangunan – pembangunan infrastruktur air minum sebagai berikut:

- a) Pembangunan SPAM Berbah untuk mendukung Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) Borobudur Yogyakarta Prambanan (BYP) Kabupaten Sleman DIY dengan kapasitas 30 l/det.
- b) Pembangunan Jaringan Perpipaan SPAM IKK Samigaluh Kabupaten Kulon Progo.
- c) Peningkatan IPA Kapasitas 100 (2 x 50) l/det SPAM Seropan Kabupaten Gunung Kidul untuk pelayanan 7 (tujuh) Kapanewon/Kecamatan, yaitu Wonosari, Semanu, Ponjong, Rongkop, Karangmojo, Semin dan Ngawen dengan total sambungan sebanyak 16.857 unit.

- d) Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS) untuk 18 desa di DIY yaitu 6 desa di Kabupaten Kulon Progo, 6 desa di Kabupaten Gunungkidul, dan 6 desa di Kabupaten Sleman.

Tabel III.4. Target dan Realisasi Kinerja Sasaran Penduduk Berakses Air Minum

No	Sasaran	Indikator	Realisasi 2022	2023			Target Akhir Renstra (2026)	Capaian s/d 2023 terhadap p 2026 (%)
				Target	Realisasi	% Realisasi		
1	Penduduk Berakses Air Minum	Persentase Rumah Tangga yang menempati hunian dengan akses air minum layak dan aman	94,77	95,28	95,49 (1.22 9.137 /1.28 7.207) x 100%	100,22 (95,49% / 95,28% x 100%)	97,15	98,29 (95,49 %/ 97,15 % x100%)

Sumber : Renstra Dinas PUPESDM DIY 2023

Analisis Ketercapaian Sasaran 1: Penduduk Berakses Air Minum adalah sebagai berikut:

- Tercapai 95,49%, dengan demikian prosentase realisasi terhadap target sebesar 100,22% (terlampau).
- Dibandingkan realisasi tahun lalu sebesar 94,77%, terdapat kenaikan sebesar 0,72 %.
- Capaian target indikator pada tahun 2023 terhadap target tahun 2026 adalah 98,29 %

Sebagai penunjang kinerja sasaran penduduk berakses air minum dapat disajikan data cakupan pelayanan air minum per kabupaten/kota di DIY dalam tabel berikut ini :

Tabel III.5. Data Kependudukan DIY Terlayani Air Minum Tahun 2023

No	Kabupaten	Perpipaan	Non Perpipaan	Belum Ada Akses
1	Kulonprogo	67.751	81.459	6.759
2	Bantul	72.819	221.098	45.857
3	Gunungkidul	108.093	149.204	5.454
4	Sleman	90.489	294.533	-
5	Yogyakarta	31.396	112.295	-
Jumlah Rumah Tangga		1,665,834	370.548	858.589
Total Akses Air Minum		3,811,438		1.229.137
Capaian Akses		95,49%		

Sumber : Dinas PUPESDM DIY, 2023

Keberhasilan capaian Sasaran 1, dengan Indikator Persentase Rumah Tangga yang menempati hunian dengan akses air minum layak dan aman tersebut didukung oleh keberhasilan program, kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut:

Tabel III.6. Capaian Program, Kegiatan, dan SubKegiatan terhadap Sasaran 1

NO	Program	Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Target	realisasi	%Capaian
1	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM		Presentase jumlah rumah tangga yang terlayani air curah regional	14,78 %	29,09%	196,82 %
1.1		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/ Kota				
1.1.1		Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM	1. Jumlah Kebijakan dan Strategi Penyelenggaraan SPAM : 2. Penyusunan Draft Rancangan Pergub tentang Kebijakan dan Strategi Daerah Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum DIY :	1 Dokumen 1 rapegub	1 Dokumen 1 rapegub	100 %
1.1.2		Operasi dan Pemeliharaan SPAM Lintas Kabupaten/ Kota (BALAI PIALAM)	1. Jumlah unit SPAM yang beroperasi dan terpelihara : 2. SPAM yang beroperasi dan terpelihara :	1 Unit 1 Unit	1 Unit 1 Unit	100 %

Tabel III.7. Kinerja Program Sasaran 1

No	Program	Indikator	Capaian 2022	2023			Target Akhir Renstra (2026)	Capaian s/d 2023 terhadap 2026 (%)
				Target	Realisasi	% Realisasi		
1	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Presentase jumlah rumah tangga yang terlayani air curah regional	N/A	14,78 %	29,09%	196,82 %	17,9%	162,51%

Sumber : Dinas PUPESDM DIY, 2023

Tabel III.8. Kinerja Keuangan dan Fisik Program Dan Kegiatan Sasaran 1

NO	Program/ Kegiatan	Pagu (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Keu (%)	Fisik (%)
1	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	5.536.452.796	5.439.675.443	98,25	100
1.1	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota	5.536.452.796	5.439.675.443	98,25	100
1.1.1	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM	198.571.500	180.494.339	90,90	100
1.1.2	Operasi dan Pemeliharaan SPAM Lintas Kabupaten/Kota (BALAI PIALAM)	5.337.881.296	5.259.181.104	98,53	100
	JUMLAH :	5.536.452.796	5.439.675.443	98,25	100

Sumber : Dinas PUPESDM DIY, 2023

Tabel III.9. Analisa Penyebab Keberhasilan Sasaran 1

No	Indikator	Pendorong	Penghambat	Solusi
1	Persentase Rumah Tangga yang menempati hunian dengan akses air minum layak dan aman	<ol style="list-style-type: none"> Target RPJMN, SPM, dan SDGs yang mengamanatkan untuk daerah meningkatkan akses air minum layak dan aman. Adanya pendanaan baik di pusat dan di daerah serta kabupaten/kota dalam hal 	<ol style="list-style-type: none"> Masih tingginya kebocoran di masing-masing PDAM pengelolaan SPAMDES tidak berjalan akibat sistem yang rusak atau keterbatasan air baku akibat musim kemarau 	<ol style="list-style-type: none"> PDAM mempunyai target untuk pengurangan kebocoran di setiap wilayahnya Diperlukan pembinaan kepada kelompok masyarakat pengelola SPAMDES oleh masing-masing

No	Indikator	Pendorong	Penghambat	Solusi
		<p>penyelenggaraan air minum di daerah berupa optimalisasi SPAM IKK, Program Pamsimas, Dana DAK, bantuan hibah air minum, program SPAMDES, Penyusunan Jakstrada,</p> <p>3. Pengelolaan penyelenggaraan air minum baik oleh PDAB, PDAM Kabupaten/Kota dan pengelola SPAMDES</p> <p>4. Kebutuhan akan air minum layak untuk masyarakat di DIY</p>	<p>3. pendanaan untuk penyelenggaraan air minum di kabupaten/kota terkait investasi hilir berupa jaringan servis dan SR masih terbatas</p>	<p>Kabupaten</p> <p>3. Koordinasi yang lebih matang dengan masing-masing pengguna air curah SPAM Regional Kartamantul serta Pemerintah Kabupaten dan Kota untuk melakukan penyerapan sesuai dengan PKS yang telah disepakati</p>

Sumber : Dinas PUPESDM DIY, 2023

Gambar III.1 Foto Kegiatan Penyediaan Air Minum Tahun 2023





Sumber : DPUPESDM DIY dan BPPW DIY, 2023

1.1.2. Sasaran 2 : Penduduk Berakses Sanitasi

Kinerja sasaran Penduduk Berakses Sanitasi diukur dengan indikator Persentase Rumah Tangga yang menempati hunian dengan akses sanitasi layak dan aman. Penjelasan hubungan sasaran, indikator dan meta indikator adalah sebagai berikut:

Tabel III.10. Rumusan Indikator dan Formulasi Perhitungan Sasaran 2

No	Sasaran	Indikator	Meta Indikator
1	2	3	4
1	Penduduk Berakses Sanitasi	Persentase Rumah Tangga yang menempati hunian dengan akses sanitasi layak dan aman	Jumlah Rumah Tangga yang terlayani prasarana dan sarana air limbah domestik layak dan aman dibagi jumlah Rumah Tangga di DIY dikalikan 100%

Pencapaian indikator Persentase Rumah Tangga yang menempati hunian dengan akses sanitasi layak dan aman dihitung dengan membandingkan Jumlah Rumah Tangga yang terlayani prasarana dan sarana air limbah domestik layak dan aman dibagi jumlah Rumah Tangga di DIY dikalikan 100%.

Melalui Program Pengembangan Sistem Dan Pengelolaan Persampahan Regional dan Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah yang ada sebagai

upaya peningkatan dan pengembangan infrastruktur dalam mendukung perluasan cakupan pelayanan air limbah di DIY serta melalui dukungan APBN dan APBD Kabupaten, jumlah rumah tangga yang memiliki akses terhadap fasilitas sanitasi layak sejumlah 1.257.481 KK atau setara dengan 97.69% dari jumlah rumah tangga DIY sejumlah 1.287.207 KK (Dataku, 2023). Sampai dengan akhir tahun 2023 persentase capaian penduduk berakses sanitasi telah mencapai 102,94% dari target sebesar 94,9%:

Tabel III.11. Target dan Realisasi Kinerja Sasaran Meningkatnya Penduduk Berakses Sanitasi

No	Sasaran	Indikator	Realisasi 2022	2023			Target Akhir Renstra (2026)	Capaian s/d 2023 terhadap 2026 (%)
				Target	Realisasi	% Realisasi		
1	Penduduk Berakses Sanitasi <u>Meta Indikator:</u> Jumlah Rumah Tangga yang terlayani prasarana dan sarana air limbah domestik layak dan aman dibagi jumlah Rumah Tangga di DIY dikalikan 100%	Persentase Rumah Tangga yang menempati hunian dengan akses sanitasi layak dan aman	95,68	94,9	97,69 (1.257.481 / 1.287.207) x 100%	102,94 (97,69 % / 94,9%) x 100%	97,23	100,47 (97,69 % / 97,23%) x 100%

Sumber : Dinas PUPESDM DIY, 2023

Analisis Ketercapaian Sasaran 2: Penduduk Berakses Sanitasi adalah sebagai berikut:

- Tercapai 97,69%, dengan demikian prosentase realisasi terhadap target sebesar 102,94% (terlampau).
- Dibandingkan realisasi tahun lalu sebesar 95,68 %, terdapat kenaikan sebesar 2,01 %.
- Capaian target indikator pada tahun 2023 terhadap target tahun 2026 adalah 100,47%

Tabel III.12. Cakupan Akses dan Sistem Layanan Air Limbah Domestik DIY Tahun 2023

NO	KABUPATEN	BABS	AKSES BELUM LAYAK	AKSES LAYAK				Jumlah Rumah tangga
				AKSES DASAR	INDIVIDU	BERSAMA	AKSES AMAN	
1	Kulonprogo	-	3.008	126.860	9.861	16.240	155.969	-
2	Bantul	-	13.682	239.046	3.667	83.379	339.774	-
3	Gunungkidul	-	9.494	178.857	51.931	22.469	262.751	-
4	Sleman	-	2.034	269.508	14.753	98.727	385.022	-
5	Yogyakarta	-	1.507	84.797	7.854	49.532	143.691	-
Total DIY		-	-	29.726	899.068	88.066	270.347	1.287.207
		0,00%	0,00%	2,31%	69,85%	6,84%	21,00%	100,00%
		2,31%		97,69%				

Sumber: Dinas PUPESDM DIY, 2023

Beberapa kegiatan yang telah dilakukan sampai dengan Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

- **Penanganan air limbah terpusat**

Penambahan layanan jaringan infrastruktur jaringan limbah terpusat di prioritaskan pada daerah-daerah yang sudah terlewati jaringan limbah terpusat namun Sambungan Rumah (SR) nya belum ada. Prioritas penambahan layanan jaringan infrastruktur limbah terpusat tersebut dibagi menjadi 2 skala yaitu skala desa dan skala kecamatan. Penanganan limbah komunal diprioritaskan pada daerah dengan kepadatan penduduk lebih dari 100 jiwa/ha, dan merupakan daerah yang tidak terlayani jaringan pipa limbah terpusat dan berada pada daerah cekungan.

Saat ini kabupaten/Kota masih memprioritaskan penyambungan SR (Sambungan Rumah) untuk IPAL Skala Kawasan (SAPLD-T Depok dan SPALD-T Bambanglipuro) yang dibangun oleh Pemerintah Pusat. Tidak semua wilayah KPY bisa terlayani dengan jaringan IPAL Terpusat skala Regional Sewon karena perbedaan kontur. Optimalisasi penanganan air limbah yang telah dilaksanakan oleh kementerian PUPR sementara ini adalah peningkatan kapasitas instalasi pengolahan air limbah dari 25.000 SR menjadi 75.000 SR. Sedangkan untuk jaringan perpipaan Air Limbah belum dilakukan pengembangan. Kapasitas jaringan air limbah sampai saat ini baru bisa

menampung debit untuk 25.000 SR namun jumlah Sambungan Rumah (SR) yang terlayani sudah melebihi angka tersebut sehingga perlu adanya pengembangan dan penanganan karena adanya beberapa dampak permasalahan jaringan seperti : adanya luapan air limbah dari manhole pada saat hujan; adanya infiltrasi air hujan dari drainase yang masuk ke chamber; dan sebagainya.

Pemasangan Sambungan Rumah Air Limbah Rumah Tangga Sistem IPAL Terpusat Sewon pada tahun 2022 adalah 26.239 SR dan pada tahun 2023 terbangun sambungan rumah sebanyak 966 SR sehingga jumlah sambungan rumah air limbah rumah tangga s.d akhir tahun 2023 sebanyak 27.205 SR, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel III.13. Sambungan Rumah Air Limbah Rumah Tangga

No	Wilayah KPY	Jumlah Sambungan Rumah (SR)		
		s.d 2022	2023	s.d 2023
1	Kota Yogyakarta	19.245	586	19.831
2	Kabupaten Bantul	3.124	380	3.504
3	Kabupaten Sleman	3.870	-	3.870
Jumlah Total		26,050	26.239	966

Sumber: Dinas PUPESDM DIY, 2023

Jumlah SR yang terpasang di tahun 2023 masih jauh dari kapasitas IPAL Sewon yang telah ditingkatkan kapasitasnya menjadi 75.000 SR yaitu sebesar 36.27%. Sehingga perlu adanya intervensi untuk kabupaten/kota menambah jaringan SR air limbah di IPAL terpusat Sewon

Tabel III.14. Realisasi Pelayanan Air Limbah

Kegiatan	Realisasi Pelayanan (SR)	Target (SR)	Realisasi (%)
Pengelolaan Air Limbah Terpusat Balai PIALAM	27.205	75.000	36.27

Sumber: Dinas PUPESDM DIY, 2023

Selain penyelenggaraan IPAL Regional Sewon, dalam rangka peningkatan akses sanitasi di DIY, adanya pendanaan dari APBN melalui BPPW DIY di tahun 2023 untuk melaksanakan Peningkatan Kapasitas IPLT Madurejo Kabupaten Sleman

- **Penanganan air limbah berbasis masyarakat**

Pemerintah Pusat melalui BPPW juga melaksanakan pekerjaan Peningkatan Kapasitas IPLT Madurejo Kabupaten Sleman yang direncanakan akan selesai di bulan Januari 2024 (MYC). Selain itu Pemerintah Kabupaten juga melakukan pembangunan IPAL Komunal dimasing-masing wilayahnya. Jumlah IPAL Komunal yang sudah terbangun sampai di tahun 2023 sejumlah sebagaimana tersebut pada tabel dibawah ini:

Tabel III.15. Jumlah IPAL Komunal Yang Terbangun Tahun 2023

No	Wilayah	Jumlah IPAL Komunal
1	Kota Yogyakarta	96
2	Kabupaten Bantul	154
3	Kabupaten Sleman	176
4	Kabupaten Gunungkidul	78
5	Kabupaten Kulon Progo	49
Jumlah Total		520

Sumber: Data Pokja PKP Kabupaten/Kota, 2023

Gambar III.2 Peningkatan Kapasitas IPLT Madurejo Kabupaten Sleman



Sumber : BPPW DIY, 2023

- **Sampah**

Pada tahun anggaran 2023, Dinas PUP ESDM DIY melalui bidang Cipta Karya melakukan beberapa kegiatan untuk membantu pengelolaan persampahan di DIY khususnya di TPA Piyungan yaitu:

1. Penyelesaian pelaksanaan pengadaan tanah untuk 71 bidang dengan total luas 5,7 Ha
2. Pembangunan sel landfill TPA Transisi 2
3. Penyusunan dokumen DELH Pekerjaan Addendum AMDAL TPA Piyungan
4. Pengadaan Tanah TPA Transisi 3
5. Pekerjaan Penanganan Drainase Kawasan Permukiman Tahap II dan Penanganan Lindi di TPA Piyungan
6. Pekerjaan Penanganan Drainase Kawasan Permukiman
7. Penyusunan DED Pematangan Lahan
8. Penyusunan DED TPA Transisi 3

Selain itu, Pemerintah Pusat melalui BPPW juga melaksanakan pekerjaan pembangunan TPS 3R di 9 lokasi di DIY yaitu 2 lokasi di Gunung Kidul dan 7 lokasi di Sleman. Untuk data infrastruktur pengelolaan sampah yang terbangun sampai di tahun 2023 sejumlah sebagaimana tersebut pada table dibawah ini :

1. DED Penanganan Drainase Kawasan Permukiman Tahap II dan Penanganan Lindi di TPA Piyungan
2. DED Pekerjaan konstruksi sel baru di TPA Transisi Piyungan Tahap II
3. Evaluasi Teknis Pelaksanaan Penataan Sel TPA Piyungan
4. Kajian sistem penyediaan air minum kawasan permukiman TPA Piyungan
5. Kajian Uji Tanah di TPA Transisi Regional Piyungan Tahap II
6. Pekerjaan konstruksi sel baru di TPA Transisi Piyungan
7. Pembebasan lahan di TPA Piyungan tahap II
8. Penanganan drainase kawasan permukiman di TPA Piyungan

Selain itu, dengan Dana APBN melalui BPPW DIY di tahun 2020-2022 melaksanakan pekerjaan Peningkatan Kapasitas TPA Piyungan yaitu melakukan penataan sel sampah untuk membantu meningkatkan kapasitas TPA Piyungan dan persiapan penutupan sel sampah di TPA Piyungan. Selain pekerjaan di TPA Piyungan, BPPW DIY melaksanakan program TPS 3R di 2

lokasi yaitu Caturharjo dan Purwomartani Kabupaten Sleman. Neraca Pengelolaan Sampah Perkotaan Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2023 (Ton/hari), sebagai berikut:

Tabel III.16. Infrastruktur Pengelolaan Sampah

No	Wilayah KPY	Jumlah TPA (unit)	TPS3R	TPST
1	Kota Yogyakarta	1	2	
2	Kabupaten Bantul		19	
3	Kabupaten Sleman		35	1
4	Kabupaten Gunungkidul	1	15	
5	Kabupaten Kulon Progo	1	9	
Jumlah Total		3	80	1

Sumber : Data Pokja PKP, 2023

Terdapat 3 (tiga) unit TPA di DIY yaitu 1) TPA regional (TPA Piyungan) yang melayani Kota Yogyakarta, Kabupaten Sleman dan Kabupaten Bantul, 2) TPA Baleharjo (Kabupaten Gunungkidul) dan, 3) TPA Banyuroto (Kabupaten Kulon Progo).

Gambar III.3. Pengembangan Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah di DIY



 <p>Pengadaan lahan TPA Transisi</p>	 <p>Pengadaan lahan pengembangan TPA Piyungan</p>
 <p>Pembangunan TPS 3R</p>	 <p>Pembangunan TPS 3R</p>
 <p>Pekerjaan Konstruksi Pembangunan saluran drainase</p>	 <p>Pekerjaan Konstruksi Pembangunan saluran drainase</p>
 <p>Pelaksanaan Pekerjaan Pemeliharaan Jaringan Drainase</p>	 <p>Pelaksanaan Pekerjaan Pemeliharaan Jaringan Drainase</p>

Sumber : DPUPESDM DIY dan BPPW DIY, 2023

- **Drainase**

Pada tahun anggaran 2023, Dinas PUPESDM DIY melalui bidang Sumber Daya Air dan Drainase melakukan Pemeliharaan Saluran Drainase di MM UGM dan di Desa Ngestiharjo, Kasihan, Bantul.

Keberhasilan capaian Sasaran 2, dengan Indikator Persentase Rumah Tangga yang menempati hunian dengan akses sanitasi layak dan aman tersebut didukung oleh keberhasilan program, kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut:

Tabel III.17. Capaian Program, Kegiatan, dan SubKegiatan terhadap Sasaran 2

NO	Program	Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Target	realisasi	% Capaian
1	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH		Presentase jumlah rumah tangga yang terlayani pengolahan air limbah domestik regional	35,39%	36,27%	102,49
1.1		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Regional				
1.1.1		Rehabilitasi/Peningkatan/Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Regional (BALAI PIALAM)	1. Jumlah Paket Rehabilitasi/Peningkatan/Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Regional : 2. Review Dokumen Lingkungan Hidup IPAL Sewon : 3. Pembangunan Pagar IPAL Tahap II :	2 Paket 1 Paket 1 Paket	2 Paket 1 Paket 1 Paket	100
1.1.2		Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (BALAI PIALAM)	1. Jumlah Unit Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik yang Beroperasi dan Terpelihara : 2. Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik yang Beroperasi dan Terpelihara : 3. Pemeliharaan Jaringan Air Limbah : 4. Pemantauan dan Pengendalian Kualitas Air Limbah Jaringan : 5. Pemantauan dan Pengendalian Kualitas Air Masuk/Keluar IPAL : 6. Pemantauan dan Pengendalian Kualitas Air Masuk/Keluar IPLT :	2 Unit 2 Unit 324 km 1 tahun 1 tahun 1 tahun 1 tahun 1 tahun 1 tahun 70 unit 1 tahun 1 tahun 1 tahun 1 tahun	2 Unit 2 Unit 324 km 1 tahun 1 tahun 1 tahun 1 tahun 1 tahun 1 tahun 70 unit 1 tahun 1 tahun	100

NO	Program	Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Target	realisasi	% Capaian
			7. Pemantauan dan Pengendalian Kualitas Biota/Coliform : 8. Pemantauan dan Pengendalian Kualitas Lumpur Tinja dari Truck tangki : 9. Pemantauan dan Pengendalian Unsur Dalam Sludge : 10. Pemeliharaan Instalasi Pengolah Lumpur Tinja : 11. Pemeliharaan Instalasi Pengolahan Air Limbah : 12. Pemantauan dan Pengendalian Kualitas Air Tanah di Jaringan : 13. Pemantauan dan pengendalian kualitas udara			
2	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL		Kapasitas penampungan pengembangan TPA Regional Piyungan	541.212 m3	298.882,4 m3	55,22
2.1		Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional				100
2.1.1		Pembangunan TPA/TPST/SPA Kewenangan Provinsi	1. Jumlah Rumah Tangga yang terlayani oleh TPA/TPST/SPA Kewenangan Provinsi : 2. DED Pematangan Lahan Pengembangan TPA Piyungan (5,8 Ha) : 3. Pekerjaan konstruksi sel baru di TPA Transisi Piyungan Tahap II : 4. Pembebasan lahan di TPA Piyungan tahap III : 5. Penyusunan Addendum AMDAL TPA Piyungan : 6. DED TPA Transisi Tahap 3 : 7. Pembebasan lahan di TPA Transisi Piyungan :	166883 Rumah Tangga 1 Paket 1 paket 3.5 Ha 1 dokumen 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket	163.934 Rumah Tangga 1 Paket 1 paket 3 Ha 1 dokumen 1 Paket 1 Paket	100
2.1.2		Rehabilitasi TPA/TPST/SPA Kewenangan Provinsi	1. Jumlah TPA/TPST/SPA Kewenangan Provinsi yang Dilakukan Optimalisasi : 2. Penanganan Drainase Kawasan Permukiman Tahap II dan Penanganan Lindi di TPA Piyungan : 3. Penanganan drainase kawasan TPA Piyungan :	0 Unit 1 paket 1 Paket	Unit 1 paket 1 Paket	100

NO	Program	Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Target	realisasi	% Capaian
3	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE		Pengurangan luasan genangan (Ha)	3,8 Ha	5,03	131,3
3.1		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan Kawasan Strategis Provinsi				100
3.1.1		Penyediaan Drainase Perkotaan dan Sarana Pendukungnya	1. Jumlah Sistem Drainase Perkotaan dan Sarana Pendukung Lainnya yang Disediakan : 2. Pembangunan Saluran Drainase Padukuhan Dobangsan, Giripeni, Wates, Kulonprogo :	1 Unit 1 Unit	1 Unit 1 Unit	100
3.1.3		Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase	1. Jumlah Sistem Drainase yang Beroperasi dan Terpelihara : 2. Pemeliharaan Saluran Drainase di MM UGM dan di Kalurahan Ngestiharjo, Kapanewon Kasihan, Kab. Bantul :	2 Unit 2 Unit	2 Unit 2 Unit	100

Tabel III.18. Kinerja Program Sasaran 2

No	Program	Indikator	Capaian 2022	2023			Target Akhir Renstrana (2023)	Capaian s/d 2023 terhadap 2026 (%)
				Target	Realisasi	% Realisasi		
1	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Presentase jumlah rumah tangga yang terlayani pengolahan air limbah domestik regional	34,73%	35,39%	36,27 %	102,49	37,39	97%

No	Program	Indikator	Capaian 2022	2023			Target Akhir Renstrana (2023)	Capaian s/d 2023 terhadap 2026 (%)
				Target	Realisasi	% Realisasi		
2	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	Kapasitas penampungan pengembangan TPA Regional Piyungan	0 m3	541.212 m3	298.882,4 m3	55,22	616.076 m3	48,51
3	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Pengurangan luasan genangan (Ha)	3,07 Ha	3,8 Ha	5,03	131,3	6,11 Ha	82,32

Sumber : Dinas PUPESDM DIY, 2023

Tabel III.19. Kinerja Keuangan dan Fisik Program Dan Kegiatan Sasaran 2

NO	Program/Sub Kegiatan	Pagu (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Keu (%)	Fisik (%)
1	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	12.753.199.250	11.657.318.232	91,41	100
1.1	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Regional	12.753.199.250	11.657.318.232	91,41	100
1.1.1	Rehabilitasi/Peningkatan/Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Regional (BALAI PIALAM)	5.753.199.250	4.904.448.918	85,25	100
1.1.2	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (BALAI PIALAM)	7.000.000.000	6.752.869.314	96,47	100
2	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	81.734.001.800	74.539.012.856	91,2	100
2.1	Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional	81.734.001.800	74.539.012.856	91,2	100
2.1.1	Pembangunan TPA/TPST/SPA Kewenangan Provinsi	59.734.001.800	54.566.780.899	91,35	100
2.1.2	Rehabilitasi TPA/TPST/SPA Kewenangan Provinsi	22.000.000.000	19.972.231.957	90,78	100
3	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	453.014.300	440.379.845	97,21	100
3.1	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan Kawasan Strategis Provinsi	453.014.300	440.379.845	97,21	100
3.1.1	Penyediaan Drainase Perkotaan dan Sarana Pendukungnya	200.000.000	198.599.455	99,30	100

NO	Program/Sub Kegiatan	Pagu (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Keu (%)	Fisik (%)
3.1.3	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase	253.014.300	241.780.390	95,56	100
	JUMLAH :	94.940.215.350	80.636.710.933	91,25	100

Sumber : DPUPESDM DIY, 2023

Tabel III.20. Analisa Penyebab Keberhasilan Sasaran 2

No	Indikator	Pendorong	Penghambat	Solusi
1	Persentase Rumah Tangga yang menempati hunian dengan akses sanitasi layak dan aman	<ul style="list-style-type: none"> Pelaksanaan pembangunan infrastruktur sanitasi yang dilaksanakan oleh baik dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan pemerintah kabupaten/kota untuk peningkatan akses sanitasi di DIY Target RPJMN, SPM dan SDGs yang mengamanatkan untuk daerah meningkatkan akses layak dan aman sanitasi. Adanya pendanaan pengelolaan penyelenggaraan air limbah domestic terpusat oleh Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota (IPAL regional Sewon, IPAL Berbah, IPAL Depok, IPAL Bambanglipuro, IPLT masing-masing Kabupaten) 	<ol style="list-style-type: none"> untuk peningkatan akses sanitasi layak masih ada beberapa masyarakat yang belum menyadari untuk membangun tangki septik yang sesuai dengan standar teknis untuk meningkatkan akses aman masih terdapat keterbatasan sebagai berikut: <ul style="list-style-type: none"> terbatasnya anggaran kabupaten kota dalam pembiayaan penambahan sambungan rumah IPAL Sewon Masih kurangnya Sarana dan Prasarana (mobil sedot tinja kurang) Kota Yogyakarta dan Kabupaten Bantul belum mempunyai IPLT serta IPLT Banyuroto Kulon Progo belum optimal kesadaran masyarakat dalam menguras tangki septiknya 	<ol style="list-style-type: none"> Ditingkatkan sosialisasi ke masyarakat untuk pemasangan tangki septik yang memenuhi standar teknis dan ketentuan untuk tangki septik selalu dikuras Diperlukan koordinasi yang lebih intens lagi untuk peningkatan infrastruktur sanitasi di masing-masing kabupaten/kota agar tujuan dari RPJMN yang bergeser menjadi akses aman bisa menjadi tujuan pembangunan Bersama Koordinasi dalam menentukan target SR untuk setiap kabupaten/kota

Sumber : Dinas PUPESDM DIY, 2023

1.1.3. Sasaran 3 : Penyediaan Infrastruktur Sumberdaya Air

Jaringan irigasi merupakan saluran, bangunan, dan bangunan pelengkap yang merupakan satu kesatuan yang diperlukan untuk penyediaan, pembagian, pemberian, penggunaan, dan pembuangan air irigasi. Keandalan air irigasi yang diwujudkan melalui kegiatan membangun waduk, waduk lapangan, bendungan, bendung, pompa, dan jaringan drainase yang memadai, mengendalikan mutu air, serta memanfaatkan kembali air drainase. Keandalan prasarana irigasi yang diwujudkan melalui kegiatan peningkatan, dan pengelolaan jaringan irigasi yang meliputi operasi, pemeliharaan, dan rehabilitasi jaringan irigasi di daerah irigasi. Penjelasan hubungan sasaran, indikator dan meta indikator adalah sebagai berikut:

Tabel III.21. Rumusan Indikator dan Formulasi Perhitungan Sasaran 3

No	Sasaran	Indikator	Meta Indikator
1	2	3	4
1	Penyediaan infrastruktur sumber daya air	Persentase penyediaan infrastruktur sumber daya air	Perbandingan antara jumlah penyediaan infrastruktur irigasi, embung, sumur bor, dan infrastruktur air baku

Sumber : DPUPESDM DIY, 2023

Menurut Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14/PRT/M/2015 tentang Kriteria dan Penetapan Status Daerah Irigasi, Pemda DIY terdapat 3 Di. kewenangan Pemerintah pusat dengan luas 12.460 Hektar, 41 Di kewenangan Provinsi dengan luas 13.987 Hektar. Selain Irigasi dan Drainase adapula kegiatan Penyediaan Infrastruktur Air Baku , baik berupa embung maupun sumur bor air tanah, yang ikut menunjang dalam Penyediaan infrastruktur air baku. Melalui Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA) Bidang Sumber Daya Air dan Drainase, hingga tahun 2023 jumlah Penyediaan Infrastruktur Air Baku tercapai 73,43 % dari target 70,53% di mana 152 infrasturktur Sumber Daya Air dari Irigasi, Embung, maupun sumur bor terbangun hingga 2023 dari target di 2026 207 Infrastruktur SDA. Sampai dengan akhir tahun 2023 pula, tercapai Persentase luas daerah irigasi dengan indeks kinerja optimum (> 77,50 %) dibandingkan dengan luas total daerah irigasi Kewenangan DIY sebesar 13,11 % dari Target 12,51 %. Selain itu, indikator ketersediaan air melalui infrastruktur sumber daya air dengan target 576 liter / detik tercapai di Tahun 2023 591,51 liter/detik. Pencapaian tersebut didukung oleh kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

- 1) Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan

- 2) Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan baik melalui APBD maupun DAIS
- 3) Operasi Jaringan Irigasi Permukaan
- 4) Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan di 41 Daerah Irigasi
- 5) Operasi dan Pemeliharaan Rutin Embung/Telaga mencakup 25 embung
- 6) Penyediaan Sumur Bor melalui dana APBD maupun DAIS

Tabel III.22. Peningkatan luas fungsional Daerah Irigasi yang terlayani air irigasi

Tahun	Irigasi			Embung			Sumur Bor			Jumlah Total	Prosentase
	Eksisting	Penambahan	Total	Eksisting	Penambahan	Total	Eksisting	Penambahan	Total		
2022 (baseline)	41	0	41	25	0	25	14	18	32	98	47,34%
2023	41	31	72	25	0	25	32	23	55	152	73,43%

Semua Pekerjaan Konstruksi baik irigasi, embung, sumur Bor, sudah dilaksanakan , yaitu:

1. Subkegiatan Peningkatan Jaringan Irigasi = 9 lokasi
2. Subkegiatan Lumbang Mataraman = 22 lokasi
3. Subkegiatan Sumur Air Tanah Air Baku= 1 lokasi sumur bor
4. Subkegiatan Dais SRS Pegunungan Menoreh= 7 lokasi sumur bor
5. Subkegiatan Dais SRS Pegunungan Sewu = 15 titik

Total Penambahan Infrastruktur SDAD = 9+22+1+7+15= 54 titik

Tabel III.23. Target dan Realisasi Kinerja Sasaran 3

No	Sasaran	Indikator	Capaian 2022	2023			Target Akhir Renstra (2023)	Capaian s/d 2023 terhadap 2026 (%)
				Target	Realisasi	% Realisasi		
1	Penyediaan infrastruktur sumber daya air	Persentase penyediaan infrastruktur sumber daya air	46,38 %	70,53 %	73,43 (98+54) / 207	104,11 1 (73,43 %/70,53%X 100)	100 %	73.43 (73,43% /100%X 100)

Sumber : DPUPESDM DIY, 2023

Analisis Ketercapaian Sasaran 3: Penyediaan infrastruktur sumber daya air adalah sebagai berikut:

- a. Tercapai 73,43%, dengan demikian prosentase realisasi terhadap target sebesar 104,11% (terlampau).

- b. Dibandingkan realisasi tahun lalu sebesar 46,38 %, terdapat kenaikan sebesar 27,05 %.
- c. Capaian target indikator pada tahun 2023 terhadap target tahun 2026 adalah 73,43%

Keberhasilan capaian Sasaran 3, dengan Indikator Persentase penyediaan infrastruktur sumber daya air tersebut didukung oleh keberhasilan program, kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut:

Tabel III.24. Capaian Program, Kegiatan, dan SubKegiatan terhadap Sasaran 3

NO	Program	Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Target	realisasi	% Capaian
1	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)		Meningkatnya Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Kewenangan DIY	12,51 %	13,11 %	104,80
			Meningkatnya ketersediaan air melalui infrastruktur sumber daya air	576,01 liter/detik	586,37 liter/detik	101,80
1.1		Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/ Kota				100
1.1.1		Pembangunan Sumur Air Tanah untuk Air Baku	1. Jumlah Sumur Air Tanah untuk Air Baku yang Dibangun : 2. Pembangunan Sumur Bor Air Tanah Dalam dan sumur resapan pada Daerah Sulit Air di Kab. Sleman :	1 Titik 1 Titik	1 Titik 1 Titik	100
1.1.2		Operasi dan Pemeliharaan Embung dan Penampung Air Lainnya	1. Jumlah Embung dan Penampung Air Lainnya yang Dioperasikan dan Dipelihara : 2. Pemeliharaan Rutin Embung/Telaga : 3. Pengamanan & Pengendalian Embung/Telaga : 4. Padat Karya Penciptaan Lapangan Pekerjaan Embung/Telaga 1Embung/Telaga (DID): 5. Pemeliharaan Berkala Pada Embung/Telaga (DID) 2 Embung/ Telaga :	25 Unit 25 Unit 25 Unit 1 unit 2 unit	25 Unit 25 Unit 25 Unit 1 unit 2 unit	100

NO	Program	Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Target	realisasi	% Capaian
1.1.3		Pengelolaan Hidrologi dan Kualitas Air WS Kewenangan Provinsi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah Dokumen Pengelolaan Sistem Hidrologi dan Kualitas Air WS Kewenangan Provinsi : 2. Operasi dan Pemeliharaan 64 Pos Hidrologi : 3. Pengumpulan dan Pengelolaan Data SISDA : 	2 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen	2 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen	100
1.1.4		Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Provinsi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Provinsi yang Dibina dan Diberdayakan : 2. Rekomendasi kebijakan pengelolaan irigasi di DIY Melalui Komisi Irigasi : 3. Rekomendasi kebijakan sumber daya air melalui Dewan SDA : 	2 Lembaga 1 Lembaga 1 Lembaga	2 Lembaga 1 Lembaga 1 Lembaga	100
1.1.5		Evaluasi dan Rekomendasi Teknis (Rekomtek) Pemanfaatan SDA WS Kewenangan Provinsi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah Dokumen Evaluasi dan Rekomendasi Teknis (Rekomtek) Pemanfaatan SDA WS Kewenangan Provinsi yang Disusun : 2. Rekomendasi Teknis (Rekomtek) Pemanfaatan SDA DIY : 	1 Dokumen 1 Dokumen	1 Dokumen 1 Dokumen	100
1.2		Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha-3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota				100
1.2.1		Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Ditingkatkan : 2. Pembangunan talud Padukuhan Sembung RT.03 RW. 30 , Balecatur, Gamping, Sleman : 3. Pembangunan talud Padukuhan Sembung RT.04 RW. 30 , Balecatur ,Gamping, 	1.93 KM 0.06 KM 0.35 KM 0.15 KM 0.15 km 0.16 KM 0.15 KM 0.15 KM 0.2 KM 0.25 KM 0.05 KM 0.1 KM 0.16 KM	2.66 KM 0.06 KM 0.39 KM 0.1 KM 0.14 km 0.39 KM 0.204 KM 0.3186 KM 0.375 KM 0.045 KM 0.1 KM 0.13 KM	100

NO	Program	Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Target	realisasi	% Capaian
			<p>Sleman :</p> <p>4. Peningkatan jaringan irigasi Padukuhan Kragilan, Sinduadi, Mlati, Sleman :</p> <p>5. Peningkatan Jaringan Irigasi Kalurahan Sardonoharjo, Ngaglik, Sleman :</p> <p>6. Peningkatan Jaringan Irigasi Kalurahan Sendangtirto, Berbah, Sleman :</p> <p>7. Peningkatan Jaringan Irigasi Padukuhan Dukuh, Ngestiharjo, Wates, Kulon Progo :</p> <p>8. Peningkatan Jaringan Irigasi Padukuhan Karang, Poncosari, Srandakan, Bantul :</p> <p>9. Peningkatan Jaringan Irigasi Padukuhan Kuncen, Bendungan, Wates, Kulon Progo :</p> <p>10. Peningkatan Jaringan Irigasi Padukuhan Pogung Lor, Sinduadi, Mlati, Sleman :</p> <p>11. Peningkatan Jaringan Irigasi Tersier DI Blawong :</p> <p>12. Peningkatan Jaringan Irigasi Tersier DI Mergangsan :</p> <p>13. Peningkatan Jaringan Irigasi Tersier DI Pendowo :</p> <p>14. Peningkatan Jaringan Irigasi Daerah Irigasi Pijenan/Kamijoro (DID) :</p>	<p>0.05 KM</p> <p>0.1 km</p>	<p>386 KM</p> <p>0.37 km</p>	
1.2.2		Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	<p>1. Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi :</p> <p>2. Rehabilitasi Jaringan Irigasi Daerah Irigasi Payaman :</p> <p>3. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi kegiatan DAK Bidang Irigasi Wilayah DIY :</p> <p>4. Updating Database ePAKSI :</p>	<p>1.6 KM</p> <p>1.6 KM</p> <p>1</p> <p>Dokumen</p> <p>1</p> <p>dokumen</p>	<p>1.6 KM</p> <p>1.6 KM</p> <p>1</p> <p>Dokumen</p> <p>1</p> <p>dokumen</p>	100

NO	Program	Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Target	realisasi	% Capaian
1.2.3		Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara : 2. Operasi Jaringan Irigasi Daerah Irigasi Kewenangan DIY : 3. Pemeliharaan Berkala Jaringan Irigasi DI Sembuh : 4. Pemeliharaan Rutin Jaringan Irigasi Daerah Irigasi Kewenangan DIY : 5. Pengamanan & Pengendalian Jaringan Irigasi Daerah Irigasi Kewenangan DIY : 6. Padat Karya Penciptaan lapangan Pekerjaan di Daerah Irigasi 3.1 KM (DID) : 	511.77 KM 511.77 KM 0.2 KM 511.77 KM 511.77 KM 3.1 KM	511.77 KM 511.77 KM 0.2 KM 511.77 KM 511.77 KM 3.1 KM	100
1.2.4		Operasi dan Pemeliharaan Bendung Irigasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah Bendung Irigasi yang Beroperasi dan Dipelihara : 2. Operasi Bendung Irigasi Kewenangan DIY : 3. Pemeliharaan Berkala Bendung : 4. Pemeliharaan Rutin Bendung Irigasi Kewenangan DIY : 	67 Bendung 67 Bendung 67 Bendung 67 Bendung	67 Bendung 67 Bendung 67 Bendung 67 Bendung	100
1.2.5		Pengelolaan dan Pengawasan Alokasi Air Irigasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah Daerah Irigasi yang Mengelola Pengukuran Data Realisasi Alokasi Air : 2. Pengelolaan dan Pengawasan Alokasi Air Irigasi di Daerah Irigasi Kewenangan DIY : 	41 DI 41 DI	41 DI 41 DI	100

Tabel III.25. Kinerja Program Sasaran 3

No	Program	Indikator	Capaian 2022	2023			Target Akhir Renstra (2023)	Capaian s/d 2023 terhadap p 2026 (%)
				Target	Realisasi	% Realisasi		
1	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Meningkatnya Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Kewenangan DIY	10,99 %	12,51 %	13,11 %	104,80	44,91 %	29,19

No	Program	Indikator	Capaian 2022	2023			Target Akhir Renstra (2023)	Capaian s/d 2023 terhadap p 2026 (%)
				Target	Realisasi	% Realisasi		
2		Meningkatnya ketersediaan air melalui infrastruktur sumber daya air	566,01 liter/detik	576,01 liter/detik	586,37 liter/detik	101,80	59851 liter/detik	97,97

Sumber : DPUPESDM DIY, 2023

Tabel III.26. Kinerja Keuangan dan Fisik Program Dan Kegiatan Sasaran 3

NO	Program/ Sub Kegiatan	Pagu (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Keu (%)	Fisik (%)
1	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	34.731.563.333	31.767.658.253	91,47	100
1.1	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota	6.752.741.800	6.671.343.911	99,81	100
1.1.1	Pembangunan Sumur Air Tanah untuk Air Baku	625.000.000	618.586.765	89,70	100
1.1.2	Operasi dan Pemeliharaan Embung dan Penampung Air Lainnya	4.097.241.800	4.065.844.247	85,76	100
1.1.3	Pengelolaan Hidrologi dan Kualitas Air WS Kewenangan Provinsi	1.491.500.000	1.482.556.252	75,71	100
1.1.4	Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Provinsi	500.000.000	465.431.144	98,32	100
1.1.5	Evaluasi dan Rekomendasi Teknis (Rekomtek) Pemanfaatan SDA WS Kewenangan Provinsi	39.000.000	38.925.503	98,30	100
1.2	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha-3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota	27.978.821.533	25.096.314.342	99,99	100
1.2.1	Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan	3.386.500.000	2.904.100.021	99,81	100
1.2.2	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	8.825.001.000	6.681.549.362	89,70%	100
1.2.3	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	13.737.693.333	13.507.008.743	85,76%	100
1.2.4	Operasi dan Pemeliharaan Bendung Irigasi	1.523.929.200	1.498.002.671	75,71%	100
1.2.5	Pengelolaan dan Pengawasan Alokasi Air Irigasi	505.698.000	505.653.545	98,32%	100
	JUMLAH :	34.731.563.333	31.767.658.253	91,47	100

Sumber : DPUPESDM DIY, 2023

Tabel III.27. Analisa Penyebab Keberhasilan Sasaran 3

No	Indikator	Pendorong	Penghambat	Solusi
1	Persentase penyediaan infrastruktur sumber daya air	<ul style="list-style-type: none"> Koordinasi yang baik dengan pihak-pihak dan stakeholder terkait, baik kalurahan, P3A, Dinas-dinas PU, Pertanian kab/kota, Kalurahan, LPMK, serta organisasi lainnya Kegiatan Operasi dan pemeliharaan infrastruktur SDA, baik irigasi maupun embung yang dilaksanakan untuk menjaga kondisi fisik Infrastruktur SDA terlaksana dengan baik Ketersediaan Data yang cukup melalui e-PAKSI (Pengelolaan Aset dan Kinerja Sistem Irigasi), AKNPI (Angka Kebutuhan Nyata Pengelolaan Irigasi), AKNOP embung, go Hidro, dan aplikasi web SISDA 	<ul style="list-style-type: none"> Cuaca, kondisi alam, yang mengakibatkan terjadinya penurunan kondisi infrastruktur Pembangunan Embung kewenangan DIY, belum dilaksanakan, dikarenakan kendala perencanaan lokasi tanah untuk embung, sebagian besar masih ada di Tanah Kas Desa (TKD) sehingga memerlukan proses yang panjang Sumur bor dari target usulan 50 titik, realisasi anggaran hanya dilaksanakan 23 titik, di Gunung Sewu 15 titik, di Menoreh 7 titik, serta 1 titik di Sleman, total= 23 titik Faktor Kondisi Geologi bawah tanah yang sukar diprediksi, kadang tidak sesuai perencanaan (geolistrik), sehingga kadang titik sumur bor dimungkinkan berpindah sehingga mempengaruhi pelaksanaan konstruksi 	<ul style="list-style-type: none"> Melalui kegiatan OP baik Irigasi, embung, Drainase, menjaga kondisi fungsi Infrastruktur SDA Berkoordinasi dengan pihak terkait terkait Pengelolaan TKD Memaksimalkan debit sumur per titik, supaya melebihi target debit Persiapan pelaksanaan Konstruksi yang matang agar pelaksanaan bisa meminimalisir titik sumur yang tidak keluar air.

Sumber : DPUPESDM DIY, 2023

Gambar III.4 Foto Kegiatan Konstruksi Peningkatan Jaringan Irigasi





Kegiatan Rutin Angkat Sedimen Operasi dan pemeliharaan Embung dan Penampung Air Lainnya



Kegiatan Pengamanan dan Pengendalian Operasi dan pemeliharaan Embung dan Penampung Air Lainnya



proses pengukuran debit secara manual di sungai



proses pengukuran debit dengan alat *Qliner* di sungai

Gambar III.5 Foto Kegiatan Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota



Peningkatan Jaringan Irigasi di Sardonoarjo, Ngaglik, Sleman



Peningkatan Jaringan Irigasi Wilayah Kulon Progo (2 lokasi, Ngestiharjo & Bendungan, Wates)



Peningkatan Jaringan Irigasi Tersier Wilayah Bantul Selatan (3 lokasi : Padukuhan Karang, Pongcosari, Srandakan, DI Blawong & DI Pendowo Bantul)



Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Payaman (DAK)



Gambar III.6. Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha-3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota



Gambar III.7 Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan Kawasan Strategis Provinsi



Gambar III.8 Kegiatan Pengembangan Lumbung Mataraman



Sumber : DPUPESDM DIY, 2023

1.1.4. Sasaran 4 : Peningkatan aksesibilitas Jalan

Dalam usaha untuk pelayanan perkembangan kebutuhan ekonomi masyarakat perlu diakomodasi oleh sistem infrastruktur yang tepat bagi masing-masing tingkat perkembangan maupun potensi yang dimiliki disetiap satuan wilayah. Pemahaman mengenai kebutuhan dan efektivitas pelaksanaan program pembangunan infrastruktur bidang pekerjaan umum tersebut mutlak diperlukan agar lebih menghasilkan manfaat, Terutama prasarana jalan yang memainkan peran penting sebagai prasarana distribusi lalu lintas barang dan manusia maupun sebagai salah satu prasarana pembentuk struktur ruang wilayah. Baik itu nantinya dengan peningkatan kapasitas dan struktur prasarana jalan yang ada atau dengan pembangunan jalan baru. Selain itu perlunya perhatian khusus bagi daerah-daerah perbatasan dan semi terinsolir untuk mendapatkan aksesibilitas sarana jalan secara maksimal sehingga meningkatkan kelancaran dalam arus kegiatan baik sosial maupun ekonomis yang diharapkan berdampak terhadap kemajuan dan perkembangan wilayah tersebut.

Kinerja sasaran Peningkatan aksesibilitas Jalan diukur dengan indikator Peningkatan aksesibilitas Jalan. Penjelasan hubungan sasaran, indikator dan meta indikator adalah sebagai berikut:

Tabel III.28. Rumusan Indikator dan Formulasi Perhitungan Sasaran 4

No	Sasaran	Indikator	Meta Indikator
1	2	3	4
1	Peningkatan aksesibilitas Jalan	Peningkatan persentase aksesibilitas Jalan	Total Panjang SK Jalan Provinsi terbangun (662,68 km) + Total Panjang SK Jalan Nasional di DIY terbangun (307,25km) + Total Panjang Jalan baru yang direncanakan terbangun sampai akhir tahun anggaran 2027 (RPJMD 2022 – 2027)

Tabel III.29. Target dan Realisasi Kinerja Sasaran 4

No	Sasaran	Indikator	Capaian 2022	2023			Target Akhir Renstra (2023)	Capaian s/d 2023 terhadap 2026 (%)
				Target	Realisasi	% Realisasi		
1	Peningkatan aksesibilitas Jalan <u>Meta Indikator:</u> Total Panjang SK Jalan Provinsi terbangun (662,68 km) + Total Panjang SK Jalan Nasional di DIY	Peningkatan persentase aksesibilitas jalan	100,66 %	97,8 %	99,175	101,4	100 %	99.175 / (99,175/100)X 100%)

No	Sasaran	Indikator	Capaian 2022	2023			Target Akhir Renstra (2023)	Capaian s/d 2023 terhadap 2026 (%)
				Target	Realisasi	% Realisasi		
	terbangun (307,25km) + Total Panjang Jalan baru yang direncanakan terbangun sampai akhir tahun anggaran 2027 (RPJMD 2022 – 2027)				km) x 100%			

Sumber : Dinas PUPESDM DIY 2023

Analisis Ketercapaian Sasaran 4: Peningkatan aksesibilitas Jalan adalah sebagai berikut:

- a. Tercapai 99,175 %, dengan demikian prosentase realisasi terhadap target sebesar 101,4% (terlampau).
- b. Dibandingkan realisasi tahun lalu sebesar 46,38 %, terdapat kenaikan sebesar 27,05 %.
- c. Capaian target indikator pada tahun 2023 terhadap target tahun 2026 adalah 99,175%

Untuk meningkatkan konektivitas antar wilayah pada pusat-pusat produksi, sangat Realisasi sampai dengan akhir Tahun 2023 yaitu terdapat penambahan panjang jalan nasional dan jalan provinsi sepanjang 15,03 km. Total kebutuhan panjang jalan yang direncanakan = Total Panjang SK Jalan Provinsi terbangun (662,68 km) + Total Panjang SK Jalan Nasional di DIY terbangun (307,25 km) + Total Panjang Jalan baru yang direncanakan terbangun sampai akhir tahun anggaran 2027 (RPJMD 2022 – 2027) = 1021,36 km Pada akhir Tahun 2023, total Panjang jalan baru yang direncanakan terbangun dari target 7,83 km realisasinya menjadi 15,03 km. Realisasi sepanjang 15,03 km tersebut yaitu : Pembangunan Jalan Ruas Tawang - Ngalang Segmen 2 & 3 direncanakan 2,83 km terbangun 2,83 km, Pembangunan JLS segmen Tepus - Jerukwudel Tahap II direncanakan sepanjang 5,00 km terbangun 10,925 km, Pembangunan Jalan Prambanan- Gayamharjo direncanakan sepanjang 0 km terbangun sepanjang 1,275 km. Sehingga pada akhir tahun 2023, total Panjang yang terbangun yang direncanakan sebelumnya sepanjang 1.005,74 km bertambah menjadi 1.012,93 km

Formulasi perhitungannya adalah jumlah panjang jalan nasional dan jalan provinsi yang tersedia dibagi dengan kebutuhan panjang jalan yang direncanakan x 100 % = $(1.012,93 \text{ km} / 1.021,36 \text{ km}) \times 100\% = 99,17 \%$.

Untuk penambahan jalan provinsi ditargetkan sepanjang 2,83 km yaitu Pekerjaan Pembangunan Jalan dan Jembatan Ruas Tawang-Ngalang Segmen 2 dan Segmen 3 yang saat ini sedang dalam proses pelaksanaan konstruksi dengan progres sebesar 100 %. Untuk penambahan jalan nasional ditargetkan sepanjang 5,00 km yaitu Pekerjaan Pembangunan Jalan Baru Tepus-Jerukwudel Tahap II yang saat ini sedang dalam proses pelaksanaan konstruksi dengan progres sebesar 100 % Dan melalui Inpres Jalan Daerah, adanya penambahan pembangunan jalan sepanjang 1,275 km yaitu Pekerjaan Pembangunan Jalan Prambanan-Gayamharjo yang saat ini sedang dalam proses pelaksanaan konstruksi dengan progres sebesar 100%

Pada Tahun 2022 terdapat Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor: 1688/KPTS/M/2022 tanggal 2 Desember 2022 tentang Penetapan Ruas Jalan Menurut Statusnya sebagai Jalan Nasional dimana terdapat perubahan Panjang Jalan Nasional di DIY yang semula 247,91 KM menjadi 307,23 KM. Perubahan Panjang tersebut juga dibarengi dengan adanya ruas jalan yang Upgrade (semula berstatus Jalan Provinsi/Kabupaten menjadi berstatus Jalan Nasional) dan Downgrade (semula berstatus Jalan Nasional menjadi berstatus Jalan Provinsi/Kabupaten). Sehingga terdapat perubahan baseline Panjang jalan pada TA. 2022 dengan TA. 2023.

Pada Tahun 2023, untuk menindak lanjuti Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor: 1688/KPTS/M/2022 tanggal 2 Desember 2022 tentang Penetapan Ruas Jalan Menurut Statusnya sebagai Jalan Nasional, Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta mengeluarkan Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 41/KEP/2023 tanggal 2 Februari 2023 tentang Penetapan Ruas Jalan menurut Statusnya sebagai Jalan Provinsi. Pada perubahan SK Status Jalan DIY Tahun 2023 terdapat perbedaan Panjang dari yang sebelumnya sepanjang 760,450 KM menjadi sepanjang 674,585 KM. Perubahan Panjang tersebut juga dibarengi dengan adanya ruas jalan yang Upgrade (semula berstatus Jalan Kabupaten menjadi berstatus Jalan Provinsi dan atau semula berstatus Jalan Provinsi menjadi berstatus Jalan Nasional) dan Downgrade (semula berstatus Jalan Nasional menjadi berstatus Jalan Provinsi dan atau semula berstatus Jalan Provinsi menjadi berstatus Jalan Kabupaten). Adanya perubahan ruas akibat upgrade dan

downgrade dalam penyusunan SK status tersebut berpengaruh kedalam prosentase kemandapan jalan. Contoh : Ruas Jalan Provinsi yang masuk kedalam Jalur Jalan Lintas Selatan (JJLS) yang mayoritas mempunyai kondisi jalan “baik” pada SK Gubernur Nomor 41/KEP/2023 tanggal 2 Februari 2023 tentang Penetapan Ruas Jalan menurut Statusnya sebagai Jalan Provinsi tidak lagi masuk kedalam status jalan Provinsi karena menurut Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor: 1688/KPTS/M/2022 tanggal 2Desember 2022 tentang Penetapan Ruas Jalan Menurut Statusnya sebagai Jalan Nasional, Ruas Jalan JJLS tersebut masuk menjadi Jalan yang berstatus Jalan Nasional.

Kondisi Kemandapan Jalan Provinsi sampai akhir Tahun 2023, hasil dari Survei Kondisi Jalan yang dilaksanakan pada kegiatan TA. 2023 terlampir pada tabel 2.22. Pelaksanaan kegiatan survei dan pengumpulan data berdasarkan metode sesuai Se Menteri PUPR RI No. 01/SE/M/2023 tentang Panduan Penggunaan Aplikasi PKRMS (Provincial Kabupaten Management System). Hal ini berubah dengan metode sebelumnya yaitu SDI (Surface Distress Index).

Tabel III.30. Kondisi Jalan Provinsi Tahun 2023

No	Kondisi Jalan	Panjang Jalan		Kondisi Jalan	Panjang Jalan	
		km	%		km	%
1	Mantap	476,135	70,582	Baik	311,526	46,180
				Sedang	164,609	24,402
2	Tidak Mantap	198,450	29,418	Rusak Ringan	170,450	25,267
				Rusak Berat	28,000	4,151
JUMLAH		674,584	100,00	Jumlah	674,584	100,00

Sumber: Dinas PUPESDM DIY, 2023

Penyusunan target Renstra pada tahun 2023 senilai 68,61 % menggunakan SK Jalan Lama. Apabila Penanganan Jalan Provinsi yang dilakukan pada tahun 2023 di plotkan sesuai SK Jalan Lama, maka pada akhir tahun 2023 nilai kemandapan Jalan Provinsi DIY yaitu 73,286%. Namun dikarenakan terdapat perubahan sk dengan adanya perbedaan komposisi ruas jalan yang berbeda serta adanya perubahan metode yang digunakan, yaitu dari SDI (Surface Distress Index) menjadi menggunakan metode sesuai Se Menteri PUPR RI No. 01/SE/M/2023 tentang Panduan Penggunaan Aplikasi PKRMS (Provincial Kabupaten Management System) dalam kegiatan Survei Kondisi Jalan sehingga didapatkan hasil Nilai Kemandapan Jalan Provinsi sampai Desember 2023 senilai 70,582 %.

Keberhasilan capaian Sasaran 4, dengan Indikator Peningkatan aksesibilitas Jalan tersebut didukung oleh keberhasilan program, kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut:

Tabel III.31. Capaian Program, Kegiatan, dan SubKegiatan terhadap Sasaran 4

NO	Program	Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Target	realisasi	%Capaian
1	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN		Persentase kemandapan jalan	68,61 %	71,58 %	104,32
1.1		Penyelenggaraan Jalan Provinsi				
1.1.1		Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	1. Tersusunnya rekomendasi teknis pemanfaatan bagian-bagian jalan :	50 dokumen	108 dokumen	100%
1.1.2		Survey Kondisi Jalan/Jembatan	1. Survey Kondisi Jalan dan Jembatan : 2. Penyusunan Dokumen Survey Kondisi Jalan (IRMS) : 3. Penyusunan Dokumen Survey Kondisi Jembatan (BMS) :	2 Dokumen 1 dokumen 1 dokumen	2 Dokumen 1 dokumen 1 dokumen	100%
1.1.3		Rehabilitasi Jalan	1. Panjang Jalan yang Direhabilitasi : 2. Panjang Jalan yang Direhabilitasi : 3. Panjang Jalan yang Direhabilitasi : 4. Panjang Jalan yang Direhabilitasi : 5. Rehabilitasi Jalan Ruas Patuk-Terong : 6. Penggantian Jembatan Bajing : 7. Preservasi Jalan Ruas Deggung-Wonorejo-Tambakan: 8. Rehabilitasi Jalan Ruas Yogyakarta-Kaliurang : 9. Preservasi Jalan Ruas Karangnongko-Nagung-Cicikan : 10. DED Ruas Jalan	6.85 km 6 m 1.5 km 1 km 1.5 km 6 m 2.5 km 1.3 km 3.05 km dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen	6.85 km 6 m 1.5 km 1 km 1.5 km 6 m 2.5 km 1.3 km 3.05 km 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen	100%

NO	Program	Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Target	realisasi	%Capaian
			Wonosari-Karangmojo :	1	1	
			11. DED Ruas Jalan Yogyakarta-Bakulan (Parangtritis) :	dokumen	dokumen	
			12. DED Ruas Jalan Demak Ijo-Kebonagung 1 Sepanjang 3 KM :	1	1	
			13. DED Ruas Jalan Imogiri-Dodogan Sepanjang 3 KM :	dokumen	dokumen	
			14. DED Ruas Jalan Klamong-Tempel Sepanjang 3 KM :	1	1	
			15. DED Ruas Jalan Ngablak-Bawuran Sepanjang 1,03 KM :	dokumen	dokumen	
			16. DED Ruas Jalan Sentolo-Brosot-Ngreng Sepanjang 3 KM :	0.05 km	0.05 km	
			17. DED Ruas Jalan Terong-Dlingo Sepanjang 3 KM :	1 km	1 km	
			18. DED Ruas Jalan Yogyakarta-Kaliurang Sepanjang 3 KM :			
			19. Dokumen Lingkungan Pekerjaan Pelebaran Jalan Menuju Standar Ruas Brosot-Toyan Sepanjang 3 KM :			
			20. Dokumen Lingkungan Pekerjaan Pelebaran Jalan Menuju Standar Ruas Imogiri-Dodogan Sepanjang 2 KM :			
			21. Dokumen Lingkungan Pekerjaan Pelebaran Jalan Menuju Standar Ruas Patuk-Terong Sepanjang 4,5 KM :			
			22. Dokumen Lingkungan Pekerjaan Pelebaran Jalan Menuju Standar Ruas Wonosari-Mulo Sepanjang 4,9 KM :			

NO	Program	Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Target	realisasi	%Capaian
			23. Dokumen Lingkungan Pekerjaan Rekonstruksi Jalan Ruas Gading-Playen Sepanjang 2,83 KM : 24. Rehabilitasi Bangunan Pelengkap Ruas Jalan Ngablak-Bawuran Sepanjang 0,05 KM : Rehabilitasi Jalan Ruas Yogyakarta-Bakulan (Parangtritis):			
1.1.4		Pemeliharaan Rutin Jalan	1. Panjang Jalan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Rutin : 674.585 km dari 674.585 km 2. Pemeliharaan Rutin Jalan di Kabupaten Bantul : 152.685 km dari 152.685 km 3. Pemeliharaan Rutin Jalan di Kabupaten Gunungkidul : 244.905 km dari 244.905 km 4. Pemeliharaan Rutin Jalan di Kabupaten Kulon Progo : 154.44 km dari 154.44 km 5. Pemeliharaan Rutin Jalan di Kabupaten Sleman : 122.555 km dari 122.555 km 6. Operasional Underpass Kulur dan YIA : 1 Tahun dari 1 Tahun	674.585 km 152.685 km 244.905 km 154.44 km 122.555 km 1 Tahun	674.585 km 152.685 km 244.905 km 154.44 km 122.555 km 1 Tahun	100%
1.1.5		Pemeliharaan Rutin Jembatan	1. Panjang Jembatan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Rutin : 2. Pemeliharaan Rutin Jembatan di Kabupaten Bantul : 3. Pemeliharaan Rutin Jembatan di Kabupaten Gunungkidul : 4. Pemeliharaan Rutin Jembatan di Kabupaten Kulon Progo :	6477 m 1545.2 m 1698.4 m 2089.7 m 1143.7 m	6477 m 1545.2 m 1698.4 m 2089.7 m 1143.7 m	100%

NO	Program	Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Target	realisasi	%Capaian
			5. Pemeliharaan Rutin Jembatan di Kabupaten Sleman :			
2	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN TATA RUANG		Terlaksananya penambahan jaringan jalan baru	2.83 km	2.83 km	100
			Terlaksananya pengadaan tanah untuk penyelenggaraan jalan	83101.34 m2	0 m2	0
			Terlaksananya peningkatan jalan	10.52 km	0 km	0
			Terlaksananya pembangunan jembatan	12 m	0 km	0
			Terlaksananya pemasangan patok aset tanah JJLS	1060 buah	550 buah	51,89
			Terlaksananya tahapan pengadaan tanah	1 dok	0	0
			Terlaksananya rehabilitasi jalan	0 km	0	0
2.1		Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten				
2.1.1		Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Pantai Selatan Gunungkidul	<ol style="list-style-type: none"> Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Pantai Selatan : FS Aksesibilitas PPI Gesing : DED Aksesibilitas PPI Gesing : Pengamanan Aset Tanah JJLS di Gunungkidul : Proses Pensertifikatan JJLS : Penyusunan Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah Jembatan Pandansimo : Pengadaan Tanah Jembatan Pandansimo : 	6 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 550 buah 1 ls 1 Dokumen 4251 M2	6 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 550 buah 1 ls 1 Dokumen 4246 M2	100%
2.1.2		Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Karst Gunung Sewu	<ol style="list-style-type: none"> Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Karst Gunung Sewu : 	5 dokumen 2.83 KM 57808 M2 1	5 dokumen 2.83 KM 55969 M2 1	100%

NO	Program	Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Target	realisasi	%Capaian
			2. Pembangunan Jalan dan Jembatan Ruas Tawang - Ngalang Segmen 2 & 3 : 3. Pembebasan Tanah untuk Pembangunan Ruas Jalan Hargomulyo - Watugajah : 4. Penyusunan Dokumen Lingkungan Pembangunan Ruas Jalan Hargomulyo - Watugajah : 5. DED Bangunan Pelengkap Ruas Jalan Gayamharjo - Gading : 6. Penyediaan Air Bersih Dari Air Tanah Dalam (15 Titik Sumur Bor Dan 150 Titik Sumur Resapan) :	Dokumen 1 Dokumen 165 Titik	Dokumen 1 Dokumen 165 Titik	
2.1.3		Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kawasan Candi Prambanan - Candi Ijo	1. Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kawasan Candi Prambanan - Candi Ijo : 2. DED Jembatan Gayamharjo III :	1 Dokumen 1 Dokumen	1 Dokumen 1 Dokumen	100%

Tabel III.32. Kinerja Program Sasaran 4

No	Program	Indikator	Capaian 2022	2023			Target Akhir Renstra (2023)	Capaian s/d 2023 terhadap 2026 (%)
				Target	Realisasi	% Realisasi		
1	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Persentase kemantapan jalan	75,26 %	68,61 %	71,58 %	104,32	70,41	101,66
2	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN TATA RUANG	Terlaksananya penambahan jaringan jalan baru	N/A	2.83 km	2.83 km	100	6,23 Km	45,42
		Terlaksananya pengadaan tanah untuk	N/A	83101.34 m2	0 m2	0	206.348,72 m2	0

No	Program	Indikator	Capaian 2022	2023			Target Akhir Renstra (2023)	Capaian s/d 2023 terhadap 2026 (%)
				Target	Realisasi	% Realisasi		
		penyelenggaraan jalan						
		Terlaksananya peningkatan jalan	N/A	10.52 km	0 km	0	52,22 Km	0
		Terlaksananya pembangunan jembatan	N/A	12 m	0 km	0	12 m	0
		Terlaksananya pemasangan patok aset tanah JJLS	N/A	1060 buah	550 buah	51,89	1060 buah	51,89
		Terlaksananya tahapan pengadaan tanah	N/A	1 dok	0	0	1 dok	0
		Terlaksananya rehabilitasi jalan	N/A	0 km	0	0	4 km	0

Tabel III.33. Kinerja Keuangan dan Fisik Program Dan Kegiatan Sasaran 4

NO	Program/ Kegiatan	Pagu (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Keu (%)	Fisik (%)
1	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN				
1.1	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	30.000.000	29.715.367	99.05%	100%
1.2	Survey Kondisi Jalan/Jembatan	723.614.700	721.476.485	99.7 %	100%
1.3	Pelebaran Jalan Menuju Standar	0	0	0	0
1.4	Rehabilitasi Jalan	60.299.126.290	56.510.158.346	93.72 %	100%
1.5	Pemeliharaan Rutin Jalan	19.685.065.800	19.409.668.982	98.6 %	100%
1.6	Pemeliharaan Rutin Jembatan	2.147.103.550	2.141.120.851	99.72 %	100%
	JUMLAH	82.884.910.340	82.884.910.340	95.09 %	100%
2	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN TATA RUANG				
2.1	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Pantai Selatan Gunungkidul	3.630.291.000	2.674.781.076	73.68%	100%
2.2	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Karst Gunung Sewu	125.479.681.700	125.232.102.992	99.8%	100%
2.3	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kawasan Candi Prambanan - Candi Ijo	289.022.650	288.901.330	99.96%	100%
	JUMLAH	129,398,995,350	128,195,785,398	99.07%	100%

Sumber : DPUPESDM DIY, 2023

Tabel III.34. Analisa Penyebab Keberhasilan Sasaran 4

No	Indikator	Pendorong	Penghambat	Solusi
1	Peningkatan persentase aksesibilitas Jalan	Adanya dukungan penuh dari pemerintah, baik pemerintah daerah maupun pemerintah pusat, terutama dengan didaptkannya dana penanganan jalan dari Inpres Jalan Daerah (IJD) untuk Jalan Provinsi di DIY.	Pelaksanaan Penanganan Jalan dalam satu wilayah yang berbarengan dari Pemerintah Pusat dan atau Pemerintah Kabupaten	Peningkatan tata kelola dan koordinasi schedule konstruksi dan pemrograman penanganan jalan antar pengampu Jalan di DIY (baik berstatus Jalan Nasional, Kabupaten dan Provinsi)
		Adanya dukungan penuh dari pemerintah, baik pemerintah daerah maupun pemerintah pusat, terutama dengan didaptkannya dana penanganan jalan dari Inpres Jalan Daerah (IJD), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Insentif Fiskal (IF) untuk Jalan Provinsi di DIY	1. Meningkatnya beban volume lalu lintas yang melintasi ruas jalan provinsi - Dilalui kendaraan pengangkut material tambang sehingga membuat beberapa jalan provinsi lebih cepat mengalami kerusakan 2. Kondisi tanah pada beberapa ruas jalan provinsi yang tidak stabil	Adanya Kegiatan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan untuk mempertahankan kondisi jalan baik dan sedang.

Sumber : DPUPESDM DIY, 2023

Gambar III.9 Foto Kegiatan Urusan Penyelenggaraan Jalan





Sumber : DPUPESDM DIY, 2023

Gambar III.10 Foto Kegiatan Urusan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Tata Ruang



Sumber : DPUPESDM DIY, 2023

1.1.5. Sasaran 5: Peningkatan kinerja jasa konstruksi

Kinerja sasaran Peningkatan kinerja jasa konstruksi diukur dengan Peningkatan persentase pembinaan kinerja jasa konstruksi. Penjelasan hubungan sasaran, indikator dan meta indikator adalah sebagai berikut:

Tabel III.35. Rumusan Indikator dan Formulasi Perhitungan Sasaran 5

No	Sasaran	Indikator	Meta Indikator
1	2	3	4
1	Peningkatan kinerja jasa konstruksi	Peningkatan persentase pembinaan kinerja jasa konstruksi	Capaian terlayannya masyarakat jasa konstruksi melalui pelatihan dan pengelolaan sistem informasi x 35%) + (Capaian layanan pengujian konstruksi atau laporan hasil uji (LHU) yang diterbitkan x 35%) + (Capaian terlayannya rekomendasi analisis perkiraan biaya bangunan dan pendampingan penyelenggaraan bangunan gedung negara x 30%)

Sumber : DPUPESDM DIY, 2023

Sesuai Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang ditegaskan kembali dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi, dan PP Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi, Kewenangan Pemerintah Daerah provinsi pada sub-urusan Jasa Konstruksi, meliputi:

1. Penyelenggaraan pelatihan tenaga ahli konstruksi;
2. Penyelenggaraan sistem informasi Jasa Konstruksi cakupan daerah provinsi;
3. Penetapan dan Penyelenggaraan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi.

Berlandaskan ketentuan tersebut, sasaran peningkatan kinerja penyelenggaraan jasa konstruksi dirumuskan ke dalam indikator persentase capaian program, yang dihitung menggunakan 3 (tiga) sub-capaian kinerja yang meliputi:

1. Peningkatan kinerja tenaga konstruksi dan masyarakat jasa konstruksi, dengan bobot 35%
2. Sertifikat/Laporan Hasil Uji yang diterbitkan, dengan bobot 35%
3. Persentase terlayannya rekomendasi analisis perkiraan biaya bangunan dan pendampingan penyelenggaraan bangunan gedung negara dengan bobot 30%.

Rincian perhitungan capaian kinerja peningkatan kinerja jasa konstruksi disajikan sebagai berikut:

a. **Peningkatan kinerja tenaga konstruksi dan masyarakat jasa konstruksi dengan bobot 35%**

Jumlah capaian TA Konstruksi terlatih th berjalan / Jumlah target akhir 2026 x 50% + Jumlah orang terlayani melalui sistem informasi jasa konstruksi/Jumlah target akhir 2026 x 50% (Layanan SIPJAKI dg bobot 25% + penyebaran informasi & teknologi ke-PU-an dg bobot 25%)

$$= (1933 \text{ orang} / 2383 \text{ orang} \times 50\%) + ((20\% \text{ SIPJAKI}/80\%)*25\%) + ((1.323.942 \text{ orang}/686.726 \text{ orang})*25\%)$$

$$= 40,56\% + (6,25\% + 48,20\%)$$

$$= 95,01\%$$

b. **Sertifikat atau Laporan Hasil Uji (LHU) yang diterbitkan dengan bobot 35%**

Capaian LHU yang diterbitkan sampai dengan 31 Desember 2023 sebanyak 7.198 LHU dengan target akhir 2026 sebanyak 9195 LHU

$$= (7.198/9.195) = 78,28\%$$

c. **Persentase terlayannya rekomendasi analisis perkiraan biaya bangunan dan pendampingan penyelenggaraan bangunan gedung negara dengan bobot 30% =100%**

$$= 100\%$$

Sehingga a+b+c = (95,01*35%)+(78,28*35%)+(100*30%) = 90,65%

Uraian rinci untuk capaian indikator kinerja tersebut dapat disimak pada table III.51. di bawah ini :

Tabel III.36. Capaian Indikator Kinerja Sasaran 5

	Target		Bobot	Capaian pd th 2023 sj (Jan s.d Desember)	Capaian hingga Desember 2023	Meta Indikator (rumus hitungan)
	Target hingga akhir 2026	Target hingga akhir Th 2023				
Program Pengembangan Jasa Konstruksi						
Peningkatan kinerja tenaga konstruksi dan masyarakat jasa konstruksi	91,17%	63,48%	35%		95,01%	<i>(Jmlh Capaian TA Konstruksi yang terlatih th berjalan / Jmlh Target th 2026 x 50%) + (Prosentase Lay SI JasKon th berjalan x 50%)</i>
1. <u>Jumlah Tenaga Ahli Konstruksi yang terlatih</u>	2.383 Or g	1.933 Or g		15 Or g	1.933 Or g	<i>Jmlh Capaian TA Konstruksi yang terlatih th berjalan / Jmlh Target sd th 2026</i>

			Bobot	Capaian pd th 2023 s/d (Jan s.d Desember)	Capaian hingga Desember 2023	Meta Indikator (rumus hitungan)
	Target hingga akhir 2026	Target hingga akhir Th 2023				
2. <u>Persentase layanan sistem informasi jasa konstruksi</u>	100%	27,32%			54,45%	(Jmlh capaian org terlayani mell sistem informasi jasa konstruksi th berjalan / Jmlh Target th 2026 x 50%) + (Persentase layanan SIPJAKI x 50%)
a. Jumlah orang terlayani melalui sistem informasi jasa konstruksi (Layanan Klinik Konstruksi secara tatap muka dan melalui website)	686.72 Or 6 g	578.72 Or 6 g		78 Or 1.2 g 16	1.323.94 Or 2 g	
b. Persentase layanan SIPJAKI	80%	20%			20%	

			Bobot	Capaian pd th 2023 (Jan s.d Desember)	Capaian hingga Desember 2023	Meta Indikator (rumus hitungan)
	Target hingga akhir 2026	Target hingga akhir Th 2023				
Sertifikat/Laporan Hasil Uji yang diterbitkan	9195 LHU	800 LHU	35%	1203 LHU	7198 LHU	Jumlah Sertifikat/Laporan Hasil Uji (LHU) yang diterbitkan per tahun

			Bobot	Capaian pd th 2023 (Jan s.d Desember)	Capaian hingga Desember 2023	Meta Indikator (rumus hitungan)
	Target hingga akhir 2026	Target hingga akhir Th 2023				
Layanan kualitas penyelenggaraan bangunan gedung negara dan penataan bangunan	100%	100%	30%	100%	100%	Terlayannya rekomendasi analisis perkiraan biaya bangunan dan pendampingan penyelenggaraan bangunan gedung negara

Sumber : Dinas PUPESDM, 2023

Tabel III.37. Target dan Realisasi Kinerja Sasaran 5

No	Sasaran	Indikator	Capaian 2022	2023			Target Akhir Renstra (2023)	Capaian s/d 2023 terhadap 2026 (%)
				Target	Realisasi	% Realisasi		
1	Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Jasa Konstruksi	Peningkatan kinerja penyelenggaraan jasa konstruksi	N/A	57,12 %	90,65	158,70	100%	90,65
	<u>Meta Indikator</u> Peningkatan kinerja tenaga konstruksi dan masyarakat jasa konstruksi dengan bobot 35% + Sertifikat/Laporan				(95,01 %*35%)+(78,28%*35%)+(100%*30%)	(90,65/57,12)X 100%		(90,65/100)X 100%

No	Sasaran	Indikator	Capaian 2022	2023			Target Akhir Renstra (2023)	Capaian s/d 2023 terhadap 2026 (%)
				Target	Realisasi	% Realisasi		
	Hasil Uji yang diterbitkan dengan bobot 35% + Persentase terlayannya rekomendasi analisis perkiraan biaya bangunan dan pendampingan penyelenggaraan bangunan gedung negara dengan bobot 30%.							

Sumber : Data DPUPESDM DIY, 2023

Analisis Ketercapaian Sasaran 5: Peningkatan kinerja jasa konstruksi adalah sebagai berikut:

- Tercapai 90,65%, dengan demikian prosentase realisasi terhadap target sebesar 158,70% (terlampau).
- Tidak dapat dibandingkan dengan tahun lalu, karena perbedaan indikator sasaran dan meta indikator.
- Capaian target indikator pada tahun 2023 terhadap target tahun 2026 90,65%

Keberhasilan capaian Sasaran 5, dengan Indikator Peningkatan kinerja penyelenggaraan jasa konstruksi tersebut didukung oleh keberhasilan program, kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut:

Tabel III.38 Capaian Program, Kegiatan, dan SubKegiatan terhadap Sasaran 5

NO	Program	Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Target	realisasi	%Capaian
1	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI (BALAI PJK)		Peningkatan kinerja tenaga konstruksi dan masyarakat jasa konstruksi	63,48	95,01	149,67
			Sertifikat/ laporan hasil uji yang diterbitkan per tahun	800 LHU	1203 LHU	150,38
1.1		Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi				
1.1.1		Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi	1. Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Ahli yang Mengikuti Pelatihan :	125 Orang	150 Orang	100

NO	Program	Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Target	realisasi	%Capaian
1.1.2		Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Konstruksi	<ol style="list-style-type: none"> Jumlah Peserta yang Mengikuti Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Konstruksi : Akreditasi Laboratorium : Kalibrasi Alat Laboratorium : Pemeliharaan Alat Laboratorium : Pengadaan Alat dan Perlengkapan Laboratorium : 	800 Orang/LHU 1 Akreditasi 25 Jenis 15 Jenis 100 Jenis	1203 Orang/LHU 1 Akreditasi 25 Jenis 15 Jenis 100 Jenis	100
2.1		Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi (SIPJAKI) Cakupan Daerah Provinsi				
2.1.1		Penyediaan Data dan Informasi Jasa Konstruksi	<ol style="list-style-type: none"> Jumlah Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Provinsi : Penyebaran informasi dan teknologi ke-Puan : Penyusunan informasi teknis bahan bangunan : 	1 Dokumen 5 Laporan 10 SK	1 Dokumen 5 Laporan 10 SK	100
2	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG (DINAS PUPESDM)		Layanan kualitas penyelenggaraan bangunagedung negara dan penataan bangunan	100	100	100
2.1		Penetapan dan Penyelenggaraan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi				
2.1.1		Bantuan Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara untuk Kepentingan Strategis Provinsi	<ol style="list-style-type: none"> Jumlah Konsultasi Bantuan Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara untuk Kepentingan Strategis Provinsi : Dokumen dari 0 Dokumen Pendampingan pelaksanaan penyelenggaraan bangunagedung negara (10 Bangunan) : 	1 Dokumen 1 dokumen 1 Paket 1 dokumen	1 Dokumen 1 dokumen 1 Paket 1 dokumen	100

NO	Program	Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Target	realisasi	%Capaian
			3. Penyebarluasan informasi peraturan bangunan gedung (4 Kabupaten/1 Kota) : 4. Penyusunan rekomendasi teknis biaya pembangunan bangunan gedung negara (20 Rekomendasi) :			

Tabel III.39. Kinerja Program Sasaran 5

No	Program	Indikator	Capaian 2022 (%)	2023			Target Akhir Renstra (2023)	Capaian s/d 2023 terhadap 2026 (%)
				Target	Realisasi	% Realisasi		
1	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Peningkatan kinerja tenaga konstruksi dan masyarakat jasa konstruksi	101,41	63,48	95,01	149,67	91,17	104,21
2	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Sertifikat/ laporan hasil uji yang diterbitkan per tahun	944 LHU	800 LHU	1203 LHU	150,38	800 LHU	150,38
3	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Layanan kualitas penyelenggaraan bangunagedung negara dan penataan bangunan	N/A	100	100	100	100	100

Sumber : Data DPUPESDM DIY, 2023

Tabel III.40. Kinerja Keuangan dan Fisik Program Dan Kegiatan Sasaran 5

NO	Program/ Kegiatan	Pagu (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Keu (%)	Fisik (%)
1	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI (BALAI PJK)	1.323.000.000	1.299.208.077	98,20	100
1.1	Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi	1.074.000.000	1.050.662.761	97,83	100
1.1.1	Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi	70.000.000	69.857.597	99,8	100
1.1.2	Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Konstruksi	1.004.000.000	980.805.164	97,69	100
2.1	Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi (SIPJAKI) Cakupan Daerah Provinsi	249.000.000	248.545.316	99,82	100
2.1.1	Penyediaan Data dan Informasi Jasa Konstruksi	249.000.000	248.545.316	99,82	100
2	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG (DINAS PUPESDM)	314.713.400	277.097.507	88,05	100
2.1	Penetapan dan Penyelenggaraan	314.713.400	277.097.507	88,0476	100



NO	Program/ Kegiatan	Pagu (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Keu (%)	Fisik (%)
	Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi				
2.1.1	Bantuan Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara untuk Kepentingan Strategis Provinsi	314.713.400	277.097.507	88,05	100
	JUMLAH :	1.637.713.400	1.576.305.584	96,25	100

Tabel III.41. Analisa Penyebab Keberhasilan Sasaran 5

No	Indikator	Pendorong	Penghambat	Solusi
1	Peningkatan kinerja penyelenggaraan jasa konstruksi	<p>a) Masyarakat Jasa Konstruksi yang antusias mengikuti kegiatan sosialisasi klinik konstruksi secara tatap muka di beberapa Kabupaten.</p> <p>b) Web Klinik Konstruksi yang semakin banyak pengunjungnya</p> <p>c) Adanya beberapa pelanggan yang melakukan pengujian dalam rangka riset baik individu maupun institusional</p> <p>d) Meningkatnya permintaan uji dari luar DIY yaitu dari mitra uji banding antar laboratorium dan proyek di luar DIY</p> <p>e) Status sebagai laboratorium terakreditasi KAN meningkatkan reputasi sebagai mitra pengendalian mutu terpercaya</p> <p>f) Ketersediaan personel teknisi penguji dan analis yang terlatih dan kompeten</p> <p>g) Ketersediaan alat uji dan perlengkapan pendukung.</p> <p>h) Banyaknya K/L/OPD yang berada di D.I.Yogyakarta yang memiliki rencana pembangunan/rehabilitasi dalam rangka menunjang aktivitas kegiatan dan pemenuhan keandalan bangunan.</p>	<p>a) Perlunya peningkatan Server dari Web Klinik Konstruksi dikarenakan server merupakan server bersama dari Dinas Kominfo, sehingga server terkadang mengalami gangguan.</p> <p>b) Perlu penambahan jumlah alat pengujian, sehingga proses pengujian lebih efisien.</p> <p>c) Terdapat surat permohonan untuk rekomendasi teknis pembiayaan bangunan gedung untuk rehabilitasi dimana dalam 1 surat menyertakan beberapa unit kerja yang lokasinya berada di beberapa lokasi Kabupaten/Kota, sehingga diperlukan waktu penyelesaian lebih lama dari SOP.</p>	<p>a) Selalu berkoordinasi dengan Dinas Kominfo terkait kendala yang terjadi.</p> <p>b) Menganggarkan pembelian alat uji laboratorium pada tahun anggaran 2025</p> <p>c) Melakukan koordinasi dan komunikasi dengan K/L/OPD dalam penyelesaian pekerjaan.</p>

Sumber : Data DPUPESDM DIY, 2023

Gambar III.11. Foto Kegiatan Sasaran 5

 <p>Fasilitasi Pelatihan dan Sertifikasi Tenaga Ahli Klasifikasi Sipil</p>	 <p>Sosialisasi Klinik Konstruksi di Kabupaten/Kota</p>
 <p>Koordinasi Kegiatan Penyebaran Informasi & Teknologi Ke-PU-an</p>	 <p>Pendampingan Lomba KTKK 2023</p>
 <p>Pengujian Hammer Test</p>	 <p>Pembuatan JMD Beton</p>
 <p>Survey Analisis Bangunan Gedung Negara di SMA N 2 Playen</p>	 <p>Survey Analisis Bangunan Gedung Negara di SMK Kesehatan Binatama</p>
 <p>Bantuan Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara</p>	 <p>Sosialisasi Penyusunan Rekomendasi Teknis Biaya Pembangunan Bangunan Gedung Negara</p>

Sumber : Data DPUPESDM DIY, 2023

1.1.6. Sasaran 6 : Rumah Tangga yang Menempati Hunian Layak Huni dan Terjangkau

Kinerja sasaran Rumah Tangga yang Menempati Hunian Layak Huni dan Terjangkau diukur dengan indikator persentase penduduk yang menempati tempat tinggal yang layak. Penjelasan hubungan sasaran, indikator dan meta indikator adalah sebagai berikut:

Tabel III.42. Rumusan Indikator dan Formulasi Perhitungan Sasaran 6

No	Sasaran	Indikator	Meta Indikator
1	2	3	4
1	Rumah Tangga yang Menempati Hunian Layak Huni dan Terjangkau	Persentase rumah tangga yang menempati tempat tinggal layak huni dan terjangkau	Jumlah rumah tangga yang menempati tempat tinggal layak huni) / (jumlah rumah tangga di DIY) x 100%.

Sumber : Data DPUPESDM DIY, 2023

Program Pengembangan Perumahan merupakan salah satu program untuk mendukung sasaran perangkat daerah dalam sektor perumahan yaitu penduduk yang menempati tempat tinggal yang layak. Jumlah Rumah Layak Huni di DIY sejumlah 1.237.207 unit yang berasal dari jumlah rumah tangga di DIY 1.287.207 unit dikurangi jumlah RTLH yang belum ditangani sampai thn 2022 sebanyak 55.595 unit, ditambahkan dengan penanganan RTLH tahun 2023 sebanyak 5658 unit dengan rincian; BSPS 938 unit, verifikasi rumah layak oleh BSPS 616 unit, APBD Kab/Kota 1.616 unit, Kemensos 17 unit, NGO Habitat 80 unit, dana Desa 8 unit, verifikasi rumah layak oleh kab/kota 235 unit, verifikasi rumah layak oleh DIY 538 unit, BAZNAS 170 unit, BPD DIY 15 unit, APBD DIY Relokasi korban bencana 3 unit, Danais Arsitektur Khas Jogja 434 unit, APBD DIY 988 unit. Dibagi dengan jumlah rumah tangga di DIY sejumlah 1.287.207 (website DATAKU) kemudian dikalikan 100%, maka diperoleh $((1.287.207 - (55.595 - 5.658)) / 1.287.207) \times 100\% = 96,12\%$. Sasaran Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman adalah Meningkatnya Rumah Tangga yang Menempati Hunian Layak Huni dan Terjangkau dengan indikator sebagai berikut:

Tabel III.43. Target dan Realisasi Kinerja Sasaran 6

No	Sasaran	Indikator	Capaian 2022	2023			Target Akhir Renstra (2026)	Capaian s/d 2023 terhadap 2026 (%)
				Target	Realisasi	% Realisasi		
1	Rumah Tangga yang menempati hunian layak huni dan terjangkau <u>Meta Indikator:</u> (Jumlah rumah tangga yang menempati tempat tinggal layak huni dan terjangkau / (jumlah rumah tangga di DIY) x 100%.	Persentase rumah tangga yang menempati tempat tinggal layak huni dan terjangkau	95,65 %	96,12 %	96,12 (1.237.701/1.287.207) X 100%	100,00 (96,12/96,12) X 100%	97,53 %	98,55 (96,12/97,53) X 100%

Sumber : Data DPUPESDM DIY, 2023

Analisis Ketercapaian Sasaran 6: Rumah Tangga yang menempati hunian layak huni dan terjangkau adalah sebagai berikut:

- Tercapai 96,12%, dengan demikian prosentase realisasi terhadap target sebesar 100% (tercapai/sesuai target).
- Dibandingkan realisasi tahun lalu sebesar 95,65%, terdapat kenaikan sebesar 0,47%.
- Capaian target indikator pada tahun 2023 terhadap target tahun 2026 sebesar 98,55%

Tabel III.44. Penanganan Rumah Tidak Layak Huni Tahun 2023

LOKASI	DABASEKAB	TERTANGGUNG ANI TH 2022	PENANGANAN RTLH 2023												SDH TER TANG ANI TH 2023	
			BS PS	Verifikasi rumah layak oleh BS PS	Kab/kota	Kemensos	Habitat	Dan desa	Verifikasi rumah layak oleh Kab/kota	Verifikasi rumah layak oleh DIY	Baznas	BPD DIY	SPM bencana APBD DIY	DAIS dan BKK		APBD DIY
Kota Yogyakarta	2.187	152	11	11	46			19	11	6				30	158	283
Kab. Kulon Progo	6.840	1.096			300	17	80	3	50	259	70	15		70	214	1.078
Kab. Bantul	7.365	634			155				35	159	8			137	237	731
Kab. Sleman	13.709	1.374	50	50	767				93	30	32		3	115	203	1.343
Kab. Gunungkidul	25.494	1.700	877	564	348			5	38	79	54			82	176	2.223
JUMLAH	55.595	4.939	938	616	1.616	17	80	8	235	538	170	15	3	434	988	5.658

Sumber : Dinas PUPESDM DIY, Tahun 2023

Peningkatan penanganan kawasan kumuh bertujuan untuk merwujudan permukiman perkotaan dan perdesaan menjadi lebih layak huni dimulai dengan penanganan permukiman kumuh perkotaan yang menyeluruh. Tujuan pelaksanaan kegiatan tersebut dicapai dengan meningkatkan kualitas prasarana, sarana, dan utilitas (PSU) perumahan dan permukiman kumuh.

Peningkatan penanganan kawasan kumuh bertujuan untuk merwujudan permukiman perkotaan dan perdesaan menjadi lebih layak huni dimulai dengan penanganan permukiman kumuh perkotaan yang menyeluruh. Tujuan pelaksanaan kegiatan tersebut dicapai dengan meningkatkan kualitas prasarana, sarana, dan utilitas (PSU) perumahan dan permukiman kumuh.

Kawasan kumuh yang menjadi dasar dari RPJMD adalah berdasarkan SK yang dikeluarkan oleh bupati dan walikota. Total kawasan kumuh DIY adalah seluas 693,35 Ha, dimana 160,05 Ha di antaranya adalah kewenangan Pemda DIY. Di tabel berikut adalah lokasi – lokasi yang menjad ikewenangan Pemda DIY.

Tabel III.45 : Lokasi Kawasan Kumuh Kewenangan Pemda DIY

Lokasi			Luas (Ha)	Sumber Data
Kab / Kota	Kecamatan	Desa / Kelurahan		
Yogyakarta	Gondomanan	Ngupasan	12.91	SK Walikota Yogyakarta Nomor 216 Tahun 2016
		Prawirodirjan		
	Wirobrajan	Pakuncen	10.17	
		Patangpuluhan		
	Ngampilan	Ngampilan	13.51	
		Notoprajan		
		Jumlah	36.59	
Bantul	Sewon	Pendowoharjo	11.71	SK Bupati Bantul Nomor 220 Tahun 2016
		Jumlah	11.71	
Sleman	Depok	Condong Catur	11.39	SK Bupati Sleman Nomor 14.31/Kep.KDH/A/2016
	Ngaglik	Sardonoharjo	11.68	
			Jumlah	
Kulon Progo	Galur	Brosot	14.16	SK Bupati Kulon Progo Nomor 224/A/2016
		12.93		
	Pengasih	Pengasih	11.93	
			Jumlah	
Jumlah Total			110.39	

Penanganan perumahan dan permukiman kumuh terutama dicapai dengan peningkatan kualitas PSU sesuai dengan Permen PUPR 14-2018 tentang Pencegahan Dan Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh Dan Permukiman Kumuh. Peraturan tersebut mengamanatkan tentang aspek bangunan

dan PSU yang digunakan untuk menilai tingkat kekumuhan dan akhirnya sebagai acuan dasar (*baseline*) peningkatan kualitas.

Pengembangan Perumahan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Kumuh menjadi salah satu program yang mendukung misi RPJMD yakni meningkatkan kualitas hidup, kehidupan dan penghidupan masyarakat yang berkeadilan dan berkeadaban. Target RPJMD dan capaian penanganan kawasan kumuh yang termasuk dalam kewenangan Pemerintah Provinsi DIY sampai tahun 2022 serta capaian menurut kewenangan seperti tercantum dalam tabel berikut :

Tabel III.46 : Capaian Penanganan Kawasan Kumuh Sesuai RPJMD

Tahun	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Capaian (Ha)	327.98	445.43	653.55	667.36	676.41	676.41
Capaian (%)	33.97%	46.13%	67.69%	69.12%	70.06%	70.06%
Target RPJMD :	28.29%	39.80%	58.22%	72.16%	86.08%	86.08%
Capaian RPJMD / tahun	120.08%	115.92%	116.27%	95.79%	81.39%	81.39%

Selain penanganan rumah tidak layak huni, indikator-indikator lain yang menjadi ranah capaian bidang perumahan adalah perwujudan kawasan perumahan sesuai RTRW, penanganan kawasan kumuh, dan penyediaan PSU layak di kawasan permukiman.

Keberhasilan capaian Sasaran 6, dengan Indikator Persentase rumah tangga yang menempati tempat tinggal layak huni dan terjangkau tersebut didukung oleh keberhasilan program, kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut:

Tabel III.47 Capaian Program, Kegiatan, dan SubKegiatan terhadap Sasaran 6

NO	Program	Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Target	realisasi	%Capaian
1	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN		Persentase penanganan rumah terdampak bencana dan relokasi akibat program pemerintah	100%	100	100%
1.1		Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi				100
1.1.1		Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana atau	1. Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi Rawan Bencana dan	1 Dokumen	1 Dokumen	100

NO	Program	Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Target	realisasi	%Capaian
		Terkena Relokasi Program Provinsi	Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Provinsi :			
1.1.2		Pendaftaran dan Verifikasi Penerima Rumah bagi Korban Bencana Alam atau Terkena Relokasi Program Provinsi	1. Jumlah Dokumen Data Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana atau yang Terkena Relokasi Program Provinsi yang Terverifikasi :	1 Dokumen	1 Dokumen	100
1.2		Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi				100
1.2.1		Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana	1. Jumlah Rumah bagi Korban Bencana Provinsi yang Terbangun :	3 unit	3 unit	100
2	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN		Persentase penanganan rumah tidak layak huni	58,27%	68,32%	117,25
			Persentase penanganan kawasan kumuh	25%	8.19 %	32,76
2.1		Penataan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha				100
2.1.1		Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman	1. Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman :	1 Laporan	1 Laporan	100
2.2		Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha				99,93
2.2.1		Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni dalam Kawasan Permukiman dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	1. Jumlah Rumah Tidak Layak Huni dalam Kawasan Permukiman dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha yang Diperbaiki :	994 unit rumah 175 unit rumah 198 unit rumah 198 unit rumah 198 unit rumah	988 unit rumah 174 unit rumah 198 unit rumah 198 unit rumah 194 unit rumah	99,93

NO	Program	Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Target	realisasi	%Capaian
			<p>2. Jumlah Peningkatan Kualitas RTLH yang dilaksanakan di Kab. Gunungkidul :</p> <p>3. Jumlah Peningkatan Kualitas RTLH yang dilaksanakan di Kab. Kulon Progo :</p> <p>4. Jumlah Peningkatan Kualitas RTLH yang dilaksanakan di Kab. Sleman :</p> <p>5. Jumlah Peningkatan Kualitas RTLH yang dilaksanakan di Kab. Bantul :</p> <p>6. Jumlah Peningkatan Kualitas RTLH yang dilaksanakan di Kota Yogyakarta :</p> <p>7. Jumlah Pembangunan Baru RLH yang dilaksanakan di Kab. Gunungkidul :</p> <p>8. Jumlah Pembangunan Baru RLH yang dilaksanakan di Kab. Kulon Progo :</p> <p>9. Jumlah Pembangunan Baru RLH yang dilaksanakan di Kab. Sleman :</p> <p>10. Jumlah Pembangunan Baru RLH yang dilaksanakan di Kab. Bantul :</p> <p>11. Jumlah Pembangunan Baru RLH yang dilaksanakan di Kota Yogyakarta :</p>	<p>rumah 153 unit rumah 2 unit rumah 16 unit rumah 9 unit rumah 39 unit rumah 6 unit rumah</p>	<p>rumah 152 unit rumah 2 unit rumah 16 unit rumah 9 unit rumah 39 unit rumah 6 unit rumah</p>	
3	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)		Penyediaan PSU layak di kawasan permukiman	160 lokasi	666 lokasi	416,25
3.1		Urusan Penyelenggaraan PSU Permukiman				100

NO	Program	Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Target	realisasi	%Capaian
3.1.1		Perencanaan Penyediaan PSU Permukiman	1. Jumlah Dokumen Perencanaan Penyediaan PSU Permukiman :	1 Dokumen	1 Dokumen	100
3.1.2		Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman	1. Jumlah Lokasi Permukiman yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Permukiman : 2. Bantuan PSU Kota Yogyakarta : 3. Bantuan PSU Kab. Kulon Progo : 4. Bantuan PSU Kab. Bantul : 5. Bantuan PSU Kab. Gunungkidul : 6. Bantuan PSU Kab. Sleman : 7. Konstruksi Ruang Terbuka Non Hijau :	666 Lokasi 20 Lokasi 48 Lokasi 219 Lokasi 156 Lokasi 223 Lokasi 1 Paket	666 Lokasi 20 Lokasi 48 Lokasi 219 Lokasi 156 Lokasi 223 Lokasi 1 Paket	100
4	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN		Terlaksananya Pembangunan Rumah Layak Huni dengan Arsitektur Khas Yogyakarta	50	434	868
4.1.		Sarana Prasarana Keistimewaan Urusan Kebudayaan				100
4.1.1		Pengadaan Sarana dan Prasarana Budaya	1. Jumlah Sarana dan Prasarana Budaya : unit dari 1090 unit 2. Monitoring dan Evaluasi BKK Arsitektur Khas Yogyakarta : 3. Penanganan Perumahan dan Kawasan Permukiman untuk Pengurangan Kemiskinan : 4. Pembangunan Arsitektur Gaya Yogyakarta : 5. Monitoring dan Evaluasi BKK Balai Padukuhan : 6. Kajian Peningkatan Kualitas untuk Rumah Tidak Layak Huni	1090 unit 1 dokumen 12 lokasi 30 unit rumah 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen	1090 unit 1 dokumen 12 lokasi 30 unit rumah 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen	100

NO	Program	Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Target	realisasi	%Capaian
			(RTLH) dengan gaya arsitektur Tradisional Jawa : 7. Kajian detail Kebutuhan Rehab Balai Padukuhan : 8. Verifikasi Pembangunan Baru Rumah Layak Huni Arsitektur Khas Yogyakarta : 9. Identifikasi Penanganan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) Terintegrasi untuk penanganan kemiskinan dan ketimpangan wilayah di DIY : 10. Peresmian Penanganan Perumahan dan Kawasan Permukiman untuk Pengurangan Kemiskinan : 11. Penyebarluasan Informasi Penanganan Perumahan dan Kawasan Permukiman melalui Dana Keistimewaan :	1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen	1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen	

Sumber : Data DPUPESDM DIY, 2023

Tabel III.48. Kinerja Program Sasaran 6

No	Program	Indikator	Capaian 2022	2023			Target Akhir Renstra (2023)	Capaian s/d 2023 terhadap 2026 (%)
				Target	Realisasi	% Realisasi		
1	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan	Terlaksananya Pembangunan Rumah Layak Huni dengan Arsitektur Khas Yogyakarta	40 unit	50	434	868	200 unit	217
2	Program Pengembangan Perumahan	Persentase penanganan rumah terdampak bencana dan relokasi akibat program pemerintah	100%	100%	100%	100	100%	100

No	Program	Indikator	Capaian 2022	2023			Target Akhir Renstra (2023)	Capaian s/d 2023 terhadap 2026 (%)
				Target	Realisasi	% Realisasi		
3	Program Kawasan Permukiman	Persentase penanganan rumah tidak layak huni	63,65%	58,27 %	68,32%	117,25	71,73%	95,24
4	Program Kawasan Permukiman	Persentase penanganan kawasan kumuh	N/A-	25%	8.19 %	32,76	100%	32,76
5	Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)	Penyediaan PSU layak di kawasan permukiman	594 lokasi	160 lokasi	666 lokasi	416,25	640 lokasi	104

Sumber : Data DPUPESDM DIY, 2023

Tabel III.49. Kinerja Keuangan dan Fisik Program Dan Kegiatan Sasaran 6

NO	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Pagu (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Keu (%)	Fisik (%)
1	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	498.994.000	471.151.707	94,42	100
1.1	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	149.494.000	147.285.321	98,52	100
1.1.1	Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana atau Terkena Relokasi Program Provinsi	99.494.000	99.493.690	100	100
1.1.2	Pendataan dan Verifikasi Penerima Rumah bagi Korban Bencana Alam atau Terkena Relokasi Program Provinsi	50.000.000	47.791.631	95,58	100
1.2	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	349.500.000	323.866.386	92,67	100
1.2.1	Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana	349.500.000	323.866.386	92,67	100
2	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	22.263.600.000	21.173.262.620	95,10	99,93
2.1	Penataan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	315.000.000	297.099.915	94,32	100
2.1.1	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman	315.000.000	297.099.915	94,32	100
2.2	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas	21.948.600.000	20.876.162.705	95,11	99,93

NO	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Pagu (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Keu (%)	Fisik (%)
	10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha				
2.2.1	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni dalam Kawasan Permukiman dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	21.948.600.000	20.876.162.705	95,11	99,93
3	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	96.549.730.400	85.958.867.101	89,03	100
3.1	Urusan Penyelenggaraan PSU Permukiman	96.549.730.400	85.958.867.101	89,03	100
3.1.1	Perencanaan Penyediaan PSU Permukiman	449.730.400	449.640.449	99,98	100
3.1.2	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman	96.100.000.000	85.509.226.652	88,98	100
4	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	11.762.598.800	11.625.078.793	98,83	100
4.1.	Sarana Prasarana Keistimewaan Urusan Kebudayaan	11.762.598.800	11.625.078.793	98,83	100
4.1.1	Pengadaan Sarana dan Prasarana Budaya	11.762.598.800	11.625.078.793	98,83	100
	JUMLAH	131.074.923.200	119.228.360.221	94,35	99,98

Sumber : Data DPUPESDM DIY, 2023

Dalam pelaksanaan indikator-indikator tersebut ada faktor yang mempengaruhi tingkat keberhasilan atau sebagai faktor pendorong dan beberapa faktor penghambat. Berikut adalah analisa penyebab dan kegagalan dari beberapa indikator yang ada di bidang perumahan :

Tabel III.50. Analisa penyebab keberhasilan Sasaran 6

No	Indikator	Pendorong	Penghambat	Solusi
1	Persentase rumah tangga yang menempati tempat tinggal layak huni dan terjangkau	Sinergitas antara anggaran Pusat (Program BSPP di DIY dan DAK Kab/Kota) - APBD DIY - Dana Keistimewaan DIY- APBD Kabupaten/Kota - CSR	Terdapat beberapa calon penerima bantuan yang mengundurkan diri karena tidak mampu swadaya, meninggal dunia kondisi rumah kosong, dan konflik sengketa tanah sehingga menyebabkan tidak dapat dilaksanakannya penyaluran bansos kepada yang bersangkutan.	Meningkatkan kualitas verifikasi calon penerima hibah

Sumber : Data DPUPESDM DIY, 2023

Gambar III.12. Foto Kegiatan Program Pengembangan Perumahan

Penanganan Rumah Tidak Layak Huni melalui Peningkatan Kualitas di Kabupaten Bantul



Penanganan Rumah Tidak Layak Huni melalui Peningkatan Kualitas di Kota Yogyakarta



Penanganan Rumah Tidak Layak Huni melalui Pembangunan Baru Rumah Layak Huni di Kabupaten Sleman



Penanganan Rumah Tidak Layak Huni melalui Pembangunan Baru Rumah Layak Huni di Kabupaten Gunungkidul



Pembangunan Rumah Layak Huni dengan Gaya Khas Tradisional Jawa melalui mekanisme BKK



Penanganan RTLH Terintegrasi melalui Dana Keistimewaan



Sumber : Data DPUPESDM DIY, 2023

<p> 10.147415 S 110.58777 E Semanu Kecamatan RT 04 RW 23 Dusun 2023 - Watudalang - Bendungan - Karangmojo </p>	<p> 10.147415 S 110.58777 E Semanu Kecamatan RT 04 RW 23 Dusun 2023 - Watudalang - Bendungan - Karangmojo </p>
<p>Pekerjaan PSU (Jalan beton K-250 (Ready mix)) pada Kawasan Permukiman di Kap. Karangmojo, Ponjong, Rongkop, Semanu, Tepus, Girisubo, Kab. Gunungkidul. Lokasi Tunggul Timur RT 04, 05 RW 23, Semanu, Semanu</p>	<p>Pekerjaan PSU (Pekerjaan aspal laston lapis aus (AC-WC)) pada Kawasan Permukiman di Kap. Karangmojo, Ponjong, Rongkop, Semanu, Tepus, Girisubo, Kab. Gunungkidul. Lokasi Watudalang RT 03 RW 03, Bendungan, Karangmojo</p>



Sumber : Data DPUPESDM DIY, 2023

1.1.7. Sasaran 7 : Meningkatnya Rumah Tangga Berakses Listrik

Kinerja sasaran Meningkatnya Rumah Tangga Berakses Listrik diukur dengan presentase Rumah Tangga berakses listrik. Penjelasan hubungan sasaran, indikator dan meta indikator adalah sebagai berikut:

Tabel III.51. Rumusan Indikator dan Formulasi Perhitungan Sasaran 7

No	Sasaran	Indikator	Meta Indikator
1	2	3	4
1	Meningkatnya rumah tangga berakses listrik	Presentase Rumah Tangga berakses listrik	(Jumlah rumah tangga yang telah menikmati listrik / jumlah rumah tangga total x 100%

DIY merupakan provinsi di Pulau Jawa yang tidak memiliki pembangkit listrik skala besar. Kebutuhan listrik di DIY dipasok PT. PLN melalui Jaringan Interkoneksi Jawa - Madura - Bali (JAMALI). Dengan kondisi dukungan tersebut, salah satu target utama Pemda DIY adalah memastikan bahwa seluruh rumah tangga di DIY mendapatkan akses listrik secara aman, andal, efisien, sesuai Keselamatan Ketenagalistrikan dan tepat sasaran.

Sesuai dengan ketentuan pada Pasal 3 Ayat (3) UU No.30 Tahun 2007 tentang Ketenagalistrikan, bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah berwenang untuk menyediakan dana untuk masyarakat tidak mampu, penyediaan sarana prasarana tenaga listrik di daerah belum berkembang, pembangunan tenaga listrik di daerah

terpencil dan perbatasan, dan pembangunan listrik perdesaan. Kewenangan tersebut dipertegas kembali dalam Lampiran CC Urusan ESDM UU No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, pada sub urusan ketenagalistrikan huruf f, bahwa Pemerintah Daerah berwenang dalam pengediaan dana untuk kelompok masyarakat tidak mampu, pembangunan sarana penyediaan tenaga listrik belum berkembang, daerah terpencil dan perdesaan. Dasar hukum tersebut menjadi landasan utama bagi Pemda DIY untuk meningkatkan akses listrik bagi masyarakat dalam rangka pelaksanaan sub urusan energi dan ketenagalistrikan.

Sesuai dengan yang telah ditetapkan dalam RPD DIY 2023 – 2026, salah satu indikator capaian kinerja Pemda DIY dalam sub urusan energi dan ketenagalistrikan adalah meningkatnya persentase rumah tangga berakses listrik. Indikator tersebut merupakan representasi dari Rasio Elektrifikasi (RE). RE adalah perbandingan antara rumah tangga yang telah menikmati akses listrik dengan jumlah total rumah tangga, dengan kata lain RE menggambarkan seberapa besar masyarakat yang telah mendapatkan akses listrik di suatu wilayah. Bila merujuk pada definisi tersebut maka, akses listrik yang dimaksud dapat bersumber dari jaringan PLN, energi baru terbarukan, menyalur maupun komunal.

Capaian rasio elektrifikasi di DIY sampai dengan bulan November 2023 adalah sebesar 99,99% yang diperoleh dari Jumlah rumah tangga yang telah menikmati listrik / jumlah rumah tangga total x 100% = $1.349.718 : 1.349.835 \times 100\% = 99,99\%$ (data release dari SILM PT.PLN dan Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan KESDM), sesuai dengan target RPD tahun 2023 yaitu sebesar 99,99%. Data capaian tersebut menggambarkan masih terdapat sebagian kecil rumah tangga di DIY yang belum berakses listrik dengan alasan yaitu masih adanya sebagian kecil RT yang menolak akses listrik karena kondisi tertentu Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ), Manula dan Penganut Kepercayaan (Kejawen).

Isu pemerataan akses listrik saat ini bukan hanya berfokus pada peningkatan RE secara kuantitas namun juga peningkatan kualitas. Apabila merujuk pada kondisi di lapangan, sangat sulit sekali menemukan rumah tangga yang sama sekali belum berakses listrik (kecuali dengan alasan tertentu sebagaimana disebutkan diatas), adapun yang masih banyak ditemukan adalah rumah tangga miskin yang telah berakses listrik namun masih menyalur (belum ber KWH meter sendiri) dan belum sesuai ketentuan Keselamatan Ketenagalistrikan. Data dari seluruh kapanewon se

DIY yang masuk s.d bulan Desember 2023, masih terdapat 5.661 rumah tangga yang listriknya masih menyalur.

Dalam ketentuan keselamatan ketenagalistrikan pada instalasi dan sambungan listrik rumah tangga, terdapat tiga aspek yang wajib diperhatikan yaitu aman, amdal dan ramah lingkungan. Adapun rumah tangga yang menjadi sasaran adalah rumah tangga miskin belum berlistrik atau masih menyalur dan tercatat dalam Data Terpadu yang bersumber dari Data Terpadu Kesejahteraan Nasional yang ditetapkan oleh Kementerian Sosial dan dalam hal kepentingan listrik data tersebut disampaikan oleh Direktorat Ketenagalistrikan Kementerian ESDM kepada PT. PLN (Persero) untuk dilakukan pencocokan dengan Data Konsumen. Hasil pencocokan tersebut ditetapkan Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan untuk dijadikan dasar pemberian subsidi listrik.

Wujud peran Pemda DIY melalui Dinas PUPESDM dalam penanganan hal tersebut adalah berupa pemberian bantuan instalasi dan sambungan listrik rumah tangga tersebut kepada rumah tangga miskin yang masuk dalam data penerima subsidi listrik. Bentuk bantuan tersebut berupa pemasangan instalasi listrik, 3 titik lampu dan 1 stop kontak, pemberian Sertifikat Laik Operasi, Nomor Identitas Instalasi Listrik (NIDI), pembayaran biaya sambungan baru PLN daya 450 VA, dan pulsa listrik.

Sejak tahun 2017 sampai dengan akhir tahun 2022 terdapat peningkatan sedikitnya 13.907 rumah tangga miskin yang telah berlistrik sesuai dengan keselamatan ketenagalistrikan. Kemudian di tahun 2023 ini terdapat penambahan sedikitnya sejumlah 2.240 rumah tangga sehingga jika ditotal sejak 2017 – 2023 telah terdapat total 16.147 rumah tangga miskin berlistrik (subsidi) sesuai dengan keselamatan ketenagalistrikan.

Dalam pelaksanaan program tersebut, terdapat kendala yang dihadapi Pemda DIY yaitu masih adanya ketidaksesuaian data yang ada dalam Data Terpadu (data subsidi listrik) dengan kondisi sesungguhnya di lapangan. Hal tersebut menghambat akselerasi pemerataan aksesibilitas listrik bagi masyarakat yang sesuai dengan ketentuan keselamatan ketenagalistrikan. Selain itu, dengan kondisi geografis DIY khususnya wilayah perbukitan di Kabupaten Kulon Progo dan Kabupaten Gunungkidul, masih diperlukan adanya perluasan jaringan listrik baru agar dapat melayani rumah-rumah yang berdiri berkelompok (gerumbuL) dan listriknya masih

menyalur. Kendala terakhir adalah adanya perubahan data yang sangat dinamis seperti meninggal, pindah rumah, NIK yang berbeda dengan sistem, sampai dengan pemekaran wilayah administrasi (RT/RW).

Selain kendala yang dihadapi, juga terdapat faktor-faktor yang menjadi pendorong percepatan penyelesaian yaitu jejaring koordinasi yang semakin baik dengan pihak PLN, adanya sumber pendanaan lain melalui program CSR PLN, program Bantuan Pasang Listrik Baru (BPBL) Kementerian ESDM, Program ikutan Bedah Rumah, CSR swasta lain dan pemasangan swadaya masyarakat.

Adapun upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi masalah instalasi dan sambungan listrik rumah tangga subsidi berdasarkan faktor penghambat/kendala dan pendorong adalah dengan melakukan koordinasi mulai dari tingkat Kapanewon, PT. PLN dan Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan dalam rangka updating terhadap Data Terpadu. Sedangkan terkait permasalahan jaringan dapat diupayakan penyelesaiannya melalui pengajuan usulan perluasan jaringan listrik kepada PT. PLN (Persero) untuk dilakukan perluasan jaringan. Perlunya adanya forum koordinasi dengan para stakeholder dalam hal penanganan akses listrik di DIY juga menjadi kendala, hal tersebut dibuktikan dengan banyaknya tumpang tindih pemberian bantuan akses listrik.

Sebagaimana disebutkan diatas, bahwa DIY sebagai daerah yang mendapatkan pasokan energi (listrik dan bahan bakar), untuk itu DIY harus cermat dan efisien dalam pemanfaatannya. Terlebih pembangkit-pembangkit energi tersebut sebagian besar masih menggunakan bahan baku energi fosil yang keberadaannya semakin mahal dan memberikan dampak pada lingkungan. Berpedoman pada Peraturan Pemerintah melalui PP No. 33/2023 tentang Konservasi Energi, menyatakan bahwa Konservasi energi nasional menjadi tanggung jawab Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota, pengusaha dan masyarakat. Peraturan Daerah DIY Nomor 6 tahun 2020 tentang Rencana Umum Energi Daerah (RUED) DIY mengamanatkan pelaksanaan konservasi energi di DIY melalui penghematan energi sebesar 12 % di tahun 2025 dan 24 % di tahun 2050. Pemda DIY telah berupaya melaksanakan konservasi energi. Salah satu bentuk upaya konservasi energi adalah meningkatkan pelaksanaan budaya hemat energi melalui audit energi. Melalui audit energi, akan dapat diketahui potensi-potensi penghematan konsumsi energi yang dapat dilakukan. Adapun capaian audit energi yang dilakukan oleh Pemda DIY adalah terhadap 62 bangunan gedung pemerintah

Bangunan/gedung pemerintah, komersial dan industry serta 4 pasar tradisional yang berfokus pada segi kelistrikan (power quality), sistem pencahayaan dan sistem tata udara.

Selain konservasi energi, upaya lain yang dapat dilakukan dalam rangka transisi energi adalah dengan memanfaatkan potensi energi baru terbarukan (EBT) yang dimiliki DIY. Kebijakan pemanfaatan potensi EBT tersebut juga menjadi isu strategis yang terus didorong oleh Pemerintah Pusat, yang diterjemahkan dalam parameter Porsi EBT dalam Bauran Energi Nasional. Melalui Perda DIY No.6 Tahun 2020 tentang Rencana Umum Energi Daerah DIY 2020-2050, telah ditetapkan target porsi EBT dalam Bauran Energi Daerah DIY pada tahun 2025 sebesar 6,6% dan tahun 2050 sebesar 8,8%. Berdasarkan hasil Pengawasan dan Evaluasi yang telah dilakukan oleh Dewan Energi Nasional (DEN) pada bulan Desember 2023, telah tervalidasi capaian porsi energi baru terbarukan dalam Bauran Energi DIY tahun 2022 adalah sebesar 6,47%. Diharapkan capaian tersebut terus naik di tahun 2023 mengingat semakin berkembangnya pemanfaatan potensi energi baru terbarukan, salah satunya yaitu Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) yang terintegrasi dengan PLN (disebut PLTS on grid), yang semakin populer pasca diterbitkannya Peraturan Menteri ESDM Nomor 26 Tahun 2021 tentang PLTS Atap.

Tantangan kedepan untuk sektor energi adalah bagaimana terus mendorong pengembangan penggunaan energi baru terbarukan (EBT) di DIY yang pada akhirnya dapat meningkatkan persentase porsi EBT dalam Bauran Energi Daerah. Terlebih dengan terbitnya Perpres No.11 Tahun 2023 tentang Urusan Pemerintahan Konkuren Tambahan di Bidang ESDM pada Subbidang Energi Baru Terbarukan, pembagian kewenangan terkait pengelolaan EBT semakin jelas dan terus didorong. Tantangan tersebut tidak dapat diselesaikan pemerintah sendirian, perlu adanya kerjasama dan kontribusi dari seluruh pihak mengingat investasi pengembangan sektor EBT cukup besar dan diperlukan juga konsistensi. Selain itu diperlukan pula koordinasi dengan seluruh pihak diantaranya Kementerian ESDM, PT. PLN (persero), sektor industri, sektor properti dan sektor pariwisata sebagai tumpuan pengembangan pemanfaatan EBT di DIY.

Tabel III.52. Target dan Realisasi Kinerja Sasaran 7

No	Sasaran	Indikator	Capaian 2022	2023			Target Akhir Renstra (2023)	Capaian s/d 2023 terhadap 2026 (%)
				Target	Realisasi	% Realisasi		
1	Meningkatnya Rumah Tangga Berakses Listrik <u>Meta Indikator:</u> (indikator Jumlah rumah tangga yang telah menikmati listrik / jumlah rumah tangga total x 100%)	Persentase rumah tangga berakses listrik	99,99	99,99	99.99 9 (1.34 9.71 8 /1.34 9.83 5)x 100 %	100 (99.99/ 99.99)X 100%	99,99	100 (99.99/ 99.99)X 100%)

Sumber : Data DPUPESDM DIY, 2023

Analisis Ketercapaian Sasaran 7: Meningkatnya Rumah Tangga Berakses Listrik adalah sebagai berikut:

- Tercapai 99,99%, dengan demikian prosentase realisasi terhadap target sebesar 100% (tercapai/sesuai target).
- Dibandingkan realisasi tahun lalu sebesar 99,99%, tidak mengalami kenaikan/penurunan
- Capaian target indikator pada tahun 2023 terhadap target tahun 2026 sebesar 100%

Keberhasilan capaian Sasaran 7, dengan Indikator Persentase rumah tangga berakses listrik tersebut didukung oleh keberhasilan program, kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut:

Tabel III.53 Capaian Program, Kegiatan, dan SubKegiatan terhadap Sasaran 7

NO	Program	Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Target	realisasi	%Capaian
1	PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI TERBARUKAN		Terpantaunya pemanfaatan Energi Baru Terbarukan	100%	100%	100%
1.1		Pelaksanaan Konservasi Energi di Wilayah Provinsi				100%
1.1.1		Pembinaan dan Pengawasan Konservasi Energi	1. Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan	2 Laporan 2 laporan	2 Laporan 2 laporan	100%

NO	Program	Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Target	realisasi	%Capaian
		Kewenangan Provinsi	Konservasi Energi Kewenangan Provinsi: 2. Pengawasan dan Pengendalian Energi Baru Terbarukan di DIY :			
2	PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN		Penambahan jumlah rumah tangga miskin yang menikmati listrik	14.448 SR	16.147 SR	111,76
			Peningkatan pelaksanaan usaha ketenagalistrikan yang sesuai ketentuan	46,88%	46,88%	100%
2.1		Penatausahaan Izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi				100%
2.1.1		Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi	1. Jumlah Dokumen Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi : 2. Pembinaan Pelaksanaan Perizinan Ketenagalistrikan di 4 Kabupaten 1 Kota : 3. Rekomendasi Teknis Perizinan Ketenagalistrikan di 4 Kabupaten 1 Kota : 4. FGD Penyusunan Draft Rapergub Pelaksanaan RUED DIY 2020 - 2050 :	3 dokumen1 dokumen1 dokumen	3 dokumen1 dokumen1 dokumen	100%
2.1.2		Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi	1. Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi : 2. Pengawasan dan Pengendalian Pelaksanaan Perizinan Ketenagalistrikan di DIY :	4 Laporan 2 laporan 1 aplikasi 1 Laporan	2 Laporan 2 laporan 1 aplikasi 1 Laporan	100%

NO	Program	Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Target	realisasi	%Capaian
			3. Pengelolaan Aplikasi SIPGELIS : 4. Sosialisasi Pengawasan dan Pengendalian Pelaksanaan Perizinan Ketenagalistrikan :			
2.2		Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu, Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan				96,59
2.2.1		Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	1. Jumlah Sarana yang Terbangun dalam Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan : 2. Pengadaan Instalasi dan Sambungan Listrik Rumah Tangga (Kabupaten Bantul, Kabupaten Kulon Progo dan Kabupaten Sleman) : 3. Pengadaan Instalasi dan Sambungan Listrik Rumah Tangga DIY 1 :	116 Unit 47 unit 69 unit	105 Unit 47 unit 58 unit	96,59

Tabel III.54. Kinerja Program Sasaran 7

No	Program	Indikator	Capaian 2022	2023			Target Akhir Renstra (2023)	Capaian s/d 2023 terhadap 2026 (%)
				Target	Realisasi	% Realisasi		
1	Program Pengelolaan Ketenagalistrikan	Penambahan jumlah rumah tangga miskin yang menikmati listrik	13.907 SR	14.448 SR	16.147 SR	111,76	111,76	99,38
2	Program Pengelolaan Energi Terbarukan	Terpantaunya pemanfaatan Energi Baru Terbarukan	NA	100%	100%	100%	100%	NA
3	Program Pengelolaan Ketenagalistrikan	Peningkatan pelaksanaan usaha ketenagalistrikan yang sesuai ketentuan	NA	46,88 %	46,88 %	100%	46,88 %	NA

Sumber : Data DPUPESDM DIY, 2023

Tabel III.55. Kinerja Keuangan dan Fisik Program Dan Kegiatan Sasaran 7

NO	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Keu (%)	Fisik (%)
1	PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI TERBARUKAN	118.050.000	116.751.625	98,90%	100%
1.1	Pelaksanaan Konservasi Energi di Wilayah Provinsi	118.050.000	116.751.625	98,90%	100%
1.1.1	Pembinaan dan Pengawasan Konservasi Energi Kewenangan Provinsi	118.050.000	116.751.625	98,90%	100%
2	PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN	534.099.200	386.636.279	92,29	100%
2.1	Penatausahaan Izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi	160.599.200	159.887.176	99,59%	100%
2.1.1	Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi	53.899.200	53.749.155	99,72%	100%
2.1.2	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi	106.700.000	106.138.021	99,47%	100%
2.2	Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu, Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	266.800.000	226.752.103	84,99%	100%

NO	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Keu (%)	Fisik (%)
2.2.1	Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	266.800.000	226.752.103	84,99%	100%
	Jumlah	652.149.200	503.387.904	77,89%	100%

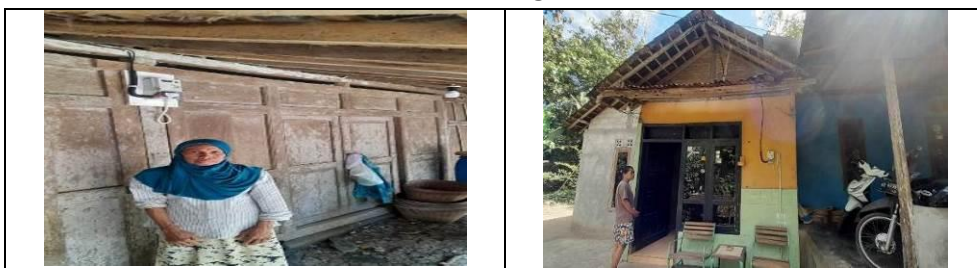
Sumber : Data DPUPESDM DIY, 2023

Tabel III.56. Analisa penyebab keberhasilan Sasaran 7

No	Indikator	Pendorong	Penghambat	Solusi
1	Presentase Rumah Tangga berakses listrik	Peran serta masyarakat secara swadaya, PT PLN dan Kementerian ESDM, sangat signifikan dalam upaya meningkatkan dan mempertahankan rasio elektrifikasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemda DIY berupaya meningkatkan keselamatan ketenagalistrikan bagi masyarakat tidak mampu melalui skema subsidi. Diperlukan adanya updating Data Terpadu masyarakat yang berhak menerima subsidi agar penanganan bisa lebih optimal dan tepat sasaran. 2. Masih terdapat rumah masyarakat yang belum berlistrik dan jaraknya lebih dari 50 meter dari tiang listrik/ sambungan listrik terakhir. Sehingga diperlukan adanya perluasan jaringan listrik 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Koordinasi dan rekonsiliasi terkait Data Terpadu yang telah dicocokkan dengan data PLN dan telah di tetapkan oleh Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan KESDM; 2. Koordinasi dan pengajuan usulan perluasan jaringan listrik kepada PLN

Sumber : Data DPUPESDM DIY, 2023

Gambar III.13. Foto Kegiatan Sasaran 7





Perawatan Panel Surya dalam rangka Pemeliharaan Rutin PLTH Pantai Baru

Penggantian Lampu dalam rangka Pemeliharaan Rutin PLTS Tersebar

Sumber : Data DPUPESDM DIY, 2023

1.1.8. Sasaran 8 : Meningkatnya Kesesuaian Izin Pengusahaan Air Tanah Dan Pertambangan Terhadap Rencana Tata Ruang

Kinerja sasaran Meningkatnya Kesesuaian izin pengusahaan air tanah dan pertambangan terhadap rencana tata ruang diukur dengan indikator kesesuaian izin pengusahaan air tanah dan pertambangan terhadap rencana tata ruang. Penjelasan hubungan sasaran, indikator dan meta indikator adalah sebagai berikut:

Tabel III.57. Rumusan Indikator dan Formulasi Perhitungan Sasaran 8

No	Sasaran	Indikator	Meta Indikator
1	2	3	4
1	Meningkatnya Kesesuaian izin pengusahaan air tanah dan pertambangan terhadap rencana tata ruang	Kesesuaian izin pengusahaan air tanah dan pertambangan terhadap rencana tata ruang	((Jumlah izin air tanah yang sesuai ketentuan + Jumlah izin pertambangan sesuai kaidah pertambangan yang baik) : Total jumlah izin x 100%

Pengaturan dan pengelolaan sumber daya air termasuk di dalamnya air tanah berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air diatur dengan basis Wilayah Sungai. Sumber Air tanah meliputi air tanah pada Cekungan Air Tanah (CAT) dan sumber air tanah lainnya, yang meliputi daerah di luar CAT yang sudah ditetapkan, kedalaman >500 m dan akuifer air tawar di laut. Cekungan air tanah ditetapkan oleh Kementerian ESDM meliputi CAT dalam Wilayah Sungai (WS) lintas negara, CAT dalam WS lintas provinsi, CAT dalam WS strategis nasional, CAT dalam WS lintas Kabupaten/Kota, CAT dalam satu Kabupaten/Kota dan CAT lintas WS. Wilayah Sungai di Daerah Istimewa Yogyakarta termasuk Wilayah Sungai Lintas Provinsi, sehingga penetapan zona konservasi air tanahnya menjadi kewenangan Menteri ESDM/Pemerintah pusat/Badan Geologi. Sehingga dalam penyelenggaraan perizinan air tanah juga menjadi kewenangan

pemerintah pusat. Dalam hal ini Gubernur masih dapat melakukan kegiatan inventarisasi air tanah yang terletak pada cekungan air tanah dan sumber air tanah lainnya di WS lintas provinsi, WS lintas negara dan WS strategis nasional setelah berkoordinasi dengan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ESDM.

Urusan ESDM di Bidang pertambangan, dengan terbitnya Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Pemberian Perizinan Berusaha di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara, maka sejak 11 April 2022 Pemerintah DIY wajib melaksanakan Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam, Mineral Logam Jenis Tertentu dan Batuan meliputi perizinan; pembinaan; pengawasan; pemberian dan penetapan WIUP; penetapan harga patokan Mineral Bukan Logam dan Batuan serta rekomendasi dan persetujuan terkait pelaksanaan perizinan. Pemerintah Daerah DIY kemudian menindak lanjuti dengan adanya Peraturan Gubernur DIY Nomor 39 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Logam, Mineral Bukan Logam, Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu, dan Batuan yang mengatur terkait perizinan, pembinaan dan pengawasan usaha pertambangan.

Indikator kesesuaian perusahaan izin air tanah dan pertambangan terhadap rencana tata ruang dilaksanakan melalui Program Pengelolaan Aspek Kegeologian dan Program Pengelolaan Mineral dan Batubara. Indikator ini dilaksanakan agar terwujud keterpaduan program pemanfaatan ruang, sehingga dapat meningkatnya aktivitas perekonomian yang berkelanjutan. Pemberian rekomendasi teknis izin pertambangan dilakukan sesuai dengan kawasan peruntukan pertambangan yang merupakan wilayah pertambangan sebagai landasan bagi kegiatan pertambangan. Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan izin air tanah dan izin perusahaan pertambangan dilakukan agar pelaksanaan izin air tanah dan izin perusahaan pertambangan dikelola secara baik dan benar dengan tetap menjaga konservasi sumber daya mineral dan lingkungan. Target kinerja Tahun 2023 didasarkan atas Peraturan Gubernur DIY Nomor 7 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah, yaitu Kesuaian izin perusahaan air tanah dan pertambangan terhadap rencana tata ruang 40,31 % dengan metaindikator (jumlah izin air tanah yang sesuai ketentuan + Jumlah izin pertambangan sesuai kaidah pertambangan yang baik): Total jumlah izin x 100 %.

Indikator ini dilaksanakan melalui program pengelolaan aspek kegeologian, kegiatan Penetapan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi melalui sub kegiatan Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah, kegiatan Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi melalui sub kegiatan Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Nilai Perolehan Air Tanah, sub kegiatan Penghitungan, Perumusan dan Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah dan Sub Kegiatan Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Air Tanah dan melalui program pengelolaan mineral dan Batubara, kegiatan penetapan WIUP Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil (Sub Kegiatan Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan WIUP Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil; Sub Kegiatan Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal dalam negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut ; dan Sub Kegiatan Pengendalian dan Pengawasan pelaksanaan Harga patokan Mineral Bukan Logam dan Batuan) dan kegiatan Penatausahaan Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut, sub kegiatan Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri Pada Wilayah Usaha Pertambangan Daerah yang berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil laut.

Kesesuaian izin perusahaan air tanah dilakukan dengan cara pengawasan terhadap pelaksanaan kewajiban izin yang tertuang dalam dokumen perizinan perusahaan air tanah. Beberapa parameter yang menjadi penilaian adalah Volume pengambilan air tanah dan pelaporannya; Berfungsinya meteran air, sebagai bukti pembacaan/angka tertera untuk pengambilan air tanah; penghematan air, bukti penggunaan air yang bersumber dari PDAM; Pembuktian pajak air tanah; kesesuaian Sumur Peresapan Air Hujan (SPA) dan berita acara pembuatannya; serta identitas dan kondisi sumur resapan. Kegiatan pengawasan pemanfaatan air tanah dilakukan dengan melakukan koordinasi dan sinkronisasi

data perizinan perusahaan air tanah (Badan Geologi dan DPMPTSP DIY) dan data wajib pajak (BKAD Kabupaten dan Kota Yogyakarta), pengawasan perusahaan air tanah berdasarkan dokumen izin dan inventarisasi perusahaan air tanah tidak berizin, serta pelaksanaan sosialisasi dan eksposur untuk memaparkan hasil kegiatan. Untuk mendukung hal tersebut juga dilakukan kegiatan pembinaan terhadap pemegang izin agar mematuhi ketentuan perizinan perusahaan air tanah dan mempersiapkan ketentuan perpanjangan izin agar izin dapat tetap berlaku sehingga perusahaan air tanah tetap dalam koridor konservasi air tanah. Selain kegiatan pembinaan dan pengawasan, Pemda DIY masih berwenang dalam menetapkan Nilai Perolehan Air Tanah (NPA) sebagai dasar pengenaan pajak air tanah oleh Kabupaten/Kota. Basis data NPA juga berfungsi sebagai bahan pemantauan perusahaan air tanah yang dapat menjadi dasar kebijakan upaya konservasi air tanah oleh Pemda DIY sesuai dengan kewenangannya. Pelaksanaan penetapan NPA diawali dengan pengumpulan dan penghitungan volume pengambilan air tanah dilakukan pada wajib pajak setiap bulan dengan dibantu oleh P3K DIY (Petugas Pencatat Meteran Air). Penghitungan volume dilaksanakan dengan mekanisme pembacaan angka tertera pada meter air (meter air yang berfungsi dan sesuai standar SNI) yang dipasang pada setiap sumur dan perhitungan volume dengan menggunakan standar Peraturan Gubernur DIY nomor 43 Tahun 2014 tentang Tata Cara Penghematan Penggunaan Air Tanah bagi pengambilan air yang tidak terpasang meter air. Selanjutnya volume yang telah dihitung kemudian digunakan untuk menghitung Nilai Perolehan Air Tanah (NPA) sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri ESDM Nomor 20 tahun 2017 tentang Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah. Besaran NPA kemudian dijadikan dasar pengenaan pajak air tanah oleh Kabupaten dan Kota Yogyakarta. Untuk mengetahui kondisi air tanah, Pemda DIY melaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi ketinggian muka air tanah pada sumur pantau baik yang dimiliki oleh Pemda DIY maupun yang dimiliki oleh pemegang izin perusahaan air tanah. Total sumur pantau yang diawasi pada tahun 2023 sejumlah 45 sumur pantau dari total 51 sumur pantau yang terdapat di Kabupaten Sleman, Kota Yogyakarta, Kabupaten Bantul dan Kabupaten Kulon Progo. 6 sumur pantau tidak dapat dilakukan pengukuran dikarenakan mengalami penyumbatan dan sudah tidak dapat diakses kembali sehingga memerlukan perbaikan dan pembuatan sumur pantau baru. Dari Hasil monitoring dan evaluasi, rerata ketinggian muka air tanah pada tiap

Kabupaten/Kota masih dalam keadaan aman (<20 %) sesuai ketentuan Peraturan Daerah Nomor 5 tahun 2012 tentang Pengelolaan Air Tanah.

Dalam mendukung pelaksanaan kegiatan Pemantauan perusahaan Air pada Tahun 2023 dibentuk tim terintegrasi yang beranggotakan organisasi perangkat daerah DIY, Kabupaten dan Kota Yogyakarta sesuai dengan Surat Keputusan Gubernur DIY Nomor 41/TIM/2023 tentang Pembentukan Tim Terpadu Pemantauan Perusahaan Air Tanah untuk mendukung konservasi air tanah. Selain koordinasi dilaksanakan juga kunjungan lapangan bersama tim terpadu dengan melibatkan Badan Geologi pada tanggal 9 Agustus 2023 dengan lokasi peninjauan Kapanewon Gamping dan Ngaglik Kabupaten Sleman serta pada tanggal 10 Agustus 2023 dengan lokasi peninjauan Kota Yogyakarta dan Kapanewon Piyungan, Kabupaten Bantul.

Target izin perusahaan air tanah sesuai ketentuan pada Tahun 2023 adalah 144 izin dari baseline jumlah izin akhir TW 4 Tahun 2022 yaitu 315 izin setara dengan 45,45%. Pengambilan perusahaan air tanah di DIY, sampai dengan Bulan Desember 2023 yang menjadi wajib pajak (WP) berjumlah 2123 (dua ribu seratus dua puluh tiga) dengan rincian Kabupaten Bantul 331 WP; Kabupaten Kulon Progo 111 WP; Kabupaten Sleman 820 WP; Kabupaten Gunung Kidul 100 WP dan Kota Yogyakarta 761 WP. Perusahaan air tanah yang berizin dan masa berlakunya aktif pada Bulan Desember 2023 sejumlah 242 izin (Kabupaten Bantul 33 izin; Kabupaten Kulon Progo 6 izin; Kabupaten Sleman 103 izin; Kabupaten Gunung Kidul 14 izin dan Kota Yogyakarta 86 izin). Dengan adanya perubahan regulasi dan masa transisi atas perubahan regulasi terkait pengelolaan air tanah yang beralih ke pemerintah pusat, merupakan salah satu faktor penurunan jumlah izin perusahaan air tanah, di banding dengan jumlah izin perusahaan air tanah pada Tahun 2022 yaitu 315 izin.

Kesesuaian izin usaha pertambangan dilakukan dengan cara pengawasan terhadap aspek tata Kelola perusahaan pertambangan dan aspek kaidah teknik pertambangan yang baik. Kegiatan ini dilaksanakan dengan cara sinkronisasi data dengan instansi terkait, pengawasan terhadap pelaksanaan izin usaha pertambangan, pembuatan dan pemasangan papan larangan penambangan, inventarisasi Penambangan Tanpa Izin (PETI), workshop dan ekspose kegiatan. Tim Terpadu Pengawasan dan Pengendalian Kegiatan Pertambangan yang telah dilaksanakan mulai Tahun 2022 yang beranggotakan Aparat Penegak Hukum,

Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Daerah DIY dan Kabupaten serta Kementerian/Pemerintah Pusat dilanjutkan pada Tahun 2023 berdasarkan Surat Keputusan Gubernur DIY Nomor 20/Tim/2023 tentang Pembentukan Tim Terpadu Pengawasan dan Pengendalian Kegiatan Pertambangan. Tim terpadu telah melaksanakan koordinasi secara berkala dan melakukan kunjungan lapangan bersama pada 10 Kapanewon yaitu Kapanewon Gedangsari (Gunungkidul), Lendah (Bantul), Minggir (Sleman), Pajangan (Bantul), Paliyan (Gunungkidul), Piyungan (Bantul), Pleret (Bantul), Prambanan (Sleman), Sentolo (Bantul), dan Srandakan Bantul).

Target izin usaha pertambangan sesuai kaidah pertambangan yang baik pada tahun 2023 adalah 44 izin dari baseline jumlah izin akhir TW 4 tahun 2022 yaitu 130 izin setara dengan 33,61 %. Data izin usaha pertambangan aktif sampai dengan Desember 2023 adalah 188 izin (73 IPR; 58 IUP Eksplorasi; 8 SIPB; 4 IUP Penjualan dan 45 IUP OP).

Dalam hal pemberian rekomendasi dan persetujuan terkait pelayanan perizinan sesuai amanat Perpres 55 tahun 2022 tentang Pendelegasian Pemberian Perizinan Berusaha di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara, sampai dengan Akhir tahun 2023 Pemda DIY telah memberikan rekomendasi/persetujuan sejumlah:

- 1) 18 (delapan belas) persetujuan RKAB IUP Eksplorasi
- 2) 14 (empat belas) persetujuan RKAB IUP Operasi Produksi
- 3) 5 (lima) persetujuan rencana teknis Penambangan Surat Izin Penambangan Batuan (SIPB)
- 4) 15 (lima belas) persetujuan perpanjangan IUP Operasi Produksi
- 5) 9 (sembilan) persetujuan pencairan Jaminan Reklamasi dan Pasca Tambang
- 6) 4 (empat) persetujuan IUP untuk Penjualan
- 7) Proses evaluasi permohonan konfirmasi wilayah sejumlah 253 (dua ratus lima puluh tiga) permohonan, yang terdiri atas 142 (seratus empat puluh dua) sesuai dengan Kawasan Peruntukan Pertambangan dan 111 (seratus sebelas) tidak sesuai dengan Kawasan Peruntukan Pertambangan

Ketercapaian target didukung beberapa faktor pendorong yaitu:

1. Adanya Peraturan presiden Nomor 55 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Perizinan Berusaha di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara serta adanya Peraturan Gubernur DIY Nomor 39 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan

Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Logam, Mineral Bukan Logam, Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu, dan Batuan yang mengatur terkait perizinan, pembinaan, dan pengawasan usaha pertambangan.

2. Adanya koordinasi lintas sektor Pertambangan sesuai Surat Keputusan Gubernur DIY Nomor 20/Tim/2023 tentang Pembentukan Tim Terpadu Pengawasan dan Pengendalian Kegiatan Pertambangan dengan beranggotakan dari Organisasi Perangkat Daerah DIY/Kabupaten, Aparat Penegak Hukum dan Kementerian.
3. Adanya Koordinasi lintas sektor Pemantauan perusahaan Air Tanah sesuai Surat Keputusan Gubernur DIY Nomor 41/TIM/2023 tentang Pembentukan Tim Terpadu Pemantauan Perusahaan Air Tanah untuk mendukung konservasi air tanah yang beranggotakan Organisasi Perangkat Daerah DIY, Kabupaten dan Kota.

Adapun dalam proses pencapaian target juga terdapat juga faktor penghambat yaitu

1. Adanya Surat Edaran Menteri ESDM Nomor 11. E/GL.01/BGL/2022 tentang pelayanan Perizinan Berusaha dan Persetujuan Penggunaan air tanah yang mengatur perizinan perusahaan air tanah beralih ke Pemerintah Pusat menyebabkan pengurusan perizinan air tanah masih terhambat/masa transisi dari kewenangan daerah menjadi kewenangan pusat, dimana proses perizinan melalui OSS masih terkendala beberapa persyaratan teknis dan spesifikasi yang belum ada pengaturannya. Sehingga pengguna air tanah/perusahaan air tanah masih perlu sosialisasi dan pemahaman terkait mekanisme pengurusan izin.
2. belum terbitnya aturan teknis dari Keputusan Menteri Energi Sumber Daya Mineral Nomor 259.K/GL.01/MEM.G/2022 tentang Standar Penyelenggaraan Izin Perusahaan Air Tanah tanggal 19 Oktober 2022 menyebabkan sumur produksi eksisting yang belum berizin dan sumur produksi yang telah habis masa berlakunya tidak dapat mengajukan perizinan perusahaan air tanah karena yang diatur dalam peraturan tersebut hanya permohonan perizinan perusahaan air tanah baru dan permohonan perpanjangan izin perusahaan air tanah.

3. Kurangnya kepedulian pemegang izin dalam melaksanakan kewajiban perizinan yang mengakibatkan pelaksanaan kegiatannya tidak sesuai dengan rekomendasi dalam dokumen perizinan dan dokumen lingkungan.
4. penertiban kegiatan Penambangan Tanpa Izin (PETI) kurang optimal sehingga pemohon izin tidak segera memproses perizinannya atau IUP berizin merasa kalah bersaing dengan PETI yang bisa menjual dengan harga lebih murah

Tabel III.58. Target dan Realisasi Kinerja Sasaran 8

No	Sasaran	Indikator	Capaian 2022	2023			Target Akhir Renstra (2026)	Capaian s/d 2023 terhadap 2026 (%)
				Target	Realisasi	% Realisasi		
1	Meningkatnya kesesuaian izin perusahaan air tanah dan pertambangan terhadap rencana tata ruang	kesesuaian izin perusahaan air tanah dan pertambangan terhadap rencana tata ruang	NA	40,31%	40,31	100 (40,31/40,31) x100%	57,85 %	69,68 (40,31/57,85) x100 %
	<u>Meta Indikator:</u> ((Jumlah izin air tanah yang sesuai ketentuan + Jumlah izin pertambangan sesuai kaidah pertambangan yang baik) : Total jumlah izin x 100%..							

Sumber : Data DPUPESDM DIY, 2023

Analisis Ketercapaian Sasaran 8: Meningkatnya kesesuaian izin perusahaan air tanah dan pertambangan terhadap rencana tata ruang adalah sebagai berikut:

- a. Tercapai 40,31%, dengan demikian prosentase realisasi terhadap target sebesar 100% (tercapai/sesuai target).
- b. Tidak dapat dibandingkan dengan tahun lalu, karena perbedaan sasaran, indikator sasaran dan meta indikator.
- c. Capaian target indikator pada tahun 2023 terhadap target tahun 2026 sebesar 69,68%

Keberhasilan capaian Sasaran 8, dengan Indikator kesesuaian izin pengusahaan air tanah dan pertambangan terhadap rencana tata ruang tersebut didukung oleh keberhasilan program, kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut:

Tabel III.59 Capaian Program, Kegiatan, dan SubKegiatan terhadap Sasaran 8

NO	Program	Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Target	realisasi	%Capaian
1	PROGRAM PENGELOLAAN ASPEK KEGEOLOGIAN		Peningkatan pelaksanaan pengusahaan air tanah yang sesuai ketentuan	45,45%	45,45%	100%
			Rerata penurunan muka air tanah dalam kategori aman	< 20 %	< 20 %	100 %
1.1		Penetapan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi				100
1.1.1		Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah	<ol style="list-style-type: none"> Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Zona Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi : Monitoring dan Evaluasi Fluktuasi Muka Air Tanah : Pembinaan kepada Pelaku Pengusahaan Air Tanah : Pemeliharaan AWLR dan Sumur Pantau Air Tanah Dalam : Pendampingan Teknis Pemanfaatan Zona Konservasi Air Tanah : Workshop pembinaan kepada Pelaku Pengusahaan Air Tanah : 	5 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 1 Paket 1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan	5 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 1 Paket 1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan	100
1.2		Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi				100
1.2.1		Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Nilai Perolehan Air Tanah	<ol style="list-style-type: none"> Jumlah Dokumen Data dan Informasi Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi yang Terkumpul : 	2 Dokumen 2 Dokumen 2 Dokumen	2 Dokumen 2 Dokumen 2 Dokumen	100

NO	Program	Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Target	realisasi	%Capaian
			2. Pendataan dan Pencatatan Volume Air Tanah untuk Penghitungan Nilai Perolehan Air Tanah di DIY :			
1.2.2		Penghitungan, Perumusan dan Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah	1. Jumlah Laporan Hasil Penghitungan, Perumusan dan Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi : 2. Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah : 3. Tenaga Ahli Penyusunan Instrumen Perhitungan Nilai Perolehan Air Tanah :	2 Laporan 1 Laporan 1 laporan	2 Laporan 1 Laporan 1 laporan	100
1.2.3		Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Air Tanah	1. Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Implementasi Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi : 2. Pemantauan, Pengendalian, dan Evaluasi Pengelolaan Air Tanah di DIY : 3. Pengelolaan Aplikasi SIPATA :	3 Laporan 2 laporan 1 laporan	3 Laporan 2 laporan 1 laporan	100
2	PROGRAM PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA		Peningkatan pelaksanaan usaha pertambangan sesuai kaidah pertambangan yang baik	33,61%	33,61%	100%
			Persentase Pengusahaan Kawasan Peruntukan Pertambangan	7,84 %	9,17 %	116,9 %
2.1		Penetapan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil				100
2.1.1		Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan	1. Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Pemanfaatan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan	3 Laporan 2 laporan 1 Laporan	3 Laporan 2 laporan 1 Laporan	100

NO	Program	Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Target	realisasi	%Capaian
		Logam dan Batuan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil	Logam, Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu dan Batuan dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi atau Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil : 2. Pengawasan dan Pengendalian Pemanfaatan Wilayah Izin Usaha Pertambangan di DIY : 3. Sosialisasi Pemantauan dan Pengendalian Pemanfaatan Wilayah Pertambangan :			
2.2		Penatausahaan Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut				100
2.2.1		Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri Pada Wilayah Usaha Pertambangan Daerah yang berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil laut	1. Jumlah Dokumen Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dalam Rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut : 2. Pembinaan Pelaksanaan Usaha pertambangan : 3. Penyusunan Materi Teknis Rancangan Perubahan Perda	4 Dokumen 1 Laporan 1 Dokumen 1 laporan	4 Dokumen 1 Laporan 1 Dokumen 1 laporan	100

NO	Program	Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Target	realisasi	%Capaian
			<p>Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pengelolaan usaha Pertambangan Mineral Logam, Mineral Bukan Logam dan Batuan :</p> <p>4. Rekomendasi Teknis/Persetujuan Izin Usaha Pertambangan :</p> <p>5. Workshop Pembinaan Pelaksanaan Usaha Pertambangan :</p>			
2.2.2		<p>Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut</p>	<p>1. Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelaksanaan Perizinan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dalam Rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut :</p> <p>2. Pendataan dan Penghitungan Volume Produksi Usaha Pertambangan di DIY :</p> <p>3. Pengawasan dan Pengendalian Usaha Pertambangan di DIY :</p> <p>4. Pengelolaan Aplikasi SIPBANG :</p>	<p>5 Laporan</p> <p>2 laporan</p> <p>2 laporan</p> <p>1 aplikasi</p>	<p>5 Laporan</p> <p>2 laporan</p> <p>2 laporan</p> <p>1 aplikasi</p>	100
2.3		Penetapan Harga Patokan Mineral Bukan Logam dan Batuan				100
2.3.1		<p>Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Harga Patokan Mineral Bukan Logam dan Batuan</p>	<p>1. Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Harga Patokan Mineral Bukan Logam :</p> <p>2. Pengawasan dan Pengendalian Pelaksanaan Harga Patokan Mineral Bukan Logam dan Batuan :</p> <p>3. Survey harga patokan mineral bukan logam dan batuan di DIY :</p>	<p>4 Laporan</p> <p>2 laporan</p> <p>2 laporan</p>	<p>4 Laporan</p> <p>2 laporan</p> <p>2 laporan</p>	100

Tabel III.60. Kinerja Program Sasaran 8

No	Program	Indikator	Capaian 2022	2023			Target Akhir Renstr a (2023)	Capaian s/d 2023 terhadap 2026 (%)
				Target	Realisasi	% Realisasi		
1	Program Pengelolaan Aspek Kegeologian	Peningkatan pelaksanaan perusahaan air tanah yang sesuai ketentuan	NA	45,45 %	45,45%	100%	45,45%	NA
2	Program Pengelolaan Aspek Kegeologian	Rerata penurunan muka air tanah dalam kategori aman	< 20 %	< 20 %	< 20 %	100 %	< 20 %	100 %
3	Program Pengelolaan Mineral Dan Batubara	Peningkatan pelaksanaan usaha pertambangan sesuai kaidah pertambangan yang baik	NA	33,61 %	33,61%	100%	33,61%	NA
4	Program Pengelolaan Mineral Dan Batubara	Persentase Perusahaan Kawasan Peruntukan Pertambangan	9,14 %	7,84 %	9,17 %	116,9 %	7,96 %	115,2 %

Sumber : Data DPUPESDM DIY, 2023

Tabel III.61. Kinerja Keuangan dan Fisik Program Dan Kegiatan Sasaran 8

NO	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Keu (%)	Fisik (%)
1	PROGRAM PENGELOLAAN ASPEK KEGEOLOGIAN	226.062.500	225.603.067	99,79	100
1.1	Penetapan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	226.062.500	225.603.067	99,79	100
1.1.1	Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah	226.062.500	225.603.067	99,8	100
1.2	Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	242.679.500	242.260.300	99,83	100
1.2.1	Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Nilai Perolehan Air Tanah	98.957.500	98.826.206	99,87	100
1.2.2	Penghitungan, Perumusan dan Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah	20.000.000	19.970.603	99,85	100
1.2.3	Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Air Tanah	123.722.000	123.463.491	99,79	100

NO	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Keu (%)	Fisik (%)
2	PROGRAM PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA	525.398.100	518.375.455	98,66	100
2.1	Penetapan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil	55.817.000	55.576.517	99,57	100
2.1.1	Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil	55.817.000	55.576.517	99,57	100
2.2	Penatausahaan Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut	422.265.100	415.597.511	98,42	100
2.2.1	Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri Pada Wilayah Usaha Pertambangan Daerah yang berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil laut	229.081.600	229.013.895	99,97	100
2.2.2	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut	193.183.500	186.583.616	96,58	100
2.3	Penetapan Harga Patokan Mineral Bukan Logam dan Batuan	47.316.000	47.201.427	99,76	100
2.3.1	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Harga Patokan Mineral Bukan Logam dan Batuan	47.316.000	47.201.427	99,76	100
	Jumlah	751.460.600	743.978.522	99,00	100

Sumber : Data DPUPESDM DIY, 2023

Tabel III.62 Analisa Penyebab Keberhasilan Sasaran 8

No	Indikator	Pendorong	Penghambat	Solusi
1	kesesuaian izin air tanah dan pertambangan terhadap tata ruang	<ul style="list-style-type: none"> Adanya Peraturan presiden Nomor 55 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Perizinan Berusaha di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara serta adanya Peraturan Gubernur DIY Nomor 39 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Logam, Mineral Bukan Logam, Mineral Logam Jenis Tertentu, dan Batuan yang mengatur terkait perizinan, pembinaan, dan pengawasan usaha pertambangan Adanya koordinasi lintas sektor Pertambangan sesuai Surat Keputusan Gubernur DIY Nomor 20/Tim/2023 tentang Pembentukan Tim Terpadu Pengawasan dan Pengendalian Kegiatan Pertambangan dengan beranggotakan dari Organisasi Perangkat Daerah DIY/Kabupaten, Aparat Penegak Hukum dan Kementerian Adanya Koordinasi lintas sektor Pemantauan perusahaan Air Tanah sesuai Surat Keputusan Gubernur DIY Nomor 41/TIM/2023 tentang Pembentukan Tim Terpadu Pemantauan Perusahaan Air Tanah untuk mendukung konservasi air tanah yang beranggotakan Organisasi Perangkat Daerah DIY, Kabupaten dan Kota 	<ul style="list-style-type: none"> Adanya Surat Edaran Menteri ESDM Nomor 11. E/GL.01/BGL/2022 tentang pelayanan Perizinan Berusaha dan Persetujuan Penggunaan air tanah Belum terbitnya aturan teknis yang mengatur penataan perizinan sumur produksi eksisting yang belum berizin dan sumur produksi yang habis masa berlakunya Kurangnya kepedulian pemegang izin dalam melaksanakan kewajiban perizinan penertiban kegiatan Penambangan Tanpa Izin (PETI) kurang optimal sehingga pemohon izin tidak segera memproses perizinannya atau IUP berizin merasa kalah bersaing dengan PETI yang bisa menjual dengan harga lebih murah 	<ul style="list-style-type: none"> Koordinasi dan kerjasama secara intensif dengan Pemerintah Pusat (Badan Geologi) Sosialisasi perizinan kepada pengguna air tanah dan perusahaan pertambangan Pemantauan perusahaan air tanah secara terpadu dilaksanakan secara berkelanjutan Pengawasan dan pengendalian perusahaan pertambangan diintensifkan disertai penindakan hukum bagi kegiatan PETI

Sumber : Data DPUPESDM DIY, 2023

Gambar III.14 Foto Kegiatan Peningkatan Kesesuaian Izin Pengusahaan Air Tanah Dan Pertambangan Terhadap Rencana Tata Ruang

	
<p>Sosialisasi Pemantauan, Pengendalian dan Evaluasi Pengelolaan Air Tanah</p>	
	
	
<p>Pengawasan dan Pengendalian Usaha Pertambangan</p>	
	
<p>Pengawasan dan Pengendalian Pemanfaatan Wilayah Izin Usaha Pertambangan</p>	<p>Pendataan Pertambangan Tanpa Izin</p>



Sosialisasi Pemantauan dan Pengendalian Pemanfaatan Wilayah Pertambangan

Pendataan dan Penghitungan Volume Produksi Usaha Pertambangan

Tim Terpadu Pengawasan dan Pengendalian Kegiatan Pertambangan

Pemasangan Papan Larangan Penambangan Bersama Tim Terpadu

Diskusi Pengelolaan Aplikasi SIPBANG

Survey dan Wasdal Harga Patokan Mineral Bukan Logam dan Batuan

Sumber: Data DPUPESDM DIY, 2023

1.1.9. Sasaran 9 : Meningkatnya Tata Kelola Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Perangkat Daerah

Tolok ukur capaian sasaran meningkatnya meningkatnya Tatakelola Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Perangkat Daerah sebagaimana Indikator dan meta indikator adalah sebagai berikut:

Tabel III. 63 Rumusan Indikator dan Formulasi Perhitungan Sasaran 9

NO	Sasaran	Indikator	Meta Indikator
1	2	3	4
1	Meningkatnya Tatakelola Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Perangkat Daerah	Kategori RB Perangkat Daerah	Hasil Evaluasi Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah

Sumber data diolah dari Hasil Evaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi pada 37 (tiga puluh tujuh) OPD. Pelaksanaan evaluasi Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah Tahun 2023, menggunakan indikator yang dirumuskan oleh Perangkat Daerah *leading sector* Reformasi Birokrasi General dan Perangkat Daerah Koordinator Reformasi Birokrasi Tematik. Indikator tersebut merupakan indikator yang diturunkan dari Keputusan Menteri PAN dan RB RI Nomor 739 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Evaluasi Reformasi Birokrasi Tahun 2023.

Evaluasi Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah Tahun 2023 menggunakan skema dan bobot nilai sebagai berikut:

Tabel III. 64 Skema dan bobot nilai Evaluasi Reformasi Perangkat Daerah

No	Uraian	Bobot	Keterangan	
Reformasi Birokrasi General				
A	Capaian Sasaran Strategis	50	Diukur dengan indikator turunan Keputusan Menteri PAN dan RB RI Nomor 739 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Evaluasi Reformasi Birokrasi Tahun 2023	
	Sasaran 1 : Tata Kelola pemerintahan Digital yang Efektif Lincah dan Kolaboratif	26		
	Sasaran 2 : Budaya Birokrasi BerAKHLAK dengan ASN yang profesional	24		
B	Capaian Pelaksanaan Kebijakan RB	40		
	Sasaran 1 : Tata Kelola pemerintahan Digital yang Efektif Lincah dan Kolaboratif	28		
	Sasaran 2 : Budaya Birokrasi BerAKHLAK dengan ASN yang profesional	12		
Total RB General		100		
Reformasi Birokrasi Tematik				Diukur dengan memetakan kontribusi peran
A	Sasaran Pelaksanaan RB Tematik	5		
B	Capaian Dampak RB Tematik	15	Perangkat Daerah dalam pencapaian target RB Tematik	
Total RB Tematik		20		
Total Nilai RB		120		

Hasil Evaluasi Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel III. 65 Hasil Evaluasi Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah tahun 2023

No	Unit Kerja	RB Gener al	RB Tematik	Nilai RB OPD 2023	Kate gori	Predikat	Nilai RB OPD 2022	Nilai RB OPD 2021
1	Biro Tata Pemerintahan Setda DIY	83,77	5,81	89,58	A	Memuaskan	84,76	83,97
2	Biro Hukum Setda DIY	83,93	5,30	89,23	A	Memuaskan	83,55	81,75
3	Biro Organisasi Setda DIY	86,97	5,41	92,38	A	Memuaskan	83,91	83,9
4	Biro Umum Hubungan Masyarakat dan Protokol Setda DIY	83,04	4,63	87,67	A	Memuaskan	83,43	82,01
5	Biro Administrasi Perekonomian dan SDA Setda DIY	83,46	8,00	91,46	A	Memuaskan	81,68	71,8
6	Biro Pengembangan Infrastruktur Wilayah dan Pembiayaan Pembangunan Setda DIY	85,25	6,49	91,74	A	Memuaskan	83,38	77,87
7	Biro Bina Mental Spiritual Setda DIY	83,67	4,50	88,17	A	Memuaskan	82,39	81,59
8	Biro Bina Pemberdayaan Masyarakat Setda DIY	83,39	5,25	88,64	A	Memuaskan	82,51	80,29
9	Paniradya Kaistimewan	86,75	6,43	93,18	A	Memuaskan	82,84	79,26
10	Sekretariat DPRD DIY	77,60	4,33	81,93	A	Memuaskan	82,75	77,75
11	Inspektorat DIY	86,83	6,30	93,13	A	Memuaskan	86,43	85,32
12	Dinas Pariwisata DIY	82,67	5,73	88,40	A	Memuaskan	78,73	77,15
13	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah DIY	85,72	6,87	92,59	A	Memuaskan	83,77	82,86
14	Dinas Perindustrian dan Perdagangan DIY	83,43	8,07	91,50	A	Memuaskan	82,90	81,34
15	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY	82,60	6,97	89,57	A	Memuaskan	83,90	82,09
16	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY	83,22	5,75	88,97	A	Memuaskan	83,32	80,35
17	Dinas Kelautan dan Perikanan DIY	83,95	6,81	90,76	A	Memuaskan	83,20	81,31
18	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi DIY	84,74	6,71	91,45	A	Memuaskan	84,35	81,94
19	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Energi Sumber Daya Mineral DIY	81,34	6,91	88,25	A	Memuaskan	82,15	77,75
20	Dinas Perhubungan DIY	83,79	5,25	89,04	A	Memuaskan	81,56	78,3
21	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandhala Sarta Tata Sasana) DIY	85,39	4,80	90,19	A	Memuaskan	80,70	76,54

No	Unit Kerja	RB Gener al	RB Tematik	Nilai RB OPD 2023	Kate gori	Predikat	Nilai RB OPD 2022	Nilai RB OPD 2021
22	Dinas Komunikasi dan Informatika DIY	86,71	8,25	94,96	A	Memuaskan	84,66	82,18
23	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu DIY	86,42	6,17	92,59	A	Memuaskan	83,65	81,81
24	Dinas Kesehatan DIY	86,10	6,62	92,72	A	Memuaskan	84,26	83,17
25	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY	76,32	6,10	82,42	A	Memuaskan	82,75	79,97
26	Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah DIY	84,42	2,36	86,78	A	Memuaskan	82,74	81,13
27	Dinas Sosial DIY	86,13	7,00	93,13	A	Memuaskan	83,85	81,59
28	Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan) DIY	82,35	4,24	86,59	A	Memuaskan	81,84	76,58
29	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk DIY	84,43	5,52	89,95	A	Memuaskan	83,43	82,6
30	Satuan Polisi Pamong Praja DIY	81,91	4,00	85,91	A	Memuaskan	80,81	77,27
31	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah DIY	88,11	7,32	95,43	A	Memuaskan	84,80	84,23
32	Badan Pengelola Keuangan dan Aset DIY	88,56	5,85	94,41	A	Memuaskan	82,73	75,73
33	Badan Kepegawaian Daerah DIY	90,47	4,10	94,57	A	Memuaskan	85,45	84,31
34	Badan Pendidikan dan Pelatihan DIY	87,61	4,44	92,05	A	Memuaskan	84,63	82,44
35	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik DIY	83,74	4,97	88,71	A	Memuaskan	80,54	74,66
36	Badan Penanggulangan Bencana Daerah DIY	82,20	3,65	85,85	A	Memuaskan	76,07	71,24
37	Badan Penghubung Daerah DIY	79,88	2,53	82,41	A	Memuaskan	81,69	76,51
	Nilai Rata-Rata	84,24	5,66	89,90			82,87	80,02

Kinerja sasaran meningkatnya Tatakelola Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Dinas PUPESDM DIY pada tahun 2023 dapat digambarkan sebagai berikut:

Tabel III. 66 Target dan Realisasi Kinerja Sasaran 9

No	Indikator Sasaran	Realisasi 2022	2023			Target Akhir Renstra (2026)	Capaian s/d 2023 terhadap target 2026(%)
			Target	Realisasi	% Realisasi*		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Kategori RReformasi Birokrasi Perangkat Daerah <u>Meta Indikator :</u> Kategori RB	82,15 %	A atau 2	A atau 2 (Penilaian atas RB Tematik dan RB General oleh Dinas PUPESDM DIY)	100 Prosentase realisasi terhadap target (target dibagi capaian dikalikan 100%)dengan metode invert	A atau 2	100% (2/2)x100%

Analisis Ketercapaian Sasaran: Meningkatnya Tatakelola Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Perangkat Daerah

- a. Tercapai A, dengan demikian prosentase realisasi terhadap target sebesar 100% (tercapai/sesuai target).
- b. Dibandingkan realisasi tahun lalu sebesar 82,15%, terdapat kenaikan sebesar 6,1%.
- c. Capaian target indikator pada tahun 2023 terhadap target tahun 2026 sebesar 100%

Keberhasilan capaian Sasaran 9, dengan Indikator Kategori RB Perangkat Daerah tersebut didukung oleh keberhasilan program, kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut:

Tabel III.67 Capaian Program, Kegiatan, dan SubKegiatan terhadap Sasaran 9

NO	Program	Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Target	realisasi	%Capaian
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		Kategori RB Perangkat Daerah	A	A	100
1.1		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				100
1.1.1		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1. Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah : 2. Perubahan Renja 2023 : 3. Renja SKPD TH 2024 :	4 Dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen	4 Dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen	100

NO	Program	Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Target	realisasi	%Capaian
			4. Renstra 2023-2026 : 5. ROPK :			
1.1. 2		Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	1. Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD : 2. DPA : 3. DPA-P : 4. RKA : 5. RKA-P :	4 dokumen 1 dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen	4 dokumen 1 dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen	100
1.1. 3		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1. Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah : 2. Bahan penyusunan LKPJ dan LPPD Urusan PU, Perumahan & ESDM TH 2022 : 3. Laporan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Dan Kegiatan SKPD : 4. Publikasi : 5. Tersusunnya LKJIP TH 2022 :	4 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan	4 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan	100
1.2		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				100
1.2. 1		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1. Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN : 2. Gaji dan Tunjangan ASN :	433 Orang/ Bulan 1 tahun	433 Orang/ Bulan 1 tahun	100
1.2. 2		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1. Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD : 2. Jasa Administrasi Keuangan :	1 Dokumen 1 Tahun	1 Dokumen 1 Tahun	100
1.2. 3		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1. Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD : 2. Laporan Aset dan Laporan Persediaan Tahunan : 3. Laporan Keuangan Audited : 4. Laporan Keuangan Tahunan Gabungan :	3 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan	3 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan	100

NO	Program	Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Target	realisasi	%Capaian
1.2. 4		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1. Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD : 2. Laporan Aset dan Laporan Persediaan Semesteran : 3. Laporan Aset dan Laporan Persediaan Triwulan : 4. Laporan Keuangan bulanan : 5. Laporan Keuangan Semester : 6. Laporan Keuangan Triwulan :	5 Laporan 2 Laporan 4 Laporan 12 Laporan 2 Laporan 4 Laporan	5 Laporan 2 Laporan 4 Laporan 12 Laporan 2 Laporan 4 Laporan	100
1.3		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				100
1.3. 1		Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1. Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD : 2. Pajak PBB :	1 Laporan 1 Tahun	1 Laporan 1 Tahun	100
1.3. 2		Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1. Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD : 2. Jasa Pengelola Barang :	1 Laporan 1 Tahun	1 Laporan 1 Tahun	100
1.4		Administrasi Umum Perangkat Daerah				100
1.4. 1		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1. Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan : 2. Alat Listrik :	1 Paket 34 jenis	1 Paket 34 jenis	100
1.4. 2		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1. Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan : 2. Alat Tulis Kantor : 3. Alat Tulis Kantor Penataan Arsip : 4. Kertas :	4 Paket 62 jenis 22 jenis 5 jenis	4 Paket 62 jenis 22 jenis 5 jenis	100
1.4. 3		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	1. Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan : 2. Bed Cover : 3. Belanja pengisian tabung gas :	4 Paket 26 Buah 12 Kali 8 Unit 1 Tahun	4 Paket 26 Buah 11 Kali 8 Unit 1 Tahun	100

NO	Program	Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Target	realisasi	%Capaian
			4. Belanja pengisian tabung pemadam kebakaran : 5. Solar Operasional Genset :			
1.4.4		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	1. Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan : 2. Barang Cetak : 3. Penggandaan : 4. Penggandaan Penataan Arsip :	2 Paket 8 jenis 148313 Lembar 16190 Lembar	2 Paket 8 jenis 148313 Lembar 16183 Lembar	100
1.4.5		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	1. Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan : 2. Buku Bacaan Perpustakaan : 3. Surat Kabar/Majalah :	2 Dokumen 66 Buku 2 SKH	2 Dokumen 66 Buku 2 SKH	100
1.4.6		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1. Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD : 2. Biaya Rapat Penataan Arsip : 3. Konsultasi dan Koordinasi Dinas PUP&ESDM DIY Dalam Jawa Terlaksana dengan baik : 4. Konsultasi dan Koordinasi Dinas PUP&ESDM DIY Luar Jawa Terlaksana dengan baik : 5. Koordinasi Dinas PUP&ESDM Dalam Daerah Terlaksana dengan baik : 6. Makan dan minum rapat sesuai kebutuhan :	2 Dokumen 180 OS 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 3300 OS	2 Dokumen 180 OS 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 3300 OS	100
1.5		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				100
1.5.1		Pengadaan Mebel	1. Jumlah Paket Mebel yang Disediakan : 2. Meja Rias :	1 Paket 13 Buah	1 Paket 13 Buah	100
1.5.2		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1. Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan : 2. CCTV : 3. Laptop : 4. Pompa Air : 5. Printer :	11 Unit 1 Paket 1 Unit 1 Unit 2 Unit 1 Unit 4 Unit	10 Unit 1 Paket 1 Unit 1 Unit 2 Unit 1 Unit 4 Unit	100

NO	Program	Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Target	realisasi	%Capaian
			6. Printer A3 : 7. Komputer PC :			
1.6		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				100
1.6.1		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1. Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat : 2. Jasa Surat menyurat :	1 Laporan 1 Tahun	1 Laporan 1 Tahun	100
1.6.2		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1. Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan : 2. Jasa Komunikasi, Listrik, Air :	1 Laporan 1 Tahun	1 Laporan 1 Tahun	100
1.6.3		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1. Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan : 2. Jasa Keamanan Kantor : 3. Jasa Kebersihan Kantor : 4. Jasa Laundry : 5. Jasa Pembasmi Tikus : 6. Jasa Tenaga Kearsipan : 7. Pajak Smpah dan Retribusi Sampah : 8. Retribusi Pajak Daerah :	7 Laporan 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1440 OH 1 Tahun 1 Tahun	7 Laporan 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1422 OH 1 Tahun 1 Tahun	100
1.7		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				100
1.7.1		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1. Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya : 2. Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional : 3. Terpeliharanya Kendaraan dinas/operasional SKPD :	87 Unit 87 Unit 87 Unit	87 Unit 87 Unit 87 Unit	100
1.7.2		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1. Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara : 2. Pemeliharaan alat-alat berat : 3. Pemeliharaan alat-alat kantor : 4. Pemeliharaan alat-alat komunikasi : 5. Pemeliharaan perlengkapan kantor :	12 Unit 3 jenis 3 jenis 4 jenis 2 jenis	10 Unit 3 jenis 3 jenis 2 jenis 2 jenis	100

NO	Program	Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Target	realisasi	%Capaian
1.7.3		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1. Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi : 2. Pemeliharaan Gedung BP3ESDM pingit : 3. Pemeliharaan Rutin Gedung Kantor Dinas PUPESDM DIY : 4. Pemeliharaan Wisma Kaliurang : 5. Penataan Jaringan Internet : 6. Rehab Gedung Bina Marga :	4 Unit 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket	4 Unit 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket	100
1.7.4		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1. Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi : 2. Rehabilitasi Pagar Kantor BP3ESDM Gunungkidul :	1 Unit 1 Paket	1 Unit 1 Paket	100

3.2 Capaian Kinerja Lainnya

3.2.1 Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pekerjaan Umum

3.2.1.1 Jenis Pelayanan Dasar SPM Bidang Pekerjaan Umum Daerah Provinsi

Berdasarkan Permendagri No. 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal terdapat 2 jenis pelayanan untuk pemerintah provinsi yaitu:

1. Pemenuhan kebutuhan air minum curah lintas daerah kabupaten/kota.
2. Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik regional lintas daerah kabupaten/ kota

Sesuai Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 29 /PRT/M/2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat disebutkan bahwa pada pasal 7 sebagai penerima pelayanan dasar pada SPM Pekerjaan Umum Pemerintah Daerah Provinsi terdiri atas :

1. Penyelenggara sistem penyediaan air minum oleh Badan Usaha Milik Daerah dan UPT Pemerintah Kabupaten Kota yang menjadi penerima air minum curah lintas Kabupaten / Kota.
2. Rumah Tangga yang termasuk dalam wilayah pelayanan pengolahan air limbah domestik regional, terutama diprioritaskan pada masyarakat miskin

atau tidak mampu dan berdomisili pada area berisiko pencemaran air limbah domestik dan dekat badan air.

Masyarakat miskin atau tidak mampu yang berdomisili pada area berisiko pencemaran air limbah domestik dan dekat badan air sesuai amanat Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat nomor 29/PRT/M/2018 adalah masyarakat miskin/tidak mampu tersebar di daerah APY (Aglomerasi Perkotaan Yogyakarta), sesuai table dibawah ini :

Tabel III.68 Jumlah Penduduk Miskin Atau Tidak Mampu Yang Berisiko Pencemaran Air Limbah Domestik dan Dekat Badan Air di DIY Tahun 2023

No	Wilayah	Jumlah Penduduk Miskin atau Tidak Mampu Yang Berisiko Pencemaran Air Limbah Domestik dan Dekat Badan Air
1	Kota Yogyakarta	34.070
2	Kab. Bantul	130.000
3	Kab. Sleman	108.930
	Jumlah	273.000

Sumber : Dataku Bappeda DIY, 2023

3.2.1.2 Target Pencapaian SPM Bidang Pekerjaan Umum Oleh Daerah

Tabel III.69 Target Pencapaian SPM di Bidang Pekerjaan Umum oleh Daerah Tahun 2023

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Jumlah Penerima Layanan	Target Capaian
1.	Pemenuhan kebutuhan air minum curah lintas Kabupaten/kota	Jumlah Warga Negara yang memperoleh kebutuhan air minum curah lintas kabupaten/ kota	152.292 Jiwa	100 %
2.	Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik regional lintas kabupaten/kota	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik regional lintas kabupaten/ kota	136.025 jiwa	100 %

Sumber: Dinas PUPESDM DIY, 2023

3.2.1.3 Anggaran SPM Pekerjaan Umum

Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2023

NO	PENDANAAN	PAGU
1	APBD DI YOGYAKARTA	6,000,056,739,358
2	ALOKASI ANGGARAN SATKER PERANGKAT DAERAH	551,600,894,125
3	ALOKASI ANGGARAN PENERAPAN SPM PADA SATKER PD	0

NO	PENDANAAN	PAGU
	APBD	0
	A. APBD MURNI	18.289.652.046
	B. APBD DAU	0
	C. APBD DAK FISIK	0
	D. APBD DAK NON FISIK	0
	E. DANA BAGI HASIL	0
	F. KERJASAMA	0
	G. OTONOMI KHUSUS	0
	NON APBD	0
	A. CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR)	0
	APBN	0
	B. APBN-DEKONSENTRASI	0
	C. APBN-TUGAS PEMBANTUAN	0
	DANA LAINNYA	0

Sumber: Dinas PUPESDM DIY dan BPKA DIY, 2023

Tabel III.70 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan SPM Bidang Pekerjaan Umum di Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2023

No	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Satuan	Perencanaan Dan Pelaksanaan		Serapan
1	2	3	4	5	6	7	8
	DI Yogyakarta				18.289.652.046	17.096.993.675	93,48%
1					5.536.452.796	5.439.675.443	98,25%
	1	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM			5.536.452.796	5.439.675.443	98,25%
		1	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota K2023617		198.571.500	180.494.339	90,90%
		2	Supervisi pembangunan/peningkatan/perluasan/perbaikan SPAM	Liter/ Detik	0	0	0%
		3	Pembangunan baru SPAM jaringan perpipaan	Liter/ Detik	0	0	0%
		4	Peningkatan SPAM jaringan perpipaan	SR	0	0	0%
		5	Perluasan SPAM jaringan perpipaan	Dokumen	0	0	0%
		6	Perbaikan SPAM jaringan perpipaan	SR	0	0	0%
		7	Fasilitasi kerja sama pengelolaan SPAM regional lintas Kabupaten/Kota	Kab/ Kota	0	0	0%

No	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Satuan	Perencanaan Dan Pelaksanaan		Serapan
		8	Pembinaan teknis SDM dan kelembagaan pengelolaan SPAM Provinsi	Kab/Kota	0	0	0%
		9	Operasi dan pemeliharaan SPAM lintas Kabupaten/Kota	Unit	5.337.881.296	5.259.181.104	98,53 %
		10	Survei dan investigasi untuk pengembangan SPAM lintas Kabupaten/Kota	Dokumen	0	0	0%
		11	Penyediaan lahan untuk pengembangan SPAM lintas Kabupaten/Kota	Ha	0	0	0%
		12	Pembentukan organisasi pengelola SPAM lintas Kabupaten/Kota	Badan Usaha	0	0	0%
JUMLAH INDIKATOR					5.536.452.796	5.439.675.443	98,25%
JUMLAH PROGRAM					5.536.452.796	5.439.675.443	98,25%
2	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH				12.753.199.250	11.657.318.232	91,41%
2	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Regional K2023618				12.753.199.250	11.657.318.232	91,41%
	1	Penyusunan rencana, kebijakan, strategi dan teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik		Unit	0	0	0%
	2	Pemicuan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) dan pembinaan penyediaan prasarana Cubluk		Dokumen	0	0	0%
	3	Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik terpusat		Rumah Tangga	0	0	0%
	4	Rehabilitasi/peningkatan/perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik regional		Rumah Tangga	5,753,199,250	4.904.448.918	85,25 %
	5	Supervisi pembangunan/rehabilitasi/peningkatan/perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik terpusat		Dokumen	0	0	0%
	6	Pembinaan teknis dan pemberdayaan masyarakat dalam Pengelolaan Air Limbah Domestik		Kelompok Masyarakat	0	0	0%
	7	Pengembangan SDM dan kelembagaan Pengelolaan Air Limbah Domestik		Orang	0	0	0%
	8	Fasilitasi kerja sama Pengelolaan Air Limbah Domestik lintas Kabupaten/Kota		Dokumen	0	0	0%
	9	Operasi dan pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik		Unit	7,000,000,000	6.752.869.314	96,50 %
JUMLAH INDIKATOR					12.753.199.250	11.657.318.232	91,41%

No	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Satuan	Perencanaan Dan Pelaksanaan	Serapan	
	JUMLAH PROGRAM				12.753.199.250	11.657.318.232	91,41%
KEGIATAN LAINNYA							
3	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN LAINYA						
TIDAK ADA DATA KEGIATAN LAINYA							

Sumber: Dinas PUPESDM DIY, 2023

3.2.1.4 Hasil Capaian SPM Bidang Pekerjaan Umum

Pada tahun 2023, target capaian SPM Penyediaan Kebutuhan pokok Air Minum Regional Lintas Kabupaten/Kota sebesar 152.292 jiwa yang terlayani dengan capaian sebesar 152.292 jiwa yang terlayani atau sebesar 100%. Hal tersebut dipengaruhi oleh adanya SPAM Regional Kartamantul melalui 2 sistem penyediaan air minum yaitu system bantar dengan kapasitas 400 liter/detik dan system Kebon Agung dengan kapasitas 350 liter/detik.

Sedangkan SPM Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik Regional Lintas Kabupaten/Kota mempunyai target 136.025 jiwa terlayani dengan capaian sebesar 136.025 jiwa terlayani atau sebesar 100% setara dengan 27.205 rumah tangga (asumsi 1 rumah tangga adalah 5 jiwa). Capaian tersebut didukung oleh adanya kapasitas Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Regional / SPALD-Regional sebesar 75.000 SR.

Tabel III.71 Capaian SPM Bidang Pekerjaan Umum di Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2023

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	SATUAN	Indikator Pencapaian / Output			Total Pencapaian
1	2	3	4			5
	KATEGORI INDEKS PENCAPAIAN SPM					100 %
1.	Penyediaan Kebutuhan pokok Air Minum Regional Lintas Kabupaten/Kota					100 %
s						
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)		Jumlah Total	Jumlah Total	Yang Belum	80.00 %
			Yang Harus Dilayani	Yang Terlayani	Terlayani	
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :	jiwa	152.292	152.292	0	100.00 %

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	SATUAN	Indikator Pencapaian / Output			Total Pencapaian
1	2	3	4			5
Ada SPAM Regional Lintas Kabupaten/Kota						
PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)						20 %
	B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM		Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi	100 %
	1 . Kapasitas yang dapat terlayani melalui penyaluran Air Minum Curah Lintas Kabupaten/Kota terhadap demand pemenuhan kapasitas yang memerlukan pelayanan Air Minum	liter/detik	199,67	199.67	0	100 %
	2 . Kapasitas yang dapat terlayani melalui penyaluran Air Minum Curah Lintas Kabupaten/Kota terhadap demand pemenuhan kapasitas yang memerlukan pelayanan Air Minum Curah terhadap Kualitas air (tidak keruh, tidak berwarna, tidak berasa, tidak berbusa, tidak berbau)	liter/detik	199,67	199.67	0	100 %
	JUMLAH	1,4	307	1,093	43.91 %	
2 .	Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik Regional Lintas Kabupaten/Kota					84.73 %
s						
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)		Jumlah Total	Jumlah Total	Yang Belum Terlayani	80.00 %
			Yang Harus Dilayani	Yang Terlayani	Terlayani	
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :	jiwa	136.025	136.025	0	100.00 %
Ada SPALD Regional Lintas Kabupaten/Kota						
PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)						20 %
	B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM		Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi	100 %
	1 . Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Regional/SPALD-Regional terhadap Kuantitas akses pengolahan air limbah domestik (minimal 1 akses pengolahan air limbah domestik)	Rumah Tangga	27.205	27.205	0	100.00 %
	2 . Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Regional/SPALD-Regional terhadap Kualitas pelayanan air limbah domestik (akses dasar bagi masyarakat wilayah pedesaan dengan kepadatan penduduk <25 jiwa / hektar)	Rumah Tangga	0	0	0	0.00 %

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	SATUAN	Indikator Pencapaian / Output			Total Pencapaian
1	2	3	4			5
	3 . Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Regional / SPALD-Regional terhadap Kualitas pelayanan air limbah domestik (akses aman bagi masyarakat wilayah perdesaan yang memiliki kepadatan penduduk >25 jiwa/hektar dan seluruh wilayah perkotaan)	Rumah Tangga	27.205	27.205	0	100.00 %
	JUMLAH	750	27.205	27.205	0	100.00 %

Sumber: Dinas PUPESDM DIY, 2023

3.2.1.5 Kendala, Permasalahan Dan Solusi

1. Permasalahan dan Solusi SPM Air Limbah:

Permasalahan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Regional terkait implementasi kebijakan standar pelayanan minimal antara lain:

- Masih belum didapatkannya data BNBA penerima pelayanan dasar
- Peningkatan SR untuk pelayanan air minum curah dan air limbah domestik lintas kabupaten/kota masih belum bisa maksimal dikarenakan penganggaran APBD di Kab/Kota terbatas serta terkait masalah teknis dalam pemasangan jaringan hilir di masing-masing Kab/Kota
- Penyambungan SR air limbah domestik regional yang sedikit dikarenakan kebutuhan pendanaan anggaran oleh kabupaten di prioritaskan untuk menambah SR di IPAL Kawasan Kabupaten
- Pengembangan jaringan air limbah di Kawasan Perkotaan Yogyakarta belum optimal sehingga peningkatan pemanfaatan pengelolaan air limbah IPAL Sewon belum bisa optimal.

Solusi yang dilakukan untuk memenuhi SPM Air Limbah yaitu:

- Koordinasi dengan pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Kota untuk komitmen dalam penyambungan SR air limbah domestic regional
- Mencari alternatif pendanaan selain dari APBD kabupaten kota
- Koordinasi dengan penyelenggara air limbah domestic di kabupaten kota untuk mendapatkan data pelanggan air limbah domestic regional
- Upaya sinergitas implementasi SPM melalui seluruh stakeholder yang ada

- e. Pengajuan usulan pembangunan dan pengembangan jaringan air limbah dengan Pemerintah Pusat untuk mendukung peningkatan penyambungan SR dari Kabupaten/Kota.

2. Permasalahan dan Solusi SPM Air Minum:

Secara umum permasalahan yang dihadapi Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum Regional Kartamantul terkait implementasi kebijakan standar pelayanan minimal antara lain:

- a. Masih belum didapatkannya data BNBA penerima pelayanan dasar.
- b. Pembagian wilayah pelayanan SPAM Regional dengan SPAM PDAM yang masih sulit dilaksanakan dikarenakan SPAM Regional sifatnya suplesi ke SPAM PDAM eksisting
- c. Peningkatan SR untuk pelayanan air minum curah dan air limbah domestik lintas kabupaten/kota masih belum bisa maksimal dikarenakan penganggaran APBD di Kab/Kota terbatas serta terkait masalah teknis dalam pemasangan jaringan hilir di masing-masing Kab/Kota
- d. Penyerapan air curah SPAM Regional yang masih relatif sedikit oleh masing-masing PDAM kabupaten kota dikarenakan adanya kebutuhan pendanaan di jaringan hilir

Solusi permasalahan SPM Air Minum:

- a. Koordinasi dengan PDAM di kabupaten kota untuk mendapatkan data pelanggan
- b. Koordinasi dengan pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Kota untuk komitmen dalam penyerapan air curah SPAM Regional
- c. Mencari alternatif pendanaan selain dari APBD kabupaten kota
- d. Pendekatan teknis pembagian wilayah SPAM Regional yang disepakati bersama dengan PDAM Kabupaten Kota
- e. Upaya sinergitas implementasi SPM melalui seluruh stakeholder yang ada

3.2.2 Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Perumahan

3.2.2.1 Jenis Pelayanan Dasar SPM Perumahan Rakyat Daerah Provinsi

Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, maka dalam Permendagri Nomor 59 Tahun 2021 yang mengatur tentang penerapan Standar Pelayanan Minimal, menjelaskan bahwa Pemerintah Daerah Wajib menerapkan SPM untuk pemenuhan jenis pelayanan dasar dan mutu pelayanan dasar yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal. Penerapan SPM diprioritaskan bagi warga negara yang berhak memperoleh pelayanan dasar secara minimal sesuai dengan jenis pelayanan dasar dan mutu pelayanan dasarnya.

Berdasarkan regulasi tersebut di atas Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat membuat regulasi tentang Jenis Pelayanan dasar yang diatur dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29 /PRT/M/2018 tentang standar teknis standar pelayanan minimal pekerjaan umum dan perumahan rakyat. Yang menjadi standar pelayanan minimal bidang perumahan rakyat, yaitu:

- a. Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana provinsi;
- b. Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah Provinsi.

Tabel III.72 Jenis Pelayanan SPM Bidang Perumahan Rakyat

No	Jenis Pelayanan Dasar	Mutu Layanan Dasar	Penerima Layanan Dasar	Pernyataan Standar
1	Pelayanan penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana provinsi	Sesuai standar pelayanan penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana provinsi	Korban bencana provinsi yang memiliki rumah yang terdampak bencana	Setiap korban bencana provinsi yang memiliki rumah yang terdampak bencana mendapatkan pelayanan penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni sesuai standar.

No	Jenis Pelayanan Dasar	Mutu Layanan Dasar	Penerima Layanan Dasar	Pernyataan Standar
2	Fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah provinsi	Sesuai standar fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah provinsi	Masyarakat yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah provinsi	Setiap masyarakat yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah provinsi mendapatkan fasilitasi penyediaan rumah layak huni sesuai standar.

Sumber: PermenPUPR RI Nomor 29 /PRT/M/2018

3.2.2.2 Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Perumahan Rakyat Oleh Daerah

Tabel III.73 Target Pencapaian SPM oleh Daerah

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target Capaian	Batas Waktu Capaian
1.	Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana provinsi	Jumlah Warga Negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	100 %	Setiap Tahun
2.	Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah provinsi	Jumlah Warga Negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah provinsi yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni	100 %	Setiap Tahun

Sumber: Permendagri 100 Tahun 2018

3.2.2.3 Anggaran SPM Perumahan

Alokasi anggaran adalah jumlah belanja langsung dan tidak langsung yang ditetapkan dalam APBD dalam rangka penerapan dan pencapaian SPM oleh pemerintahan daerah, yang bersumber dari APBD Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2021. Pada tahun tersebut pelaksanaan SPM yaitu tahap inventarisasi/pendataan yang difokuskan untuk identifikasi awal jumlah rumah yang tinggal pada kawasan rawan bencana longsor.

Tabel III.74 Pendanaan Pemenuhan SPM Bidang Perumahan Rakyat di Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2023

No	Pendanaan	Pagu	Alokasi Anggaran Satker Perangkat Daerah Dengan Apbd	Alokasi Anggaran Penerapan Spm Dengan Apbd	Alokasi Anggaran Penerapan Spm Dengan Anggaran Satker Perangkat Daerah
1	Alokasi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah DI Yogyakarta	5.978.802.145.547			
2	Alokasi Anggaran Satker Perangkat Daerah	551.600.894.125	9,22 %		
3	Alokasi Anggaran Penerapan Spm Pada Satker PD	814.500.000		0.013 %	0.14 %
4	Alokasi Anggaran Penerapan Spm Sumber Lainnya Yang Sah Dan Tidak Mengikat (Contoh : Dana Desa, Kerjasama, Dana Bagi Hasil Dan Lain-Lain)	0			
	A. APBN	0			
	B. APBD	0			
	B. DAK	0			
	C. LAINYA	0			

Tabel III.75 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan SPM Bidang Perumahan di Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2023

NO	INDIKATOR KINERJA/JENIS LAYANAN SPM	PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN		TOTAL SERAPAN (%)
		(3)	(4)	(5)
(1)	(2)	PAGU	REALISASI	SERAPAN
A.	DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA			
1	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi			
1	identifikasi perumahan di lokasi rawan bencana atau terkena relokasi program provinsi	100.000.000	99.493.690	99,49%
2	identifikasi lahan-lahan potensial sebagai lokasi relokasi perumahan	0	0	0
3	pengumpulan data rumah korban bencana kejadian sebelumnya yang belum tertangani	0	0	0
4	pendataan tingkat kerusakan rumah akibat bencana	0	0	0
5	pendataan dan verifikasi penerima rumah bagi korban bencana alam atau terkena relokasi program provinsi	50.000.000	48.135.381	96,27%
6	pendataan rumah sewa milik masyarakat, rumah	0	0	0

NO	INDIKATOR KINERJA/JENIS LAYANAN SPM	PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN		TOTAL SERAPAN (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	susun dan rumah khusus			
2	Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Pemerintah Provinsi			
1	sosialisasi standar teknis penyediaan dan rehabilitasi rumah kepada masyarakat/sukarelawan tanggap bencana	0	0	0
2	sosialisasi tentang mekanisme penggantian hak atas tanah dan bangunan	0	0	0
3	sosialisasi pengembangan perumahan baru dan mekanisme akses perumahan KPR-FLPP	0	0	0
4	pembentukan dan pelatihan tim satgas, tim pendamping dan fasilitator	0	0	0
5	rembug warga untuk menentukan calon penerima rumah bagi korban bencana	0	0	0
6	koordinasi untuk menyepakati penerima dan jenis pelayanan	0	0	0
3	Kegiatan Lainnya			
4	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau relokasi Program provinsi			
1	rehabilitasi rumah bagi korban bencana	0	0	0
2	penyusunan site plan dan/atau detail engineering design (DED) bagi rumah korban bencana atau relokasi program provinsi	0	0	0
3	pengadaan lahan untuk pembangunan rumah bagi korban bencana	0	0	0
4	pembangunan rumah bagi korban bencana	349.500.000	323.866.386	92,67%
5	pembangunan rumah khusus beserta PSU bagi korban bencana atau relokasi program provinsi	0	0	0
6	operasional dan pemeliharaan lingkungan perumahan pada relokasi program provinsi	0	0	0
5	Pendistribusian dan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi			
1	pelaksanaan pembagian rumah bagi korban bencana provinsi atau relokasi program provinsi	0	0	0
2	penatausahaan serah terima rumah bagi korban bencana provinsi atau relokasi program provinsi	0	0	0
6	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Lain			
	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman	315.000.000	297.099.915	94.32%

Sumber: Dinas PUPESDM DIY, 2023

3.2.2.4 Hasil Capaian SPM Perumahan Rakyat

Pada tahun 2023, SPM Penyediaan & Rehabilitasi Rumah yang Layak Huni Bagi Korban Bencana Provinsi tercapai 100% dengan jumlah Warga Negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni 3 rumah tangga. Sedangkan SPM Fasilitas Penyediaan Rumah Yang Layak Huni Bagi Masyarakat Yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah Provinsi tercapai 100%. Meskipun tercapai 100%, tidak ada rumah yang terbangun karena tidak adanya program pemerintah yang melibatkan warga yang memperoleh fasilitas penyediaan rumah yang layak huni.

Tabel III.76 Capaian SPM Bidang Perumahan di Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2023

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Indikator Pencapaian / Output	Total Pencapaian		AKSI
1	2	3	4	5		6
	KATEGORI INDEKS PENCAPAIAN SPM		TUNTAS PARIPURNA	100%		
1.	Penyediaan & Rehabilitasi Rumah yang Layak Huni Bagi Korban Bencana Provinsi			100%		
Tidak Terjadi Bencana (Lampirkan Form Tahapan Penerapan)						
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)		Jumlah Total	Jumlah Total	Yang Belum	80.00 %
			Yang Harus Dilayani	Yang Terlayani	Terlayani	
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :		3	3	0	100%
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)					20 %
	B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM		Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi	100 %
	1. Melakukan pengumpulan data, perhitungan kebutuhan, dan perencanaan kebutuhan sesuai dengan nomenklatur program/kegiatan/ sub kegiatan (dilakukan dengan mengunggah dokumen form dan/atau dokumen pendukung lainnya)	jumlah kab/kota	5	5	0	100.00 %
	JUMLAH	0	0	0	100.00 %	
2.	Fasilitasi Penyediaan Rumah Yang Layak Huni				100.00 %	

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Indikator Pencapaian / Output		Total Pencapaian		AKSI
1	2	3	4		5		6
	Bagi Masyarakat Yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah Provinsi						
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)		Jumlah Total	Jumlah Total	Yang Belum	80.00 %	
			Yang Harus Dilayani	Yang Terlayani	Terlayani		
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :		3	3	0	100.00 %	
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)					20.00 %	
	B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM		Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi	100.00 %	
	1 . Fasilitas penggantian Hak Atas Penguasaan Tanah dan/atau Bangunan	Rumah	3	3	0	100.00 %	
	2 . Subsidi uang sewa	Rumah	0	0	0	0.00 %	Mutu Ditutup
	3 . Penyediaan rumah layak huni	Rumah	0	0	0	0.00 %	Mutu Ditutup
	JUMLAH	3	3	3	0	100.00 %	

Sumber: DPUPESDM DIY, 2023

Tabel III.77 Capaian Target SPM Perumahan Rakyat

JENIS PELAYANAN DASAR	TOTAL RUMAH TARGET PELAYANAN SPM PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	REALISASI			KETERANGAN
		SUDAH TERLAYANI	BELUM TERLAYANI	PERSENTASE CAPAIAN (%)	
1	2	3	4	5	
Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Yang Layak Huni Bagi Korban Bencana	3	3	0	100%	Pelaksanaan Pembangunan Fisik telah dilaksanakan pada tahun 2023
Penyediaan Rumah Yang Layak Huni Bagi Masyarakat Yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah	3	3	0	100%	Pelaksanaan Pembangunan Fisik telah dilaksanakan pada tahun 2023

Sumber: DPUPESDM DIY, 2023

Pada Tahun Anggaran 2023, Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral DIY melaksanakan pendataan SPM kebencanaan, yaitu Identifikasi Perumahan Di Lokasi Rawan Bencana Atau Terkena Relokasi Program Provinsi, lokasi pendataan adalah di RW 18 Kampung Karanganyar, Kelurahan Brontokusuman, Kemantren Mergangsan, Kota Yogyakarta pada lahan – lahan Magersari. Pendataan ini merupakan tindak lanjut dari kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2022, yaitu Pemutakhiran Data Penataan Bantaran Sungai Code. Permukiman bantaran sungai merupakan kawasan permukiman rawan kumuh, berada pada area rawan longsor, serta mayoritas dibangun di lahan bukan milik. Identifikasi dilaksanakan untuk mendata profil masyarakat serta potensi penataan kawasan pemukiman di bantaran Sungai Code yang terdiri atas: Kondisi rumah/bangunan, fungsi bangunan, luasan lahan, status kepemilikan lahan, hingga pada kondisi sosial ekonomi masyarakat yang tinggal dan kesiapan apabila akan dilaksanakan penataan.

Hasil Pendataan dan rekomendasi:

- a. Sebagian besar rumah yang berada pada lokus kajian, menempati lahan milik Tanah Kasultanan / Sultan Ground (SG),
- b. Lokus kajian termasuk ke dalam permukiman padat dengan rumah – rumah berada dalam kondisi bervariasi antara layak huni dan tidak layak huni.
- c. Lokus kajian tidak termasuk ke dalam kawasan kumuh namun tetap membutuhkan penataan kawasan untuk membuat kawasan menjadi lebih rapi dan nyaman ditinggali.
- d. Diperlukan adanya sosialisasi terkait pemanfaatan lahan Tanah Kasultanan, serta perlu adanya konsep dan/atau skema kolaborasi antara Pemerintah Pusat, Pemda DIY, dan Pemerintah Kota Yogyakarta dalam menyelesaikan permasalahan penataan di lokasi terkait.

Kemudian terdapat kegiatan Pembangunan Rumah Baru bagi Korban Bencana sekaligus merupakan kegiatan relokasi dari kawasan rawan bencana di KRB III Merapie, yaitu pembangunan fisik rumah untuk masyarakat yang terdampak bencana Merapi pada tahun 2010. Pembangunan terdiri dari 3 (tiga) unit rumah berlokasi di Huntap Plosokerep, Kal. Cangkringan, Kap. Umbulharjo, Kab. Sleman, dengan BNBA yaitu:

- a. Sukiran,

- b. Sutarno, dan
- c. Maryanto Margi Sutrisno.

Pembangunan dilaksanakan dengan menerapkan bangunan rumah layak huni bergaya arsitektur khas Yogyakarta yang dirancang oleh Dinas PUPESDM DIY. Pembangunan rumah juga disertai dengan bantuan pengurusan sertifikat hak milik tanah. Namun, dikarenakan prosedur membutuhkan waktu yang cukup lama, sertifikat hak milik masih berproses di Kantor Pertanahan Sleman.



Pengurusan sertifikat tanah dilaksanakan melalui kegiatan Pendataan dan Verifikasi Penerima Rumah Bagi Korban Bencana atau Terkena Relokasi Program Provinsi.

3.2.2.5 Kendala, Permasalahan Dan Solusi

Permasalahan dan Solusi menggambarkan permasalahan yang dihadapi dalam penerapan dan pencapaian SPM, baik permasalahan eksternal maupun internal, langkah-langkah penyelesaian permasalahan dan Solusi yang ditempuh:

1. Pengumpulan Data
 - a. Dalam proses pengumpulan data untuk kajian Identifikasi Perumahan Di Lokasi Rawan Bencana Atau Terkena Relokasi Program Provinsi, proses pendataan terkendala oleh warga yang sudah antipati / takut hanya dengan istilah “Relokasi”. Hal ini membuat OPD maupun pihak ketiga yang dikontrak OPD (Konsultan) sulit mendapatkan informasi dan data dari masyarakat. Solusi yang dilakukan adalah berkoordinasi dengan Pemerintah Kemantren, Kampung, RW, hingga RT untuk meluruskan kesalahpahaman serta mencegah terjadinya salah penyampaian informasi yang dapat memicu konflik di masyarakat.
 - b. Mayoritas warga yang tinggal di KRB III Merapi, enggan direlokasi karena alasan mata pencaharian. Sehingga, cukup sulit apabila hendak dilaksanakan tindak lanjut, yaitu relokasi warga ke lokasi hunian di area

yang lebih aman, apabila pembangunan yang dilaksanakan hanya berupa pembangunan rumah, tanpa disertai mata pencaharian. Solusi: Sosialisasi dan pendekatan secara perlahan dilaksanakan oleh Pemerintah Kalurahan dan Padukuhan berkoordinasi dengan Dinas PUPESDM DIY.

2. Penghitungan Kebutuhan.

Kendala yang ditemui, yaitu penghitungan kebutuhan tidak dapat dilaksanakan menggunakan rumus dalam penerapan SPM yang dihitung berdasarkan kebutuhan per hari per tenaga lapangan, dikarenakan kegiatan pendataan dilaksanakan oleh pihak ketiga dalam kurun waktu yang ditetapkan, sehingga pelaporan pada penghitungan kebutuhan, berbeda dengan data yang diharapkan. Solusi: Data tetap disampaikan dengan dilakukan penyesuaian pada format pengisian.

3. Perencanaan dan Penganggaran

Kendala yang ditemui dalam perencanaan bagi pembangunan rumah bagi korban bencana adalah masalah lahan. Sebagian besar huntap yang ada di DIY sudah penuh sehingga untuk penanganan di tahun – tahun mendatang, perlu dilaksanakan antisipasi terkait dengan lahan. Solusi: Untuk pelaksanaan tahun 2024, pembangunan dapat dilaksanakan kembali di Huntap Plosokerep, Cangkringan, Umbulharjo, Sleman. Namun, untuk tahun – tahun mendatang perlu alternatif lahan di luar Huntap.

4. Pelaksanaan

Dalam pelaksanaan pembangunan rumah bagi korban bencana ditemui kendala yaitu:

- a. Status lahan di Huntap Plosokerep merupakan aset Pemda DIY yang dikelola oleh BPBD DIY sehingga dengan pembangunan yang dilaksanakan oleh Dinas PUPESDM DIY, perlu diperjelas terkait aset lahan, OPD manakah yang akan mengelola, apakah aset dilimpahkan pada Dinas PUPESDM DIY atau tetap berada di BPBD DIY. Hal ini berpengaruh pada pengurusan sertifikat lahan bagi BNBA penerima bantuan. Solusi: Dilaksanakan koordinasi antara Dinas PUPESDM DIY, BPBD DIY, BPKA DIY, dan Kantor Pertanahan Sleman. Dari hasil koordinasi diputuskan bahwa aset tetap dikelola oleh BPBD DIY, Dinas PUPESDM DIY hanya membangun rumah. Namun, untuk pengurusan sertifikat, harus berasal dari BPBD DIY.
- b. Kendala dalam proses setifikasi bagi rumah korban bencana yang dibangun di Huntap Plosokerep dikarenakan pelaksanaan sertifikasi untuk rumah korban bencana baru pertama kali dilaksanakan pada tahun 2023 oleh Dinas PUPESDM DIY, dengan prosedur dari Kantor Pertanahan

Sleman yang cukup rumit menyebabkan proses berjalan lama. Solusi: Dilaksanakan koordinasi yang intens, baik melalui pesan singkat maupun berkoordinasi langsung di Kantor Pertanahan Sleman serta dengan BPBD DIY, untuk menghindari terjadinya misinformasi dalam penyampaian data maupun berkas / dokumen yang dibutuhkan.

3.2.2 Sustainable Development Goals (SDGs)

Sustainable Development Goals (SDGs) atau Rencana Aksi Daerah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Daerah Istimewa Yogyakarta adalah Rencana Aksi Daerah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2023 – 2027 dan selanjutnya dapat dilakukan kaji ulang paling sedikit 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun dan sewaktu-waktu bila diperlukan

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB), seperti disebutkan dalam Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian TPB, merupakan dokumen yang memuat tujuan dan sasaran global tahun 2016 sampai tahun 2030. RPJMN 2020-2024 yang ditetapkan dengan Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 telah mengarusutamakan SDGs. Dengan diarusutamakannya target TPB/SDGs ke dalam RPJMN maka program dan kegiatan yang terkait pencapaian SDGs beserta alokasi anggarannya dielaborasi dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) setiap tahunnya.

Tujuan TBP :

1. Tanpa Kemiskinan
Indikator KePUAn :
 - a. Penanganan kawasan kumuh
 - b. Pengurangan Rumah Tidak Layak Huni
 - c. Meningkatnya akses penerangan untuk penduduk (Rasio Elektrifikasi).
2. Tanpa Kelaparan
3. Kehidupan Sehat dan Sejahtera
4. Pendidikan Berkualitas
5. Kesetaraan Gender
6. Air Bersih dan Sanitasi Layak
Indikator KePUAn :

- a. Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak
 - b. Penambahan kapasitas air baku
 - c. Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak
 - d. Jumlah kabupaten/kota yang terbangun infrastruktur air limbah dengan sistem terpusat skala kota, kawasan, dan komunal
 - e. Kesesuaian izin pengusahaan air tanah dan pertambangan terhadap rencana tata ruang
 - f. Jumlah Kelompok Masyarakat Sekitar Sungai yang Berpartisipasi dalam Pengelolaan Sungai
7. Energi Bersih dan Terjangkau
- Indikator KePUAn :
- a. Presentase Rumah Tangga berakses listrik (rasio elektrifikasi)
 - b. Penambahan jumlah rumah tangga yang menikmati listrik
 - c. Bangunan/gedung pemerintah, komersial dan industri yang telah diaudit energy
 - d. Penambahan izin ketenagalistrikan sesuai ketentuan
8. Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi
9. Industri, Inovasi dan Infrastruktur
10. Berkurangnya Kesenjangan
11. Kota dan Pemukiman yang Berkelanjutan
12. Konsumsi dan Produksi yang Bertanggungjawab
13. Penanganan Perubahan Iklim
14. Ekosistem Lautan
15. Target pencapaian indikator Tujuan 15 Ekosistem Daratan
16. Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan yang Tangguh
17. Kemitraan Untuk Mencapai Tujuan

Tabel III.78 Capaian SDGs

Tujuan SDGs	Indikator	Target	Capaian
Tujuan 1 Tanpa Kemiskinan	Meningkatnya akses air minum layak	95,28%	95,49%
	Penanganan Kawasan Kumuh	25%	8,19%
	Pengurangan Rumah tidak layak huni	58,27%	58,27%

Tujuan SDGs	Indikator	Target	Capaian
	Meningkatnya akses penerangan untuk penduduk (Rasio Elektrifikasi)	99,99%	99,99%
Tujuan 6 Air Bersih dan Sanitasi Layak	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak	95,28%	95,49%
	Penyediaan infrastruktur sumber daya air	70,53%	73,43%
	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak	94,9%	97,69%
	Jumlah kabupaten/kota yang terbangun infrastruktur air limbah dengan sistem terpusat skala kota, kawasan, dan komunal	5 unit	5 unit
	Kesesuaian Izin Pengusahaan Air Tanah dan Pertambangan Terhadap Rencana Tata Ruang	40.31%	40.31%
Tujuan 7 Energi Bersih dan Terjangkau	Presentase Rumah Tangga berakses listrik	99,99%	99,99%
	Peningkatan pelaksanaan usaha ketenagalistrikan yang sesuai ketentuan	46.88%	46.88%

3.2.3 Capaian kinerja Program Prioritas Pemda sebagaimana Kepgub 353/KEP/2021

Dalam hal progres pendukung Program Pembangunan Provinsi sesuai Keputusan Gubernur DIY Nomor 353/KEP/2021 tentang Keputusan Gubernur DIY Nomor 163/KEP/2017 tentang Program Prioritas Pembangunan, Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Mineral DIY telah melakukan beberapa hal, yaitu :

3.2.3.1 Pembangunan Jalan Temon-Borobudur

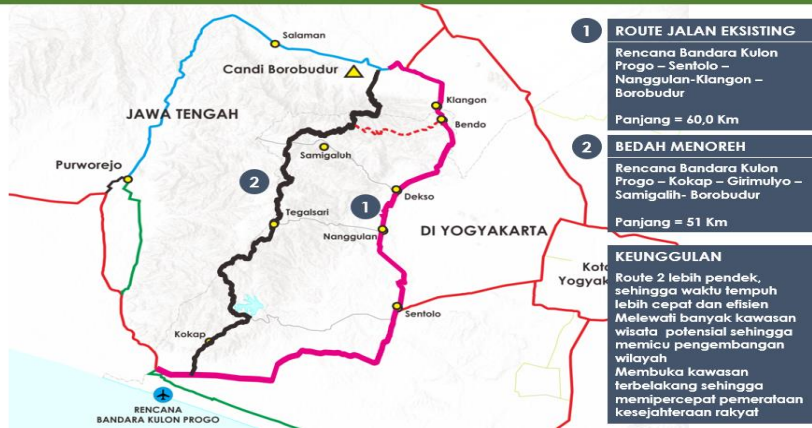
Pembangunan Jalan Temon-Borobudur merupakan salah satu cara untuk membuka jalur lalu lintas yang menghubungkan antara Bandara YIA dan KSPN Borobudur, atau sering kita sebut dengan istilah Bedah Menoreh. Dokumen lingkungan telah disusun oleh Pemkab Kulonprogo pada tahun 2021. Sesuai jadwal yang telah disepakati dengan Kabupaten Kulonprogo, sampai dengan tahun 2023 telah disusun dokumen pengadaan tanah.

JADWAL USULAN RENCANA PELAKSANAAN JALAN BEDAH MENOREH

NO.	URAIAN	TAHUN ANGGARAN										KETERANGAN	
		s.d. 2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027		
1.	Studi Kelayakan (FS)												DPUP-ESDM DIY
2.	DED Jalan												DPUP-ESDM DIY
3.	DED Jembatan												DPUP-ESDM DIY
4.	Dokumen Lingkungan												Pemkab Kulon Prago
5.	Dokumen Pengadaan Tanah												Pemkab Kulon Prago
6.	IPL												Pemkab Kulon Prago
7.	Appraisal												Pemkab Kulon Prago
8.	Pembayaran												Pemkab Kulon Prago
9.	Konstruksi												DPUP-ESDM DIY

■ Sudah Terlaksana
 ■ On Progress
 ■ Rencana

ALTERNATIF ROUTE TEMON - BOROBUDUR



3.2.3.2 Pembangunan Jalan Prambanan-Gading


Tujuan dan Pembangunan Jalan Prambanan Gading adalah :

- a. Mengurangi waktu tempuh dari Yogyakarta - Wonosari
- b. Mengembangkan jalur konektivitas antar Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) : KSPN Prambanan – Kawasan Gunung Api Purba – KSPN Karst Gunungkidul
- c. Membuka akses antara Kabupaten Sleman dengan Kabupaten Gunungkidul
- d. Meningkatkan aksesibilitas dalam rangka mendukung pertumbuhan dan bangkitan ekonomi di area yang dilalui (Prambanan - Patuk – Gedangsari*)
- e. Sebagai feeder Jalan Tol DIY dan Jogja Outer Ring Road (JORR)

- f. Pekerjaan konstruksi sel baru di TPA Transisi Piyungan Tahap II
- g. Penanganan Drainase Kawasan Permukiman Tahap II dan Penanganan Lindi di TPA Piyungan
- h. Penanganan drainase kawasan TPA Piyungan

Pembangunan dan Pengembangan TPA Regional Piyungan

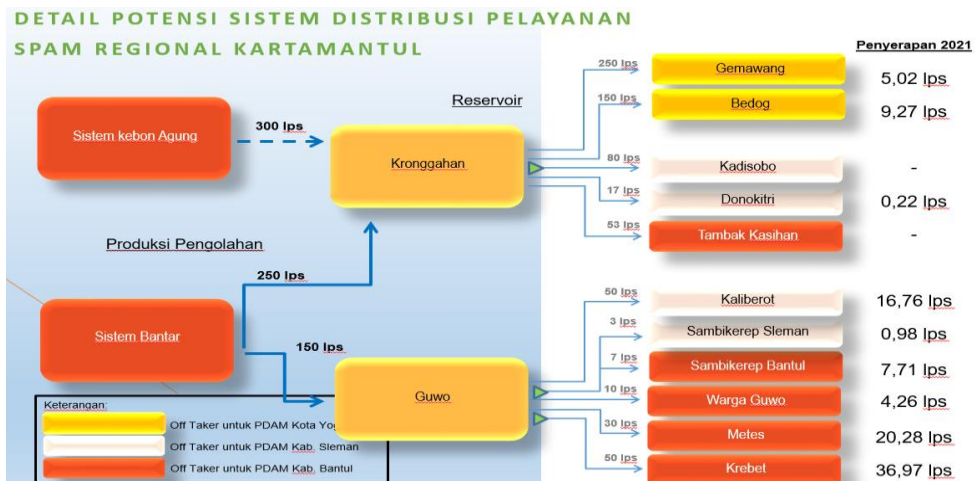
- Penataan TPA Eksisting
- Pembangunan TPA Transisi
- Pengembangan TPA Piyungan





3.2.3.4 Pembangunan SPAM Regional Kartamantul

Pengelolaan SPAM Regional Kartamantul oleh Perumda Air Bersih Tirtatama DIY yang mulai resmi beroperasi pada 1 Januari 2021. Terdapat dua sistem yaitu Sistem Bantar dengan kapasitas produksi sebesar 400 liter/detik dan Sistem Kebon Agung dengan kapasitas produksi sebesar 300 liter/detik.



Rencana Pengembangan Infrastruktur Air Bersih (Optimalisasi SPAM Regional Kartamantul)

- A (Optimalisasi Sistem Sambikerep; Sedayu, Bantul),
- B (Peningkatan penyerapan off taker Krebet dan Metes untuk pengembangan Kawasan Sedayu Pajangan dan Penyediaan layanan MBR
- C Peningkatan penyerapan oftaker Tambak (Unit Kasihan PDAM Bantul)
- D Peningkatan penyerapan oftaker Kadisobo untuk unit PDAM Sleman di Kawasan Niaga Depok dan Ngaqlik
- E Peningkatan Penyerapan di Sleman Barat (pembangunan jaringan dan oftaker baru)



3.2.3.5 Pembangunan SPAM Regional Kamijoro

SPAM Regional Kamijoro (KAPET Kulonprogo dan Pajangan) adalah proyek KPBU sistem penyediaan air minum yang akan melayani Kabupaten Kulonprogo dan Kabupaten Bantul. Ruang lingkup yang dikerjasamakan dengan Badan Usaha yaitu Pembangunan IPA 475 lpd, Reservoir dan jaringan transmisi serta sistem distribusi. Kapasitas produksi sebesar 475 lpd yang dialokasikan untuk Kabupaten Kulon Progo sebesar 286 lpd, dan Kabupaten Bantul sebesar 189 lpd. Pembangunan Intake 500 lpd dan Jaringan Transmisi tahap I oleh BBWSO, Pembebasan Lahan dan AMDAL oleh Pemerintah Provinsi DI Yogyakarta, Fasilitas PDF dari Kementerian Keuangan pada Penyusunan FBC dan Tahap Transaksi yang didampingi oleh PT. SMI dan Penjaminan oleh PT. PII

STATUS PROYEK

- **Tahun 2017**, dalam RPJMD 2017-2022 telah diindikasikan pendanaan melalui skema KPBU
- **31 Agustus 2018** - Studi Pendahuluan Proyek selesai, dilakukan oleh UGM difasilitasi oleh Kementerian Keuangan melalui PT PII.
- **4 Februari 2019** - Pengajuan Fasilitas (PDF) Penyiapan dan Transaksi ke Kemenkeu
- **25 April 2019** - Persetujuan Fasilitas (PDF) dalam rangka Penyiapan dan Pelaksanaan Transaksi dari Kemenkeu
- **21 Agustus 2019** – Kick Off meeting Pelaksanaan Fasilitas Penyiapan Proyek dan Pendampingan Transaksi. Untuk pelaksanaan fasilitas penyiapan proyek dan pendampingan transaksi dilakukan oleh PT. SMI
- **21 Agustus 2019** – Penandatanganan MoU antara Pemda DIY dan Pemkab KP dan Pemkab Bantul tentang Penyelenggaraan SPAM Regional Kamijoro.
- **November 2019**- BAST Laporan Awal FBC Proyek KPBU SPAM Regional Kamijoro.
- **Juli 2020** - BAST Laporan Draft Akhir Proyek KPBU SPAM Regional Kamijoro
- **5 Februari 2021** - Pemda DIY mengajukan Permohonan atas Penyesuaian Timeline dan Scope Fasilitas Proyek KPBU SPAM Regional Kamijoro.
- **2 Mei 2021** – Persetujuan Permohonan Penambahan Jangka Waktu Fasilitas dari Kemenkeu.
- **17 September 2021** – jawaban arahan dokumen lingkungan dari KLHK RI yaitu menyusun dokumen baru Amdal tipe A
- **Desember 2021 – Januari 2022** – telah dilaksanakan pengadaan lahan untuk reservoir Beji, reservoir Gunting, dan Rumah Booster di Kabupaten Bantul

3.2.3.6 Penataan Kawasan Sumbu Filosofi

Sumbu Filosofi Yogyakarta adalah sebuah sumbu imajiner berupa garis lurus ditarik dari Panggung Krapyak, Keraton Yogyakarta, dan Tugu Pal Putih (Tugu Golong-gilig). Dilansir dari laman kemendikbud, Sumbu Filosofi Yogyakarta adalah simbol dari keselarasan dan keseimbangan hubungan manusia dengan Tuhannya (Hablum minallah), manusia dengan manusia (Hablum minannas), dan manusia dengan alam. Dalam kaitannya dengan alam, hal ini termasuk hubungan manusia dengan lima elemen pembentuk alam sekitar yaitu api (dahana) dari Gunung Merapi, tanah (bantala) dari bumi Ngayogyakarta, air (tirta) dari Laut Selatan, angin (maruta), dan angkasa (ether).

Progres penanganan :

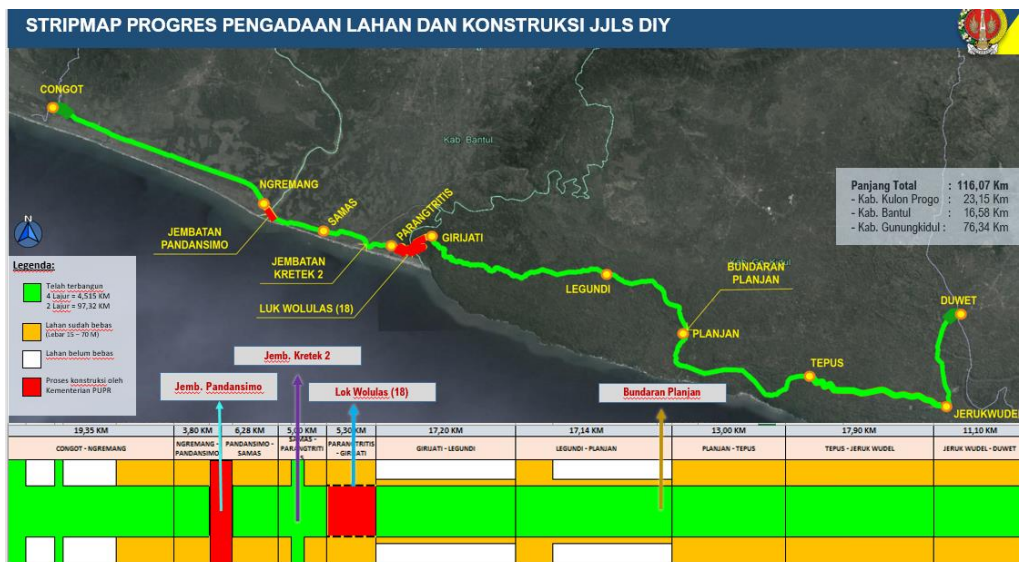
- a. Perencanaan Jogja Planning Gallery (2022)
Bangunan ini direncanakan sebagai wadah *miniature gallery* perencanaan Daerah Istimewa Yogyakarta, rencana penataan ruang satuan ruang strategis kasultanan dan kadipaten, sejarah perkembangan Yogyakarta sebagai kota budaya, kawasan cagar budaya, dan memperhatikan kondisi bentang alam dan budaya di Yogyakarta
- b. Pengelolaan Toilet Titik Nol
pembangunan toilet bawah tanah ini pada tahun 2017 dengan tema mengusung konsep modern, yang terlihat dari desain fasad di area entrance dengan menggunakan material baja dan kaca.
- c. Pemeliharaan Berkala Pedestrian Malioboro

Pada tahun 2022, dilakukan pemindahan pedagang yang berjualan di sepanjang pertokoan Malioboro menuju ke Teras Malioboro 1 dan Teras Malioboro 2

- d. Pengadaan tanah Akses Penghubung Tempat Parkiran Beskalan - Teras Malioboro 1

Pengadaan tanah ini berlokasi di Beskalan RT 006/ RW 002 Kelurahan Ngupasan Kemantren Gondoman, Kota Yogyakarta dengan luas total 973 (Sembilan ratus tujuh puluh tiga) m² dengan jumlah yang sertifikat yang diserahkan ada 7 (tujuh) bidang.

3.2.3.7 Pengembangan Kawasan Pantai Selatan DIY



Pengembangan sarana prasarana jalan di wilayah DIY yang meliputi di antaranya: Gunungkidul (76,34 km), Bantul (16,58 km) dan Kulon Progo (23,15 km) yang dalam hal ini dikenal dengan Jalur Jalan Lintas Selatan (JJLS). JJLS diharapkan menjadi pintu masuk DIY yang dahulu di utara atau di Kabupaten Sleman, sekarang diubah menjadi di selatan. JJLS melewati 3 (tiga) kabupaten di DIY: Kabupaten Gunungkidul, Kabupaten Bantul, dan Kabupaten Kulon Progo.

Progress Pembebasan Lahan JLS pada Sepanjang Wilayah Selatan DIY

No.	Ruas	Panjang (Km)	Pembebasan Lahan				Konstruksi		Keterangan
			2 lajur		4 lajur		2 lajur (Km)	4 lajur (Km)	
			Bebas (Km)	Belum Bebas (Km)	Bebas (Km)	Belum Bebas (Km)			
I	Kab. Kulon progo	23,15	23,15	-	16,10	7,05	23,15	2,00	
1	Congot - Ngremang	19,35	19,35	-	12,30	7,05	19,35	2,00	embebasan Segmen Congot - Garongan (2021-2022)
2	Ngremang - Pandansimo	3,80	3,80	-	3,80	-	3,80	-	
II	KAB. BANTUL	16,58	16,58	-	16,58	-	9,58	2,60	
3	Pandansimo - Samas	6,28	6,28	-	6,28	-	4,58	-	
4	Samas - Parangtritis	5,00	5,00	-	5,00	-	5,00	2,60	
5	Parangtritis - Girijati	5,30	5,30	-	5,30	-	-	-	
III	Kab. Gunungkidul	76,34	76,34	-	46,70	29,64	64,59	0,50	
6	Girijati - Legundi	17,20	17,20	-	-	17,20	17,20	-	
7	Legundi - Planjan	17,14	17,14	-	4,70	12,44	17,14	-	
8	Planjan - Tepus	13,00	13,00	-	13,00	-	13,00	-	
9	Tepus - Jerukwudel	17,90	17,90	-	17,90	-	6,15	-	Fase konstruksi 2 lajur:10,92 Km (MYC)
10	Jerukwudel - Duwet	11,10	11,10	-	11,10	-	11,10	0,50	
	PANJANG TOTAL	116,07	116,07	-	79,38	36,69	97,32	5,10	
	Persentase Terhadap panjang total	100,00%	100,00%	0,00%	68,39%	31,61%	83,85%	4,39%	

Sumber: DPUPESDM DIY, 2023

3.2.4 Capaian kinerja Perangkat Daerah terhadap capaian sasaran Pemda DIY dan Program Pemda

Sebagaimana amanat cascading Kinerja Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral DIY memiliki kontribusi pada pencapaian Sasaran Pemerintah Daerah dan Program pemerintah Daerah sebagaimana tabel sebagai berikut:

Tabel III. 79. Kontribusi Sasaran Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumberdaya Mineral DIY terhadap Capaian Sasaran Pemerintah Daerah

No	Sasaran Pemerintah Daerah	Indikator Pemerintah Daerah	Target	Realisasi	%Realisasi	Sasaran Perangkat Daerah	Indikator	Target	Realisasi	%Realisasi
1.	Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas dan Berkelanjutan	Indeks Gini	0,423	93,850	22186,76	Penduduk Berakses Air Minum	Persentase Rumah Tangga yang menempati hunian dengan akses air minum layak dan aman	95,28%	95,49%	100,22%

No	Sasaran Pemerintah Daerah	Indikator Pemerintah Daerah	Target	Realisasi	%Realisasi	Sasaran Perangkat Daerah	Indikator	Target	Realisasi	%Realisasi
		Indeks Gini	0,423	93,850	22186,76	Penduduk Berakses Sanitasi	Persentase Rumah Tangga yang menempati hunian dengan akses sanitasi layak dan aman	94,90%	97,69%	102,94%
		Indeks Gini	0,423	93,850	22186,76	Penyediaan infrastruktur sumber daya air	Persentase penyediaan infrastruktur sumber daya air	70,53%	73,43%	104,11%
		Indeks Williamson	0,447	89,280	19973,15	Peningkatan aksesibilitas Jalan	Peningkatan persentase aksesibilitas Jalan	97,80%	99,17%	101,40%
		Indeks Gini	0,423	93,850	22186,76	Rumah Tangga yang menempati hunian layak huni dan terjangkau	Persentase rumah tangga yang menempati tempat tinggal layak huni dan terjangkau	96,12%	96,12%	100,00%
		Indeks Gini	0,423	93,850	22186,76	Meningkatnya rumah tangga berakses listrik	Persentase Rumah Tangga berakses listrik	99,99%	99,99%	100,00%
		IKLH (Indeks Kualitas Lingkungan Hidup)	Cukup baik	Cukup baik	100,00	Meningkatnya kesesuaian izin perusahaan air tanah dan pertambangan terhadap rencana tata ruang	Kesesuaian izin perusahaan air tanah dan pertambangan terhadap rencana tata ruang	40,31%	40,31%	100,00%
2	Terwujudnya Reformasi Tata Kelola Pemerintah yang Baik (Good Government)	Indeks Reformasi Birokrasi	80,000	98,840	123,55	Peningkatan kinerja jasa konstruksi	Peningkatan persentase pembinaan kinerja jasa konstruksi	57,12%	90,65%	158,70%
		Indeks Reformasi Birokrasi	80,000	98,840	123,55	Meningkatnya Tata Kelola Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Perangkat Daerah	Kategori Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	A	A	100,00%

Keterkaitan sasaran Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumberdaya Mineral DIY dengan sasaran pemerintah daerah, yaitu:

1. Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas dan Berkelanjutan dipengaruhi oleh ketercapaian beberapa indeks, diantaranya adalah indeks Gini dan indeks Williamson
2. Indeks Gini menggambarkan pemerataan dan ketimpangan secara keseluruhan, mulai dari pendapatan hingga distribusi. Dalam hal ini Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Sumberdaya Mineral DIY berkontribusi pada distribusi dan penyediaan : air minum, sarana sanitasi, infrastruktur sumber daya air, rumah layak huni dan Listrik yang aman.
3. Fasilitasi pembinaan standar pelayanan minimal urusan pekerjaan umum dan penataan ruang serta urusan perumahan rakyat dan kawasan permukiman merupakan salah satu ketugasan Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Sumberdaya Mineral DIY. Dalam pelaksanaan SPM akan mendukung pemerataan dan mengurangi ketimpangan terhadap pemenuhan air minum dan sanitasi pada Kartamantul serta pemenuhan rumah layak huni untuk Rumah bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi secara keseluruhan, mulai dari pendapatan hingga distribusi yang mendukung pencapaian indeks Gini.
4. Indeks Williamson merupakan satu instrumen dalam pengukuran pembangunan wilayah di suatu daerah dengan membandingkannya dengan wilayah yang lebih tinggi (BPS, 2022). Penyelenggaraan jalan sebagai sarana untuk mengurangi ketimpangan Pembangunan wilayah merupakan bagian dari pencapaian indeks Williamson. Dengan adanya Pembangunan dan peningkatan kualitas jalan provinsi akan memudahkan dalam distribusi barang dan manusia, sehingga kegiatan ekonomi dan pemerataan pembangunan dapat terwujud.
5. Indikator meningkatnya kesesuaian izin pengusahaan air tanah dan pertambangan terhadap rencana tata ruang mendukung capaian IKLH (Indeks Kualitas Lingkungan Hidup). Pada program pendukung tercapainya indikator tersebut, Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Sumberdaya Mineral DIY melakukan monitoring, penegasan dan penegakan terhadap hal-hal yang tidak sesuai dengan aturan yang berlaku, sehingga kerusakan lingkungan bisa dihindari.

6. Sebagai Perangkat Daerah mandiri, Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Sumberdaya Mineral DIY diukur keberhasilan tatakelolanya melalui Sasaran Penunjang Meningkatnya Tatakelola Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Perangkat Daerah dengan indikator Kategori RB Perangkat Daerah

Tabel III. 80. Kontribusi Program Sasaran Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumberdaya Mineral DIY terhadap Capaian Program Pemerintah Daerah

No	Program Pemerintah Daerah	Indikator Program Pemerintah Daerah	Target	Realisasi	%Realisasi	Program Perangkat Daerah	Indikator Program PD	Target	Realisasi	% Realisasi
1	Program Pengembangan Pusat Pertumbuhan dan Pemerataan Infrastruktur	Penyediaan Infrastruktur layanan dasar	95,09%	101,41 %	106,65	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan	Terlaksananya pengembangan kearifan lokal dan potensi budaya	1 laporan	4 laporan	400
2	Program Penyelenggaraan Infrastruktur Wilayah	Penyediaan infrastruktur pendukung pengembangan ekonomi	59,91 %	106,91 %	178,45	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Meningkatnya Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Kewenangan DIY	12,51%	13,11%	104,8
3	Program Penyelenggaraan Infrastruktur Wilayah	Penyediaan infrastruktur pendukung pengembangan ekonomi	59,91 %	106,91 %	178,45	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Meningkatnya ketersediaan air melalui infrastruktur sumber daya air	576,01 liter/detik	591,51 liter/detik	102,69
4	Program Pengembangan Pusat Pertumbuhan dan Pemerataan Infrastruktur	Penyediaan Infrastruktur layanan dasar	95,09%	101,41 %	106,65	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase	Pengurangan luasan genangan (Ha)	3,83 Ha	5,03 Ha	131,33
5	Program Peningkatan Kesesuaian Pemanfaatan Ruang	Kesesuaian Pemanfaatan Ruang	81,50%	104,13 %	127,77	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Tata Ruang	Terlaksananya penambahan jaringan jalan baru	2,83 Km	2,83 Km	100
6	Program Peningkatan Kesesuaian Pemanfaatan Ruang	Kesesuaian Pemanfaatan Ruang	81,50%	104,13 %	127,77	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Tata Ruang	Terlaksananya pengadaan tanah untuk penyelenggaraan jalan	83101.34 m2	0 m2	0

No	Program Pemerintah Daerah	Indikator Program Pemerintah Daerah	Target	Realisasi	%Realisasi	Program Perangkat Daerah	Indikator Program PD	Target	Realisasi	% Realisasi
						Ruang				
7	Program Peningkatan Kesesuaian Pemanfaatan Ruang	Kesesuaian Pemanfaatan Ruang	81,50%	104,13 %	127,77	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Tata Ruang	Terlaksananya peningkatan jalan	10.52	0	0
8	Program Peningkatan Kesesuaian Pemanfaatan Ruang	Kesesuaian Pemanfaatan Ruang	81,50%	104,13 %	127,77	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Tata Ruang	Terlaksananya pembangunan jembatan	12 meter	0 meter	0
9	Program Peningkatan Kesesuaian Pemanfaatan Ruang	Kesesuaian Pemanfaatan Ruang	81,50%	104,13 %	127,77	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Tata Ruang	Terlaksananya pemasangan patok aset tanah JJLS	1060 buah	550 buah	51,9
10	Program Peningkatan Kesesuaian Pemanfaatan Ruang	Kesesuaian Pemanfaatan Ruang	81,50%	104,13 %	127,77	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Tata Ruang	Terlaksananya tahapan pengadaan tanah	1 dokumen	0 dokumen	0
11	Program Peningkatan Kesesuaian Pemanfaatan Ruang	Kesesuaian Pemanfaatan Ruang	81,50%	104,13 %	127,77	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Tata Ruang	Terlaksananya rehabilitasi jalan	0 Km	0 Km	0
12	Program Penyelenggaraan Infrastruktur Wilayah	Penyediaan infrastruktur pendukung pengembangan ekonomi	59,91 %	106,91 %	178,45	Program Penyelenggaraan Jalan	Persentase kemantapan jalan	68,61%	70,58%	102,87%
13	Program Sinergitas Tata Kelola Pemerintah Daerah	Tingkat Kepatuhan terhadap Standar Pelayanan Publik	tinggi	tinggi	100	Program Penataan Bangunan Gedung	Layanan kualitas penyelenggaraan bangunan gedung negara dan penataan bangunan	100%	100%	100

No	Program Pemerintah Daerah	Indikator Program Pemerintah Daerah	Target	Realisasi	%Realisasi	Program Perangkat Daerah	Indikator Program PD	Target	Realisasi	% Realisasi
14	Program Pengembangan Pusat Pertumbuhan dan Pemerataan Infrastruktur	Penyediaan Infrastruktur layanan dasar	95,09%	101,41 %	106,65	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Presentase jumlah rumah tangga yang terlayani air curah regional	14,78%	29,09%	196,82%
15	Program Pengembangan Pusat Pertumbuhan dan Pemerataan Infrastruktur	Penyediaan Infrastruktur layanan dasar	95,09%	101,41 %	106,65	Program Pengembangan Sistem Dan Pengelolaan Persampahan Regional	Kapasitas penampungan pengembangan TPA Regional Piyungan	541212 m3	298882,4 m3	55,22
16	Program Pengembangan Pusat Pertumbuhan dan Pemerataan Infrastruktur	Penyediaan Infrastruktur layanan dasar	95,09%	101,41 %	106,65	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan	Terlaksananya Pembangunan Rumah Layak Huni dengan Arsitektur Khas Yogyakarta	50 unit	400 unit	800
17	Program Pengembangan Pusat Pertumbuhan dan Pemerataan Infrastruktur	Penyediaan Infrastruktur layanan dasar	95,09%	101,41 %	106,65	Program Pengembangan Perumahan	Persentase penanganan rumah terdampak bencana dan relokasi akibat program pemerintah	100%	100%	100
18	Program Pengembangan Pusat Pertumbuhan dan Pemerataan Infrastruktur	Penyediaan Infrastruktur layanan dasar	95,09%	101,41 %	106,65	Program Kawasan Permukiman	Persentase penanganan rumah tidak layak huni	58,27%	68,32%	117,25
19	Program Pengembangan Pusat Pertumbuhan dan Pemerataan Infrastruktur	Penyediaan Infrastruktur layanan dasar	95,09%	101,41 %	106,65	Program Kawasan Permukiman	Persentase penanganan kawasan kumuh	25%	8,19%	32,76
20	Program Pengembangan Pusat Pertumbuhan dan Pemerataan Infrastruktur	Penyediaan Infrastruktur layanan dasar	95,09%	101,41 %	106,65	Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)	Penyediaan PSU layak di kawasan permukiman	160 Lokasi	666 Lokasi	416,25

No	Program Pemerintah Daerah	Indikator Program Pemerintah Daerah	Target	Realisasi	%Realisasi	Program Perangkat Daerah	Indikator Program PD	Target	Realisasi	% Realisasi
21	Program Tata Kelola Lingkungan Hidup dan Penanggulangan Bencana	Tingkat ketaatan usaha/kegiatan terhadap persetujuan lingkungan	35%	79,36 %	226,74	Program Pengelolaan Aspek Kegeologian	Rerata penurunan muka air tanah dalam kategori aman	< 20 %	< 20 %	100
22	Program Tata Kelola Lingkungan Hidup dan Penanggulangan Bencana	Tingkat ketaatan usaha/kegiatan terhadap persetujuan lingkungan	35%	79,36 %	226,74	Program Pengelolaan Aspek Kegeologian	Peningkatan pelaksanaan pengusahaan air tanah yang sesuai ketentuan	45,45%	45,45%	100
23	Program Peningkatan Kesesuaian Pemanfaatan Ruang	Kesesuaian Pemanfaatan Ruang	81,50%	104,13 %	127,77	Program Pengelolaan Mineral Dan Batubara	Persentase Pengusahaan Kawasan Peruntukan Pertambangan	7.84 %	9,17%	116,96
24	Program Peningkatan Kesesuaian Pemanfaatan Ruang	Kesesuaian Pemanfaatan Ruang	81,50%	104,13 %	127,77	Program Pengelolaan Mineral Dan Batubara	Peningkatan pelaksanaan usaha pertambangan sesuai kaidah pertambangan yang baik	33,61%	33,61%	100
25	Program Pengembangan Pusat Pertumbuhan dan Pemerataan Infrastruktur	Penyediaan infrastruktur layanan dasar	95,09%	101,41 %	106,65	Program Pengelolaan Energi Terbarukan	Peningkatan pemanfaatan energi baru terbarukan	2000 TOE	3847,44 TOE	192,37
26	Program Pengembangan Pusat Pertumbuhan dan Pemerataan Infrastruktur	Penyediaan infrastruktur layanan dasar	95,09%	101,41 %	106,65	Program Pengelolaan Energi Terbarukan	Terpantaunya pemanfaatan Energi Baru Terbarukan	100%	100%	100
27	Program Pengembangan Pusat Pertumbuhan dan Pemerataan Infrastruktur	Penyediaan infrastruktur layanan dasar	95,09%	101,41 %	106,65	Program Pengelolaan Ketenagalistrikan	Peningkatan pelaksanaan usaha ketenagalistrikan yang sesuai ketentuan	46,88%	46,88%	100

No	Program Pemerintah Daerah	Indikator Program Pemerintah Daerah	Target	Realisasi	%Realisasi	Program Perangkat Daerah	Indikator Program PD	Target	Realisasi	% Realisasi
28	Program Pengembangan Pusat Pertumbuhan dan Pemerataan Infrastruktur	Penyediaan Infrastruktur layanan dasar	95,09%	101,41 %	106,65	Program Pengelolaan Ketenagalistrikan	Penambahan jumlah rumah tangga yang menikmati listrik	14448 SR	16147 SR	111,76
29	Program Sinergitas Tata Kelola Pemerintah Daerah	Tingkat Kepatuhan terhadap Standar Pelayanan Publik	tinggi	tinggi	100	Program Pengembangan Jasa Konstruksi	Sertifikat/laporan hasil uji (LHU) yang diterbitkan	800 LHU	1203 LHU	150,675
30	Program Sinergitas Tata Kelola Pemerintah Daerah	Tingkat Kepatuhan terhadap Standar Pelayanan Publik	tinggi	tinggi	100	Program Pengembangan Jasa Konstruksi	Peningkatan kinerja tenaga konstruksi dan masyarakat jasa konstruksi	59.56%	95,01%	159,4395
31	Program Pengembangan Pusat Pertumbuhan dan Pemerataan Infrastruktur	Penyediaan Infrastruktur layanan dasar	95,09%	101,41 %	106,65	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Presentase jumlah rumah tangga yang terlayani pengolahan air limbah domestik regional	34,72%	36,27%	104,46
32	Program Sinergitas Tata Kelola Pemerintah Daerah	Tingkat Kepatuhan terhadap Standar Pelayanan Publik	tinggi	tinggi	100	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	94,29	89,94	95,4

Keterkaitan capaian program Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumberdaya Mineral DIY dengan program pemerintah daerah :

1. Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Sumberdaya Mineral DIY dalam melaksanakan tugas dan fungsinya melalui 18 program, mendukung 5 sasaran pemda yaitu Program Penyelenggaraan Infrastruktur Wilayah, Program Tata Kelola Lingkungan Hidup dan Penanggulangan Bencana, Program Sinergitas Tata Kelola Pemerintah Daerah, Program Peningkatan Kesesuaian Pemanfaatan Ruang dan Program Pengembangan Pusat Pertumbuhan dan Pemerataan Infrastruktur.
2. Terkait indikator Penyediaan Infrastruktur layanan dasar pada program pemda Program Pengembangan Pusat Pertumbuhan dan Pemerataan Infrastruktur, Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Sumberdaya Mineral DIY melakukan penyediaan sarana dan prasarana sanitasi, air minum, perumahan, dan tenaga Listrik. Sarana sanitasi berupa penanganan air limbah terpusat, pengelolaan persampahan dan pemeliharaan saluran drainase. Pada Penyediaan air minum 2023 disusunlah Jakstrada pengembangan system oenyediaan airminum dan pemberian subsidi PDAB Tirtamarta. Pembangunan rumah layak huni merupakan bagian dari penyediaan perumahan. Selain itu, dilakukan sambungan rumah Listrik untuk rumah tangga miskin.
3. Pada indikator Penyediaan infrastruktur pendukung pengembangan ekonomi, program pemda Penyelenggaraan Infrastruktur Wilayah, Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Sumberdaya Mineral DIY melakukan penyediaan infrastruktur sumberdaya air, dan penyelenggaraan jalan. Penyediaan infrastruktur sumberdaya air berupa Pembangunan sumur bor serta Operasi dan Pemeliharaan Rutin Embung dab jaringan irigasi. Dalam rangka meningkatkan aksesibilitas jalan dilakukan rehabilitasi, pemeliharaan rutin jalan dan jembatan.
4. Pencapaian Program Tata Kelola Lingkungan Hidup dan Penanggulangan Bencana dengan indikator Tingkat ketaatan usaha/kegiatan terhadap persetujuan lingkungan dilakukan melalui program Pengelolaan Aspek Kegeologian untuk mendukung Peningkatan pelaksanaan pengusahaan air tanah yang sesuai ketentuan dan Pengusahaan Kawasan Peruntukan Pertambangan.

5. Pada indikator Tingkat Kepatuhan terhadap Standar Pelayanan Publik, program pemda Program Sinergitas Tata Kelola Pemerintah Daerah, Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Sumberdaya Mineral DIY melakukan pengembangan kinerja jasa konstruksi dan penataan bangunan gedung. Pengembangan kinerja jasa konstruksi meliputi pelatihan TA konstruksi, penyelenggaraan sistem informasi dan Penetapan dan Penyelenggaraan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi.
6. Melalui program ke-Istimewaaan-an Program pemda Peningkatan Kesesuaian Pemanfaatan Ruang, yang diapresiasi oleh pihak luar Pemerintah DIY (Regional, Nasional ,Internasional) dan Kesesuaian Pemanfaatan Ruang mendapat dukungan berupa Pembangunan di Kawasan satuan ruang strategis.

3.3 Efisiensi Anggaran

3.3.1 Realisasi Anggaran Pencapaian Sasaran OPD

Anggaran dan realisasi belanja langsung tahun 2023 yang dialokasikan untuk membiayai program/kegiatan dalam pencapaian sasaran disajikan pada tabel berikut:

Tabel III. 81. Anggaran dan Realisasi Belanja Langsung per Sasaran Tahun 2023

No	Sasaran	Indikator	Kinerja			Anggaran			Efisiensi (Rp)
			Target	Realisasi	% Realisasi	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	% Realisasi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Penduduk Berakses Air Minum	Persentase Rumah Tangga yang menempati hunian dengan akses air minum layak dan aman	95,28 %	95,49	100,22	5.536.452.796	5.439.675.443	98,25	96.777.353 (1.75%)
2	Penduduk Berakses Sanitasi	Persentase Rumah Tangga yang menempati hunian dengan akses sanitasi layak dan aman	94,90 %	97,69	102,94	94.940.215.350	86.636.710.933	91,25	8.303.504.417 (8.75%)

No	Sasaran	Indikator	Kinerja			Anggaran			Efisiensi (Rp)
			Target	Realisasi	% Realisasi	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	% Realisasi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3	Penyediaan infrastruktur sumber daya air	Persentase penyediaan infrastruktur sumber daya air	70,53 %	73,43	104,11	34.731.563.333	31.767.658.253	91,47	2.963.905.080 (8.53%)
4	Peningkatan aksesibilitas Jalan	Peningkatan persentase aksesibilitas Jalan	97.80 %	99,17	101,40	217.953.493.500	212.542.537.292	97,52	5.410.956.208 (2.48%)
5	Peningkatan kinerja jasa konstruksi	Peningkatan persentase pembinaan kinerja jasa konstruksi	57,12 %	90,65	158,70	1.637.713.400	1.576.305.584	96,25	61.407.816 (3.75%)
6	Rumah Tangga yang menempati hunian layak huni dan terjangkau	Persentase rumah tangga yang menempati tempat tinggal layak huni dan terjangkau	96,12 %	96,12	100	143.446.799.750	131.183.561.239	91,45	12.263.238.511 (8.55%)
7	Meningkatnya rumah tangga berakses listrik	Persentase Rumah Tangga berakses listrik	99,99 %	99,99	100	545.449.200	503.390.904	92,29	42.058.296 (7.71%)
8	Meningkatnya kesesuaian izin pengusahaan air tanah dan pertambangan terhadap rencana tata ruang	Kesesuaian izin pengusahaan air tanah dan pertambangan terhadap rencana tata ruang	40.31 %	40,31	100	994.140.100	986.238.822	99,21	7.901.278 (0.79%)
9	Meningkatnya Tata Kelola Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Perangkat Daerah	Kategori Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	A	A	100	52.353.289.947	50.789.676.339	97,01	1.563.613.608 (2.99%)
Jumlah						552.139.114.376	521.424.754.809	94,44	30.714.359.567 (5,56%)
Total Belanja Operasional						268.940.947.776	253.570.409.305	94,28	15.370.538.471 (5,72%)

Berdasarkan tabel III.50 di atas dari total belanja operasi dan modal program/kegiatan yang terkait langsung pencapaian sasaran sebesar Rp. 552.139.114.376 terealisasi Rp. 521.424.754.809 atau 94,44 %. Sisa anggaran sebesar Rp. 30.714.359.567 atau 5,56 % antara lain bersumber dari:

- Sisa pengadaan barang dan jasa;
- Harga pasar di Aplikasi Bela Pengadaan lebih rendah dari DPA/SHBJ;
- Efisiensi belanja yang disesuaikan dengan kebutuhan (pembayaran listrik, air, telepon/internet, makan minum rapat dan biaya perjalanan dinas);
- Sisa pengadaan melalui BLP:
- Sisa pengadaan;
 - a. Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni dalam Kawasan Permukiman dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha (99,93%)
 - ➔ Terdapat 6 BNBA mengundurkan diri, sehingga dari rencana 994 unit penanganan, terealisasi 988 unit
 - b. Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan
 - ➔ Pengadaan Instalasi dan Sambungan Listrik Rumah Tangga DIY terpasang 58 unit dari 69 unit (11 unit tidak terpasang) (96, 59%):
 - 4 calon penerima yang telah memasang sambungan PLN secara mandiri/mendapat bantuan pihak lain
 - 1 calon penerima yang menolak diberikan bantuan (telah lanjut usia)
 - 1 calon penerima yang telah meninggal dunia
 - 5 calon penerima yang NIK nya digunakan orang lain

3.4 Inovasi

Tantangan global penyelenggaraan pemerintahan menuntut aparatur untuk bergerak dinamis dan kreatif. Permasalahan dan Keterbatasan sumber daya harus dipandang sebagai pemicu gagasan dan ide kreatif yang dapat memberikan manfaat bagi masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung. Maka inovasi yang telah dikembangkan dalam pencapaian sasaran kinerja antara lain:

- a. Pemanfaatan media sosial dan google (misalnya layanan unduhan via google drive) untuk percepatan komunikasi, informasi dan edukasi;
- b. Aplikasi SIPBANG (Sistem Informasi Pengawasan dan Pengendalian Pertambangan), Aplikasi SIPGELIS (Sistem Informasi Pengawasan dan Pengendalian Perizinan Ketenagalistrikan), SIPATA (Sistem Informasi Pengawasan dan Pengendalian Perizinan Air Tanah), dan ATAGA (Adu Tanya Dalam Genggaman) melalui WA Aduan Dinas PUPESDM DIY.

3.5 Lintas sektor

Dalam rangka mendukung penyelenggaraan pembangunan di Daerah Istimewa Yogyakarta yang bersifat lintas sektoral agar berdaya dan berhasil guna untuk kesejahteraan masyarakat maka Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan ESDM DIY sebagaimana cascading kinerja pada gambar 1.1 dan mandat kinerja sebagaimana tergambar pada gambar 1.2 melaksanakan optimalisasi lintas sektor. Silang Manajemen Kolaboratif Lintas Sektor tersebut dilaksanakan berlandaskan Instruksi Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta No. 9/INSTR/2021 tentang Silang Manajemen Kolaboratif Lintas Sektor Pemerintah Daerah Daerah Istimwa Yogyakarta. Optimalisasi kinerja Silang Manajemen Kolaboratif Lintas Sektor merupakan salah satu faktor pendukung Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan ESDM DIY dalam mencapai target kinerja yang telah ditentukan ditengah kondisi *Refocusing* dan realokasi anggaran. Inventarisasi Lintas Sektor Biro Organisasi adalah sebagai beri:

Tabel III.82. Inventarisasi Lintas Sektor Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan ESDM DIY

NO	Kegiatan Lintas Sektor	KONTRIBUSI PARA PIHAK		OUTPUT DAN KELOMPOK SASARAN		MANFAAT BAGI OPD DAN MANFAAT BAGI KELOMPOK SASARAN
		PIHAK	KONTRIBUSI	KELUARAN	Kelompok SASARAN	
1	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni dalam Kawasan Permukiman dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	Dinas PUPESDM DIY	pemberian bantuan sosial penanganan rumah tidak layak huni (RTLH). Bentuk bantuan ada 2, yaitu peningkatan kualitas rumah tidak layak huni dan pembangunan baru rumah layak huni bagi masyarakat tidak mampu	Tersebar di 5 kab/kota di DIY : - BSPS : 938 unit - Kab/ Kota : 1616 unit - Kemensos : 17 unit - Habitat : 80 unit - Dana desa :	Masyarakat DIY	Bagi OPD: 1. Mendukung pencapaian kinerja sasaran RPD Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas dan Berkelanjutan 2. Mendukung pencapaian kinerja Sasaran Rumah Tangga yang menempati hunian layak huni dan terjangkau

NO	Kegiatan Lintas Sektor	KONTRIBUSI PARA PIHAK		OUTPUT DAN KELOMPOK SASARAN		MANFAAT BAGI OPD DAN MANFAAT BAGI KELOMPOK SASARAN
		PIHAK	KONTRIBUSI	KELUARAN	Kelompok SASARAN	
		Dinas Pu perumahan kab/kota (kabupaten Gunungkidul, Sleman, Kulon progo, Bantul dan kota yogyakarta) beserta pemerintah kalurahan	berperan sebagai verifikator calon penerima bantuan RTLH..	8 unit - Baznas : 170 unit - BPD diy : 15 unit - SPM bencana : 3 unit - Dais dan BKK : 434 unit - APBD DIY : 988 unit		<ol style="list-style-type: none"> Mendukung pencapaian indikator sasaran Presentase penanganan rumah tidak layak huni Mendukung pencapaian kinerja Program Kawasan Permukiman Pagu anggaran Rp 21.948.600.000,- <p>Bagi Kelompok Sasaran:</p> <ol style="list-style-type: none"> Peningkatan jumlah rumah layak huni di DIY Terlaksananya Penanganan Rumah Tidak Layak Huni (Pembangunan Baru dan Peningkatan Kualitas) Kelompok Kerja (Pokja) Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) secara regular melaksanakan forum yang membahas tentang penyediaan fasilitas umum (jalan lingkungan dan PSU lainnya)
		Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Jawa III (BP2P Jawa III)	melakukan peran penanganan rumah tidak layak huni RTLH) melalui program BSPS dengan data calon penerima bantuan disinkronkan dengan data DPUPESDM DIY			
2	Penyelenggaraan Jalan Provinsi	Dinas PUPESDM DIY melalui Bidang Bina Marga	mewujudkan peningkatan aksesibilitas wilayah dengan upaya menciptakan peningkatan kondisi jaringan jalan provinsi dilakukan dengan peningkatan jalan (pelebaran jalan menuju standar), rekonstruksi jalan, pemeliharaan rutin jalan dan jembatan serta pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan jalan/ jembatan	<ul style="list-style-type: none"> Penambahan, peningkatan dan pemertahan kondisi jalan : 1 Tahun 	Masyarakat Pengguna Jalan	<p>Bagi OPD:</p> <ol style="list-style-type: none"> Mendukung pencapaian kinerja sasaran RPD Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas dan Berkelanjutan Mendukung pencapaian Sasaran Peningkatan Aksesibilitas Jalan Mendukung pencapaian indikator sasaran Peningkatan Presentase Aksesibilitas Jalan Mendukung pencapaian Program Penyelenggaraan Jalan Pagu anggaran melalui program penyelenggaraan jalan senilai Rp. 82.884.910.340 <p>Bagi Kelompok Sasaran: Penambahan, peningkatan dan pemertahakan kondisi jalan melalui penyelenggaraan jalan untuk pemertahakan jalan provinsi dan kondisi mantap dan menambah panjang jalan jaringan baru</p>
		Dinas PUP-KP Kabupaten Gunungkidul, Sleman dan Bantul	berperan dalam sosialisasi ke masyarakat terkait pelaksanaan peningkatan (pelebaran jalan menuju standar), rekonstruksi jalan, pemeliharaan jalan dan jembatan serta pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan jalan/jembatan dalam upaya			

NO	Kegiatan Lintas Sektor	KONTRIBUSI PARA PIHAK		OUTPUT DAN KELOMPOK SASARAN		MANFAAT BAGI OPD DAN MANFAAT BAGI KELOMPOK SASARAN
		PIHAK	KONTRIBUSI	KELUARAN	Kelompok SASARAN	
			peningkatan kondisi kemandapan jalan			
		PLN	berperan dalam pemindahan tiang listrik yang terkena pelaksanaan pekerjaan, untuk mewujudkan peningkatan kondisi jaringan jalan provinsi			
		Telkom	berperan dalam pemindahan tiang telepon/fiber optic yang terkena pelaksanaan pekerjaan, untuk mewujudkan peningkatan kondisi jaringan jalan provinsi			

BAB 4

Penutup

Bab 4 Berisi :

1. Kesimpulan
2. Langkah Perbaikan Kinerja

4.1 Kesimpulan

Hasil laporan kinerja Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral DIY tahun 2023 dapat disimpulkan sebagai berikut: Sasaran Dinas PUPESDM DIY mempunyai 9 (Sembilan) sasaran, yang semua telah mencapai target. Dari 9 sasaran tersebut pencapaian tertinggi adalah Sasaran Peningkatan Kinerja Jasa Konstruksi dengan persentase capaian 158,7%. Dan untuk sasaran terendah ada 3 sasaran dengan persentase capaian 100% yaitu Rumah Tangga yang menempati hunian layak huni dan terjangkau, Meningkatnya rumah tangga berakses listrik, dan Meningkatnya kesesuaian izin pengusahaan air tanah dan pertambangan terhadap rencana tata ruang.

1. Hambatan permasalahan kinerja :
 - a. Masih tingginya kebocoran di masing-masing PDAM
 - b. terbatasnya anggaran kabupaten kota dalam pembiayaan penambahan sambungan rumah IPAL Sewon
 - c. Faktor Kondisi Geologi bawah tanah yang sukar diprediksi
 - d. Pelaksanaan Penanganan Jalan dalam satu wilayah yang berbarengan dari Pemerintah Pusat dan atau Pemerintah Kabupaten
 - e. Alat pengujian yang terbatas
 - f. Terdapat beberapa calon penerima bantuan RLH yang mengundurkan diri karena tidak mampu swadaya, meninggal dunia kondisi rumah kosong, dan konflik sengketa tanah.

- g. Masih terdapat rumah masyarakat yang belum berlistrik dan jaraknya lebih dari 50 meter dari tiang listrik/ sambungan listrik terakhir
- h. Kurangnya kepedulian pemegang izin dalam melaksanakan kewajiban perizinan

2. Faktor kunci keberhasilan

Faktor kunci keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan di Dinas PUPESDM adalah :

- a. Target RPJMN, SPM, dan SDGs yang mengamanatkan untuk daerah meningkatkan akses air minum layak dan aman
- b. Adanya pendanaan pengelolaan penyelenggaraan air limbah domestik terpusat oleh Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota
- c. Persiapan pelaksanaan Konstruksi yang matang
- d. Adanya dukungan penuh dari pemerintah, baik pemerintah daerah maupun pemerintah pusat
- e. Ketersediaan alat laboratorium
- f. Sinergitas antara anggaran Pusat (Program BPS di DIY dan DAK Kab/Kota) - APBD DIY - Dana Keistimewaan DIY- APBD Kabupaten/Kota – CSR
- g. Koordinasi dan pengajuan usulan perluasan jaringan listrik kepada PLN
- h. Pemantauan pengusahaan air tanah secara terpadu dilaksanakan secara berkelanjutan

4.2 Langkah Perbaikan Kinerja

Adapun langkah-langkah perbaikan ke depan sebagai berikut:

- a. PDAM mempunyai target untuk pengurangan kebocoran di setiap wilayahnya
- b. Diperlukan koordinasi yang lebih intens lagi untuk peningkatan infrastruktur sanitasi di masing-masing kabupaten/kota agar tujuan dari RPJMN yang bergeser menjadi akses aman bisa menjadi tujuan pembangunan Bersama
- c. Ketersediaan Data yang cukup melalui e-PAKSI (Pengelolaan Aset dan Kinerja Sistem Irigasi), AKNPI (Angka Kebutuhan Nyata Pengelolaan Irigasi), AKNOP embung, go Hidro, dan aplikasi web SISDA

- d. Peningkatan tata kelola dan koordinasi schedule konstruksi dan pemrograman penanganan jalan antar pengampu Jalan
- e. Menganggarkan pembelian alat uji laboratorium
- f. Meningkatkan kualitas verifikasi calon penerima hibah RLH
- g. Koordinasi dan rekonsiliasi terkait Data Terpadu yang telah dicocokkan dengan data PLN dan telah di tetapkan oleh Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan KESDM;
- h. Adanya koordinasi lintas sektor

Adapun rencana aksi untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi sebagai berikut:

1. Meningkatkan koordinasi dan harmonisasi secara intensif dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Kabupaten/Kota.
2. Monitoring dan evaluasi secara rutin untuk memastikan pelaksanaan program dan kegiatan sesuai target yang telah ditetapkan.
3. Meningkatkan koordinasi dengan TAPD terkait program dan penganggaran
4. Meningkatkan koordinasi dan komunikasi internal Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral DIY secara lebih intensif.

LAMPIRAN

Lampiran 1. Perencanaan Strategis (matriks Renstra lima tahun)

NO	SASARAN	INDIKATOR	Satuan	Awal (Target 2022)	2023	2024	2025	2026	Kondisi Akhir
1	Penduduk Berakses Air Minum	Persentase Rumah Tangga yang menempati hunian dengan akses air minum layak dan aman	%	94,14 %	95,28%	95,8%	96,48%	97,15%	97,15%
2	Penduduk Berakses Sanitasi	Persentase Rumah Tangga yang menempati hunian dengan akses sanitasi layak dan aman	%	94,25 %	94,9%	96,07%	96,54%	97,23%	97,23%
3	Penyediaan infrastruktur sumber daya air	Persentase penyediaan infrastruktur sumber daya air	%	46,38%	70,53%	80,19%	89,86%	100%	100%
4	Peningkatan aksesibilitas Jalan	Peningkatan persentase aksesibilitas Jalan	%	97,24%	97,80%	98,76%	99,22%	100%	100%
5	Peningkatan kinerja jasa konstruksi	Peningkatan persentase pembinaan kinerja jasa konstruksi	%	99,57 %	57,12%	71,41%	85,71%	100%	100%
6	Rumah Tangga yang menempati hunian layak huni dan terjangkau	Persentase rumah tangga yang menempati tempat tinggal layak huni dan terjangkau	%	95,65%	96,12%	96,59%	97,05%	97,53%	97,53%
7	Meningkatnya rumah tangga berakses listrik	Persentase Rumah Tangga berakses listrik	%	99,99%	99,99%	99,99%	99,99%	99,99%	99,99%
8	Meningkatnya kesesuaian izin pengusahaan air tanah dan pertambangan terhadap rencana tata ruang	Kesesuaian izin pengusahaan air tanah dan pertambangan terhadap rencana tata ruang	%	23,85 %	40,31%	46,15%	52,00%	57,85%	57,85%
9	Meningkatnya Tata Kelola Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Di Perangkat Daerah	Kategori Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Indeks	A	A	A	A	A	A

Lampiran 2. Perjanjian Kinerja Awal dan Reviu Tahun 2023



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN
ENERGI SUMBER DAYA MINERAL
alamat Jl. Bumijo No. 5 Yogyakarta Telepon (0274) 589091 Faksimile (0274) 550320
Website : <http://dpupesdm.jogjaprov.go.id> Email : dpupesdm@jogjaprov.go.id Kode Pos 55231

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ANNA RINA HERBRANTI, S.T., M.T.
Jabatan : Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral Daerah Istimewa Yogyakarta
selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : HAMENGGU BUWONO X
Jabatan : Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta
selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA pada tahun 2023 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Yogyakarta, 2 Januari 2023

PIHAK KEDUA
GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

HAMENGGU BUWONO X

PIHAK PERTAMA
KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM,
PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA
MINERAL DIY,

ANNA RINA HERBRANTI, S.T., M.T.
NIP. 197108241998032002

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Perangkat Daerah : Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral DIY
 Jabatan : Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral DIY

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahunan	Triwulan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Penduduk Berakses Air Minum	Persentase Rumah Tangga Yang Menempati Hunian Dengan Akses Air Minum Layak Dan Aman	%	95,28	Triwulan I	92,92
					Triwulan II	92,92
					Triwulan III	92,92
					Triwulan IV	95,28
2.	Penduduk Berakses Sanitasi	Persentase Rumah Tangga Yang Menempati Hunian Dengan Akses Sanitasi Layak Dan Aman	%	94,9	Triwulan I	94,9
					Triwulan II	94,9
					Triwulan III	94,9
					Triwulan IV	94,9*)
3.	Penyediaan Infrastruktur Sumber Daya Air	Persentase Penyediaan Infrastruktur Sumber Daya Air	%	70,53	Triwulan I	70,53
					Triwulan II	70,53
					Triwulan III	70,53
					Triwulan IV	70,53*)
4.	Peningkatan Aksesibilitas Jalan	Peningkatan Persentase Aksesibilitas Jalan	%	97,80	Triwulan I	97,80
					Triwulan II	97,80
					Triwulan III	97,80
					Triwulan IV	97,80*)

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahunan	Triwulan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
5.	Rumah Tangga Yang Menempati Hunian Layak Huni Dan Terjangkau	Persentase Rumah Tangga Yang Menempati Tempat Tinggal Layak Huni Dan Terjangkau	%	96,12	Triwulan I	96,12
					Triwulan II	96,12
					Triwulan III	96,12
					Triwulan IV	96,12*)
6.	Meningkatnya Rumah Tangga Berakses Listrik	Persentase Rumah Tangga Berakses Listrik	%	99,99	Triwulan I	99,99
					Triwulan II	99,99
					Triwulan III	99,99
					Triwulan IV	99,99*)
7.	Meningkatnya Kesesuaian Izin Pengusahaan Air Tanah Dan Pertambangan Terhadap Rencana Tata Ruang	Kesesuaian Izin Pengusahaan Air Tanah Dan Pertambangan Terhadap Rencana Tata Ruang	%	40,31	Triwulan I	19,29
					Triwulan II	19,29
					Triwulan III	19,29
					Triwulan IV	40,31
8.	Peningkatan Kinerja Jasa Konstruksi	Peningkatan Persentase Pembinaan Kinerja Jasa Konstruksi	%	57,12	Triwulan I	57,12
					Triwulan II	57,12
					Triwulan III	57,12
					Triwulan IV	57,12*)
9.	Meningkatnya Tata Kelola Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Di Perangkat Daerah	Kategori Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Indeks	A	Triwulan I	A
					Triwulan II	A
					Triwulan III	A
					Triwulan IV	A*)

Keterangan:

1. Untuk Mencapai Sasaran Strategis Sebagaimana Tersebut Di Atas Terdapat Dukungan Anggaran Sebagai Berikut:

No	Program RPD	Anggaran
1.	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (APBD)	Rp. 5.541.600.000,00
2.	Program Pengembangan Sistem Dan Pengelolaan Persampahan Regional (APBD)	Rp. 93.660.000.000,00
3.	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah (APBD)	Rp. 12.753.199.250,00
4.	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase (APBD)	Rp. 453.014.300,00
5.	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA) (APBD)	Rp. 30.740.688.000,00
6.	Program Penyelenggaraan Jalan (APBD)	Rp. 74.726.032.350,00
7.	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Tata Ruang (Dais)	Rp. 138.945.049.800,00
8.	Program Pengembangan Perumahan (APBD)	Rp. 499.500.000,00
9.	Program Kawasan Permukiman (APBD)	Rp. 18.355.000.000,00
10.	Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU) (APBD)	Rp. 96.600.000.000,00
11.	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan (Dais)	Rp. 21.595.860.000,00
12.	Program Pengelolaan Energi Terbarukan (APBD)	Rp. 119.040.000,00
13.	Program Pengelolaan Ketenagalistrikan (APBD)	Rp. 427.399.200,00
14.	Program Pengelolaan Aspek Kegeologian (APBD)	Rp. 510.429.500,00
15.	Program Pengelolaan Mineral Dan Batubara (APBD)	Rp. 598.966.500,00
16.	Program Penataan Bangunan Gedung (APBD)	Rp. 314.713.400,00
17.	Program Pengembangan Jasa Konstruksi (APBD)	Rp. 1.318.000.000,00
18.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi (APBD)	Rp. 54.442.401.825,00
Jumlah Anggaran		Rp. 551.600.894.125,00

2. *) Data capaian kinerja tersedia pada triwulan IV karena bersifat *outcome*.

Yogyakarta, 2 Januari 2023

PIHAK KEDUA
GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

HAMENGGU BUWONO X



PIHAK PERTAMA
KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN
ENERGI SUMBER DAYA MINERAL DIY,


ANNA RINA HERBRANTI, S.T., M.T.
NIP. 197106241998032002



PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023

Perangkat Daerah : Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral DIY

Jabatan : Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral DIY

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahunan	Triwulan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Penduduk Berakses Air Minum	Persentase Rumah Tangga Yang Menempati Hunian Dengan Akses Air Minum Layak Dan Aman	%	95,28	Triwulan I	94,77
					Triwulan II	94,77
					Triwulan III	94,77
					Triwulan IV	95,28
2.	Penduduk Berakses Sanitasi	Persentase Rumah Tangga Yang Menempati Hunian Dengan Akses Sanitasi Layak Dan Aman	%	94,9	Triwulan I	94,9
					Triwulan II	94,9
					Triwulan III	94,9
					Triwulan IV	94,9*)
3.	Penyediaan Infrastruktur Sumber Daya Air	Persentase Penyediaan Infrastruktur Sumber Daya Air	%	70,53	Triwulan I	46,38
					Triwulan II	46,38
					Triwulan III	46,38
					Triwulan IV	70,53
4.	Peningkatan Aksesibilitas Jalan	Peningkatan Persentase Aksesibilitas Jalan	%	97,80	Triwulan I	97,24
					Triwulan II	97,24
					Triwulan III	97,24
					Triwulan IV	97,80

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahunan	Triwulan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
5.	Rumah Tangga Yang Menempati Hunian Layak Huni Dan Terjangkau	Persentase Rumah Tangga Yang Menempati Tempat Tinggal Layak Huni Dan Terjangkau	%	96,12	Triwulan I	95,65
					Triwulan II	95,65
					Triwulan III	95,65
					Triwulan IV	96,12
6.	Meningkatnya Rumah Tangga Berakses Listrik	Persentase Rumah Tangga Berakses Listrik	%	99,99	Triwulan I	99,99
					Triwulan II	99,99
					Triwulan III	99,99
					Triwulan IV	99,99*)
7.	Meningkatnya Kesesuaian Izin Pengusahaan Air Tanah Dan Pertambangan Terhadap Rencana Tata Ruang	Kesesuaian Izin Pengusahaan Air Tanah Dan Pertambangan Terhadap Rencana Tata Ruang	%	40,31	Triwulan I	23,85
					Triwulan II	28,99
					Triwulan III	35,73
					Triwulan IV	40,31
8.	Peningkatan Kinerja Jasa Konstruksi	Peningkatan Persentase Pembinaan Kinerja Jasa Konstruksi	%	57,12	Triwulan I	52,94
					Triwulan II	54,31
					Triwulan III	56,15
					Triwulan IV	57,12
9.	Meningkatnya Tata Kelola Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Di Perangkat Daerah	Kategori Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Indeks	A	Triwulan I	A
					Triwulan II	A
					Triwulan III	A
					Triwulan IV	A*)

Keterangan:

1. Untuk Mencapai Sasaran Strategis Sebagaimana Tersebut Di Atas Terdapat Dukungan Anggaran Sebagai Berikut:

No	Program RPD	Anggaran
1.	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (APBD)	Rp. 5.536.452.796,00
2.	Program Pengembangan Sistem Dan Pengelolaan Persampahan Regional (APBD)	Rp. 81.734.001.800,00
3.	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah (APBD)	Rp. 12.753.199.250,00
4.	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase (APBD)	Rp. 453.014.300,00
5.	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA) (APBD)	Rp. 34.731.563.333,00
6.	Program Penyelenggaraan Jalan (APBD)	Rp. 82.884.910.340,00
7.	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Tata Ruang (Dais)	Rp. 135.068.583.160,00
8.	Program Pengembangan Perumahan (APBD)	Rp. 498.994.000,00
9.	Program Kawasan Permukiman (APBD)	Rp. 22.263.600.000,00
10.	Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU) (APBD)	Rp. 96.549.730.400,00
11.	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan (Dais)	Rp. 24.134.475.350,00
12.	Program Pengelolaan Energi Terbarukan (APBD)	Rp. 118.050.000,00
13.	Program Pengelolaan Ketenagalistrikan (APBD)	Rp. 427.399.200,00
14.	Program Pengelolaan Aspek Kegeologian (APBD)	Rp. 468.742.000,00
15.	Program Pengelolaan Mineral Dan Batubara (APBD)	Rp. 525.398.100,00
16.	Program Penataan Bangunan Gedung (APBD)	Rp. 314.713.400,00
17.	Program Pengembangan Jasa Konstruksi (APBD)	Rp. 1.323.000.000,00
18.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi (APBD)	Rp. 52.353.286.947,00
Jumlah Anggaran		Rp. 552.139.114.376,00

2. *) Data capaian kinerja tersedia pada triwulan IV karena bersifat *outcome*.

Yogyakarta, 8 November 2023

PIHAK KEDUA
GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

HAMENOKI BUWONO X

PIHAK PERTAMA
KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN
ENERGI SUMBER DAYA MINERAL DIY,

ANNA RINA HERBRANTI, S.T., M.T.
NIP. 197106241998032002

Lampiran 3. Evaluasi LKj IP Tahun Sebelumnya



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
INSPEKTORAT

Inspektorat Daerah Istimewa Yogyakarta

Jalan Cendana No. 40 Yogyakarta Telepon: (0274) 562009 Faksimile: (0274) 512567
Website: <http://inspektorat.jogjaprov.go.id> E-mail: inspektorat@jogjaprov.go.id Kode Pos 55166

Yogyakarta, 20-3-2023

Nomor : 700/01125
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) pada Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Energi Sumber Daya Mineral DIY Tahun 2022

Kepada
Yth. Kepala Dinas Pekerjaan Umum,
Perumahan, dan Energi Sumber
Daya Mineral DIY
di -
Yogyakarta

Dengan hormat kami sampaikan Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) pada Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Energi Sumber Daya Mineral DIY Tahun 2022, sebagai berikut:

A. PENDAHULUAN

1. Dasar Hukum Evaluasi

- a. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- c. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- d. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 94 Tahun 2016 tentang Pedoman Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- e. Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1

No:
Tgl: 05 APR 2023

Tahun..f

4. Ruang Lingkup Evaluasi

Ruang lingkup evaluasi yaitu pada aspek perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, dan evaluasi akuntabilitas kinerja internal.

5. Metodologi Evaluasi

Dalam pelaksanaan Evaluasi AKIP ini, metodologi yang digunakan adalah wawancara, pengumpulan data, verifikasi dokumen, klarifikasi, dan selanjutnya dilakukan analisis dalam rangka memperoleh kesimpulan terhadap tujuan evaluasi yang telah ditetapkan.

6. Gambaran Umum Perangkat Daerah

Berdasarkan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 94 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Energi Sumber Daya Mineral DIY mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan bidang Pekerjaan Umum, urusan pemerintahan bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman serta urusan pemerintahan bidang Energi dan Sumber Daya Mineral. Adapun fungsinya adalah sebagai berikut:

- a. Penyusunan program kerja Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Energi Sumber Daya Mineral;
- b. Perumusan kebijakan teknis urusan Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Kawasan Permukiman, serta Energi Sumber Daya Mineral;
- c. Penyiapan bahan dan pembinaan urusan Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Kawasan Permukiman, serta Energi Sumber Daya Mineral;
- d. Pengembangan dan pengelolaan urusan Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Kawasan Permukiman, serta Energi Sumber Daya Mineral;
- e. Pengawasan dan pengendalian urusan Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Kawasan Permukiman, serta Energi Sumber Daya Mineral;
- f. Pengembangan jasa konstruksi;
- g. Pengelolaan infrastruktur air limbah dan air minum perkotaan;
- h. Pengawasan dan pengendalian perizinan energi sumber daya mineral;
- i. Fasilitasi pembinaan urusan di bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan serta Kawasan Permukiman Kabupaten/Kota;

j. Pemberdayaan...

(NDALEM). Sistem ini menjadi basis data perumahan, khususnya rumah tidak layak huni (RTLH) yang ditangani Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Energi Sumber Daya Mineral DIY, Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten/Kota se-DIY maupun pemerintah pusat di DIY. Ke depan NDALEM ini akan dikembangkan agar terintegrasi dengan sektor lain di bidang perumahan dan kawasan permukiman, diantaranya seperti PSU, air minum, sanitasi, hingga kelistrikan.

8. Tindak Lanjut Evaluasi Tahun Sebelumnya

Terhadap rekomendasi atas evaluasi tahun sebelumnya, Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Energi Sumber Daya Mineral DIY telah menindaklanjuti dengan:

- Penekanan perbaikan pada komponen evaluasi internal dan pencapaian sasaran kinerja organisasi mulai dari perencanaan, pengukuran, pelaporan, evaluasi internal serta pencapaian sasaran/kinerja organisasi secara rutin pada level eselon II dan eselon III.

B. GAMBARAN HASIL EVALUASI

1. Hasil Evaluasi AKIP

Hasil evaluasi yang dituangkan dalam bentuk nilai dengan kisaran mulai dari 0 sampai dengan 100, Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Energi Sumber Daya Mineral DIY memperoleh nilai sebesar 87,73. Nilai sebagaimana tersebut di atas merupakan akumulasi penilaian terhadap seluruh komponen manajemen kinerja yang dievaluasi dengan rincian sebagai berikut:

- a. Evaluasi atas Perencanaan Kinerja memperoleh nilai 27,65 atau 92,17% dari bobot sebesar 30%;
- b. Evaluasi atas Pengukuran Kinerja memperoleh nilai 26,42 atau 88,07% dari bobot sebesar 30%;
- c. Evaluasi atas Pelaporan Kinerja memperoleh nilai 13,18 atau 87,86% dari bobot sebesar 15%;
- d. Evaluasi atas Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal memperoleh nilai 20,48 atau 81,93% dari bobot sebesar 25%.

2. Rekomendasi

Direkomendasikan kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Energi Sumber Daya Mineral DIY agar:

- a. Menerapkan manajemen kinerja berkelanjutan meliputi perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, dan evaluasi atas kinerja internal sehingga praktik baik budaya kinerja yang telah dilakukan dapat dipertahankan bahkan ditingkatkan;

b. Meningkatkan..

- g. Bidang Cipta Karya, terdiri atas:
 - 1) Seksi Penataan Bangunan dan Permukiman; dan
 - 2) Seksi Pengembangan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan Permukiman.
- h. Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral, terdiri atas:
 - 1) Seksi Sumber Daya Air Tanah dan Geologi;
 - 2) Seksi Energi dan Ketenagalistrikan; dan
 - 3) Kelompok Substansi Pertambangan Mineral.
- i. Unit pelaksana teknis; dan
- j. Jabatan fungsional.

7. Gambaran Umum Implementasi AKIP Perangkat Daerah

Implementasi SAKIP pada Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Energi Sumber Daya Mineral DIY dapat digambarkan sebagai berikut:

- a. Pada aspek perencanaan kinerja, Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Energi Sumber Daya Mineral DIY telah memiliki dokumen perencanaan kinerja jangka menengah dan jangka pendek, serta dokumen perencanaan anggaran yang mendukung kinerja.
- b. Pada aspek pengukuran kinerja, telah terdapat Definisi Operasional yang jelas atas kinerja dan cara mengukur indikator kinerja, memiliki mekanisme pengumpulan data kinerja, serta dilakukan secara berkala.
- c. Pada aspek pelaporan kinerja, Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Energi Sumber Daya Mineral DIY telah menyusun dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP), memformalkan, serta mempublikasikan dokumen pelaporan tersebut.
- d. Pada aspek evaluasi akuntabilitas kinerja internal, telah dilakukan evaluasi akuntabilitas kinerja internal secara berjenjang yang melibatkan seluruh unsur dalam organisasi. Dalam rangka peningkatan manajemen kinerja, Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Energi Sumber Daya Mineral DIY telah menggunakan Aplikasi Sengguh dalam rangka pengendalian dan evaluasi kinerja instansi. Dalam pengelolaan sumber daya manusia telah digunakan Aplikasi ASN Memayu sebagai sarana pengisian capaian kinerja pada tingkat individu. Inovasi lain dalam peningkatan kinerja yang digunakan oleh Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Energi Sumber Daya Mineral DIY yaitu *Sistem Informasi Network Residence Information Qualified System*

(NDALEM)...

- b. Meningkatkan koordinasi internal serta kolaborasi dengan perangkat daerah terkait dalam rangka pencapaian indikator Sasaran Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Energi Sumber Daya Mineral DIY.

C. PENUTUPAN

1. Simpulan

Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2022 dapat disimpulkan bahwa Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Energi Sumber Daya Mineral DIY memperoleh nilai 87,73. Nilai tersebut masuk dalam kategori **A** dengan interpretasi **Memuaskan**.

2. Penguatan AKIP

Implementasi sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah pada Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Energi Sumber Daya Mineral DIY diharapkan tidak hanya mendorong pencapaian *output* organisasi secara lebih efektif dan efisien namun juga mampu memberikan kontribusi terhadap pencapaian dampak pada *outcome* yang telah ditetapkan. Secara berjenjang, pencapaian-pencapaian tersebut dapat membantu mewujudkan tercapainya Sasaran Pemerintah Daerah DIY. Oleh karena itu, dibutuhkan kerjasama dan dukungan dari seluruh unsur pada Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Energi Sumber Daya Mineral DIY secara konsisten dan berkesinambungan.

Demikian Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Energi Sumber Daya Mineral DIY, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.


INSPEKTUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
INSPEKTORAT
MUHAMMAD SETIADI, S.Pt., M.Acc.
NIP 19671004 199203 1 005

Tembusan:
Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta

Lampiran 4. Tanggapan/Tindak Lanjut Evaluasi LKJ IP Tahun 2022



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
**DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN
 ENERGI SUMBER DAYA MINERAL**

Alamat: Jl. Bumijo No. 5 Yogyakarta Telepon (0274) 589091 Faksimile (0274) 550320
 Website : <http://dpupesdm.jogjaprov.go.id> Email : dpupesdm@jogjaprov.go.id Kode Pos 55231

TANGGAPAN/TINDAK LANJUT EVALUASI LKJIP TAHUN SEBELUMNYA
Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral DIY

No	Saran/Rekomendasi	Tindak Lanjut
1.	<p>Surat Inspektur DIY Nomor : 700/01125, tanggal 20 Maret 2023, perihal Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) pada Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan ESDM DIY Tahun 2022</p> <p>Rekomendasi:</p> <ol style="list-style-type: none"> Menerapkan manajemen kinerja berkelanjutan meliputi perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja dan evaluasi atas kinerja internal sehingga praktik baik budaya kinerja yang telah dilakukan dapat dipertahankan bahkan ditingkatkan Meningkatkan koordinasi internal serta kolaborasi dengan perangkat daerah terkait dalam rangka pencapaian indikator sasaran Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral. 	<p>Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan dan memperbaiki kinerja adalah sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> Upaya yang dilakukan untuk menerapkan manajemen kinerja berkelanjutan meliputi perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja dan evaluasi atas kinerja internal sehingga praktik baik budaya kinerja yang telah dilakukan dapat dipertahankan bahkan ditingkatkan adalah dengan melakukan perencanaan pengukuran, pelaporan dan evaluasi kinerja secara terintegrasi dan berjenjang, sehingga manajemen kinerja berkelanjutan dapat terlaksana dengan baik. Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan koordinasi internal adalah dengan melakukan apel pagi dan dilanjutkan dengan rapat pimpinan setiap satu minggu sekali pada hari senin. <p>Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kolaborasi dengan perangkat daerah terkait dalam rangka pencapaian indikator sasaran Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumberdaya Mineral adalah melakukan forum ke-PU-an yang dihadiri oleh kepala Dinas PU seluruh kab/kota, Dewan Sumber Daya Air, Tim RP3KP, Tim Terpadu ESDM dan instansi vertikal yang mempunyai pekerjaan yang mendukung capaian kinerja.</p>

Yogyakarta, Januari 2024

KEPALA,

(Signature)
 ANNA RINA HERBRANTI, S.T., M.T.
 NIP. 197106241998032002

Lampiran 5. Prestasi kinerja

NO	NAMA PENGHARGAAN	TGL/BLN/TAHUN PEMBERIAN PENGHARGAAN	SKALA (NASIONAL/INTERNASIONAL)	TINGKATAN/JUARA KE-	KETERANGAN (PENGHARGAAN DIBERIKAN TERKAIT APA)	FOTO SERTIFIKAT/PIAGAM/PIALA
1	Juara 2 Kategori Juru Ukur Kompetisi Tenaga Kerja Konstruksi (KTKK) Nasional	3 November 2023	Nasional	2	Kategori Juru Ukur	



**PEMERINTAH DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**